

TW IV 2022

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN **LPIP**

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan IV-2022

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari informasi yang disajikan.

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2022 ini memuat *overview* kondisi perekonomian global dan domestik serta informasi tentang perkembangan kinerja dan pengawasan perbankan, regulasi baru yang diterbitkan, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi, dan inklusi keuangan khususnya di sektor perbankan selama triwulan IV-2022. Dalam laporan ini tercakup juga peran OJK dalam mendukung suksesnya *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). Selanjutnya, dalam pada periode laporan ini juga terdapat pembahasan khusus terkait pengawasan grup konglomerasi dari Adani Group yang dapat dijadikan *lesson learned* oleh industri jasa keuangan di Indonesia.

Sementara itu, *overview* perekonomian global dan domestik secara sekilas dapat disampaikan bahwa pada periode laporan pertumbuhan ekonomi global melambat seiring dengan ketidakpastian global yang masih cukup tinggi yang dipicu antara lain oleh meningkatnya inflasi global, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut, serta melonjaknya kasus Covid-19 di Tiongkok khususnya pada akhir 2022. Namun demikian, IMF dalam WEO Januari 2023 memproyeksikan bahwa perekonomian global tahun 2023 akan tumbuh 2,9% (yoy), meningkat dari proyeksi pada WEO Oktober 2022 sebesar 2,7% antara lain sebagai pengaruh dari penghapusan *zero-Covid policy* Tiongkok per Desember 2022 yang diperkirakan memperbaiki iklim perekonomian global. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, pada triwulan IV-2022 kinerja ekonomi domestik masih tumbuh baik yaitu sebesar 5,01% (yoy) atau selama tahun 2022 tumbuh 5,31% (yoy), lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 3,70% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan laporan utamanya ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan harga komoditas yang masih cukup tinggi serta masih kuatnya konsumsi domestik sejalan adanya perbaikan mobilitas dan perayaan hari raya Natal dan tahun baru (Nataru).

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan IV-2022 tetap terjaga, tecermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan Rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold*. Berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik dan peningkatan mobilitas masyarakat, ikut mendorong tumbuhnya kredit perbankan per Desember 2022 sebesar 11,35% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (11,00%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (5,24%, yoy). Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh cukup baik sebesar 9,01% (yoy) meski melambat dari tahun sebelumnya namun masih menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 137,67% dan 31,20%, meskipun lebih rendah dari tahun lalu seiring dengan akselerasi penyaluran kredit dan naiknya kewajiban pemenuhan GWM oleh BI. Permodalan juga cukup solid dan diyakini cukup mampu dalam menyerap risiko yang dihadapi dengan CAR sebesar 25,63%. Indikator likuiditas dan permodalan ini akan terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah risiko stagflasi, ketidakpastian geopolitik dan efek pasca pandemi Covid-19. Risiko kredit juga masih terjaga dan membaik tecermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* masing-masing sebesar 2,44% dan 0,71% disertai dengan turunnya rasio *Loan at Risk* terhadap total kredit menjadi 14,05% dari tahun sebelumnya 19,48%. Adapun kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat meskipun DPK juga melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan rasio CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 30,76% dan 24,42%.

Hal lain yang patut kita cermati ke depan adalah risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait potensi peralihan arus modal asing dari sentimen pengetatan kebijakan moneter global serta potensi kenaikan risiko kredit apabila terjadi kegagalan restrukturisasi maupun karena meningkatnya biaya dana yang dapat berdampak pada penurunan daya beli nasabah tertentu. Oleh karena itu, perbankan terus

diminta untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan pembentukan tambahan CKPN secara bertahap. Dalam hal ini, OJK memperpanjang kebijakan stimulus kredit restrukturisasi perbankan sampai dengan 31 Maret 2024 untuk kredit UMKM, kredit sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta kredit industri tekstil dan alas kaki. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan antara lain melalui penyiapan pedoman pengawasan, penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko, dan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan 11 ketentuan perbankan yang antara lain terkait penguatan kelembagaan dan manajemen risiko perbankan. Pada periode laporan OJK juga mengeluarkan satu Keputusan Dewan Komisiner (KDK) OJK yaitu KDK OJK Nomor 34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, serta empat Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK yang ditujukan kepada industri perbankan. Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Maret 2023,



Dian Ediana Rae
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Box	x
Ringkasan Eksekutif	xi
Infografis	xiii
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	1
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik	3
B. Kinerja Perbankan.....	8
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	8
1.1 Aset BUK	9
1.2 Sumber Dana BUK.....	9
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	11
1.4 Rentabilitas BUK.....	12
1.5 Permodalan BUK.....	13
2. Kinerja Bank Syariah	13
2.1 Aset Bank Syariah.....	14
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	14
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	15
2.4 Rentabilitas BUS.....	16
2.5 Permodalan BUS.....	17
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	18
3.1 Aset BPR.....	18
3.2 Sumber Dana BPR.....	19
3.3 Penggunaan Dana BPR	19
3.4 Rentabilitas BPR	20
3.5 Permodalan BPR	20
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	20
4.1 Aset BPRS	21
4.2 Sumber Dana BPRS.....	21
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	22
4.4 Rentabilitas BPRS.....	22
4.5 Permodalan BPRS.....	22
Bab II Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan	29
A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS).....	31
1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	31
2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)	34
3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM	36
B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS	38
1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	38
2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)	38

Bab III Profil Risiko Perbankan.....	47
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	50
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	52
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	52
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
3. Risiko Pasar	58
3.1 Risiko Nilai Tukar	58
3.2 Risiko Suku Bunga.....	59
4. Risiko Likuiditas.....	60
Bab IV Pengawasan Perbankan.....	63
1. Penilaian Risiko Operasional.....	65
2. Penilaian Tata Kelola Perbankan	65
2.1 Bank Umum	66
2.2 BPR dan BPRS.....	66
3. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	67
3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	67
3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	68
3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	68
4. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	71
4.1 Bank Umum	71
4.2 BPR dan BPRS	71
4.3 Perbankan Syariah.....	72
4.4 Pengawasan Terintegrasi.....	72
Bab V Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan	73
1. Pengaturan Perbankan	75
2. Kelembagaan Perbankan	76
2.1 Bank Umum Konvensional.....	76
2.2 Perbankan Syariah.....	79
2.3 BPR.....	82
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga.....	85
1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	87
2. Koordinasi Bilateral.....	94
2.1 OJK dan BI	94
2.2 OJK dan LPS.....	94
3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT.....	95
Bab VII Asesmen Lembaga Internasional.....	97
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....	101
A. Perlindungan Konsumen	103
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	103
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan	104
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	106
3. Pengawasan <i>Market Conduct</i> – Pemantauan Iklan.....	108

B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	109
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	109
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	109
3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	109
4. Digitalisasi Tabungan Anak (DTA)	110
5. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) Gen 2.....	110
6. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir	111
Lampiran	113
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	115
Lampiran II. Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2022	117
Lampiran III. <i>Glossary</i>	122

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	8
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	9
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	9
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank.....	11
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar.....	11
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK.....	11
Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK.....	13
Tabel 8 Indikator Umum Bank Syariah.....	14
Tabel 9 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan.....	15
Tabel 10 Indikator Umum BPR.....	18
Tabel 11 Penyebaran DPK BPR.....	19
Tabel 12 Indikator Umum BPRS.....	21
Tabel 13 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi.....	31
Tabel 14 Porsi Penyaluran Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial).....	36
Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi.....	38
Tabel 16 Persebaran Kredi/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial).....	39
Tabel 17 Perkembangan ATMR Bank Umum.....	49
Tabel 18 Perkembangan Kualitas Kredit.....	51
Tabel 19 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 20 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 21 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank.....	52
Tabel 22 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi.....	57
Tabel 23 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori.....	60
Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan.....	62
Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	68
Tabel 26 Ketentuan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan IV-2022.....	75
Tabel 27 Perizinan BUK.....	77
Tabel 28 Jaringan Kantor BUK.....	78
Tabel 29 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BUK.....	79
Tabel 30 Perizinan Perbankan Syariah.....	80
Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	81
Tabel 32 Jaringan Kantor BPRS.....	82
Tabel 33 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah.....	82
Tabel 34 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPRS.....	82
Tabel 35 Jaringan Kantor BPR.....	83
Tabel 36 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR.....	83
Tabel 37 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan.....	104
Tabel 38 Total Layanan Per Sektor.....	104
Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	104

Tabel 40 Lima Besar Jenis Sengketa Sektor Perbankan yang diterima LAPS SJK	107
Tabel 41 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2022.....	109
Tabel 42 Realisasi Program K/PMR Triwulan IV-2022	111

Daftar Grafik

Grafik 1	Rerata Kasus Covid-19 di Tiongkok.....	3
Grafik 2	Inflasi Konsumen.....	4
Grafik 3	Suku Bunga Acuan.....	4
Grafik 4	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Triwulan IV-2022	4
Grafik 5	PMI Manufaktur Beberapa Negara	5
Grafik 6	Perkembangan Harga Komoditas	5
Grafik 7	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	5
Grafik 8	Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor Indonesia	6
Grafik 9	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	6
Grafik 10	Realisasi Penyerapan Dana PEN 2022.....	7
Grafik 11	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	7
Grafik 12	Komposisi Sumber Dana Perbankan	9
Grafik 13	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	10
Grafik 14	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	10
Grafik 15	Kredit per Valuta	12
Grafik 16	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	12
Grafik 17	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah	14
Grafik 18	Pertumbuhan DPK Bank Syariah.....	15
Grafik 19	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	16
Grafik 20	Laba dan ROA BUS.....	16
Grafik 21	Perkembangan Aset BPR.....	18
Grafik 22	Perkembangan DPK BPR.....	19
Grafik 23	Perkembangan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	20
Grafik 24	Tren Aset BPRS.....	21
Grafik 25	Tren Pertumbuhan DPK BPRS	21
Grafik 26	Tren ROA dan BOPO BPRS	22
Grafik 27	Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)	35
Grafik 28	Perkembangan Kredit/Pembiayaan UMKM.....	37
Grafik 29	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	50
Grafik 30	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit (yoy).....	50
Grafik 31	Pertumbuhan CKPN (yoy).....	50
Grafik 32	Tren Kredit Restrukturisasi terkait Covid-19.....	51
Grafik 33	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	54
Grafik 34	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	55
Grafik 35	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	55
Grafik 36	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	58
Grafik 37	Dollar Index dan VIX Index.....	58
Grafik 38	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	59
Grafik 39	Distribusi Komposisi PDN Perbankan	59
Grafik 40	<i>Spread Yield</i> UST dan SBN.....	59
Grafik 41	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia.....	59
Grafik 42	Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan.....	60
Grafik 43	Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (<i>Trading</i> dan AFS) berdasarkan Tenor.	60

Grafik 44	Perkembangan Parameter IRRBB.....	60
Grafik 45	LDR berdasarkan Valuta	61
Grafik 46	AL/NCD dan AL/DPK (%).....	61
Grafik 47	Perkembangan LCR dan NSFR.....	61
Grafik 48	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	62
Grafik 49	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	66
Grafik 50	Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	67
Grafik 51	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	78
Grafik 52	Penyebaran Jaringan Kantor BUS	81
Grafik 53	Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	82
Grafik 54	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	83
Grafik 55	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan	105
Grafik 56	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan	105
Grafik 57	Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan	106
Grafik 58	Tren Pemantauan Iklan.....	109

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2023	23
Box 2	Kasus Adani Grup di India dan Pentingnya Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan	40

Ringkasan Eksekutif

Pada triwulan IV-2022, pertumbuhan ekonomi global melambat seiring dengan ketidakpastian global yang cukup tinggi, antara lain tekanan inflasi global, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut, serta melonjaknya kasus Covid-19 di Tiongkok khususnya pada akhir 2022. Namun demikian, IMF dalam WEO Januari 2023 merevisi ke atas proyeksi perekonomian global tahun 2023 menjadi 2,9% (yoy) dari sebelumnya 2,7% pada WEO Oktober 2022 antara lain dipengaruhi penghapusan *zero-Covid policy* Tiongkok sejak Desember 2022.

Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2022 masih tumbuh baik yaitu sebesar 5,01% (yoy) meski sedikit melambat dari triwulan III-2022 yang tumbuh 5,73% (yoy). Lebih lanjut, selama tahun 2022 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,31% (yoy), lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 3,70% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan laporan utamanya ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan harga komoditas yang masih relatif tinggi serta masih kuatnya konsumsi domestik seiring perbaikan mobilitas dan perayaan hari raya Natal dan tahun baru (Nataru).

Berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik juga terekam pada indikator perbankan sebagaimana terlihat pada membaiknya pertumbuhan kredit (bank umum) yaitu sebesar 11,35% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (11,00%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (5,24%, yoy). Membaiknya aktivitas usaha serta rendahnya nominal kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya (*low base effect*) menjadi salah satu pendorong tingginya pertumbuhan kredit. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh relatif tinggi yaitu sebesar 9,01% (yoy) meskipun tercatat melambat dari tahun sebelumnya sebesar 12,21% (yoy). Faktor ini juga menjadi penopang kondisi likuiditas bank umum yang memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 137,67% dan 31,20%, atau jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 25,63% yang utamanya ditopang rentabilitas (ROA) yang cukup memadai dan meningkat. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang menurun masing-masing menjadi 2,44% dan 0,71%.

Sejalan dengan kinerja bank umum yang relatif baik, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat meskipun dengan DPK yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 30,76% dan 24,42%. Meskipun kinerja perbankan cukup menggembirakan, namun perlu diperhatikan risiko lainnya utamanya risiko pasar yang berasal dari kenaikan *yield* obligasi maupun risiko kredit seiring kenaikan biaya akibat kenaikan suku bunga yang berpotensi mengurangi ekspansi usaha dan daya beli masyarakat.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan, penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko, dan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*. Terkait dengan penguatan regulasi, pada periode laporan, OJK menerbitkan 11 ketentuan perbankan yang antara lain terkait penguatan kelembagaan dan manajemen risiko perbankan. Pada periode laporan, OJK juga mengeluarkan satu Keputusan Dewan Komisiner (KDK) OJK yaitu KDK OJK Nomor 34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, serta empat Surat Kepala Eksekutif Pengawas

Perbankan (KEPP) OJK yang ditujukan kepada industri perbankan. Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada SJK Indonesia. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga terus diperkuat oleh OJK antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, DTA, SiMuda, dan K/PMR.

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan

Triwulan IV 2022

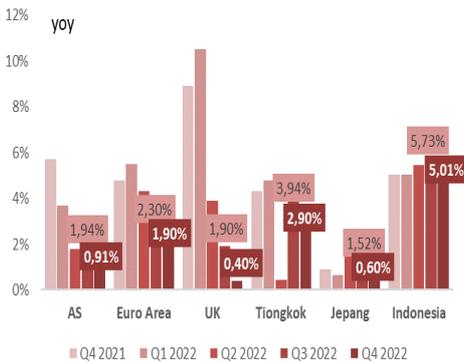
OVERVIEW MAKROEKONOMI

Ekonomi Global

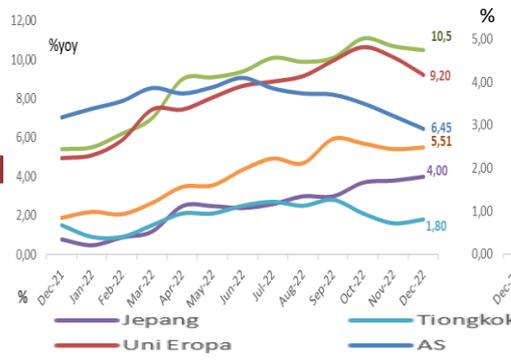


- Pertumbuhan ekonomi global pada triwulan IV-2022 secara umum melambat dari triwulan sebelumnya seiring dengan ketidakpastian global yang masih cukup tinggi.
- Beberapa otoritas moneter dunia masih menaikkan suku bunga acuan (khususnya The Fed, BOE, dan European Central Bank (ECB)) untuk mengatasi laju inflasi yang masih cukup tinggi meski mulai melandai.
- Penghapusan *zero-Covid policy* Tiongkok pada Desember 2022 diperkirakan dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam di tahun 2023.

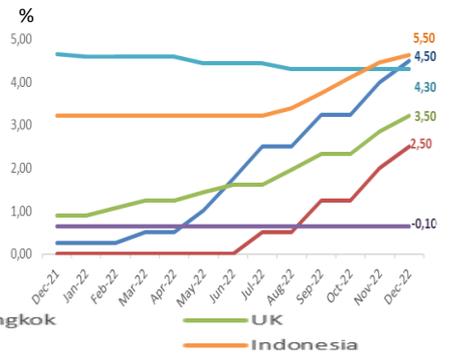
Pertumbuhan Ekonomi



Inflasi Global



Suku Bunga Global

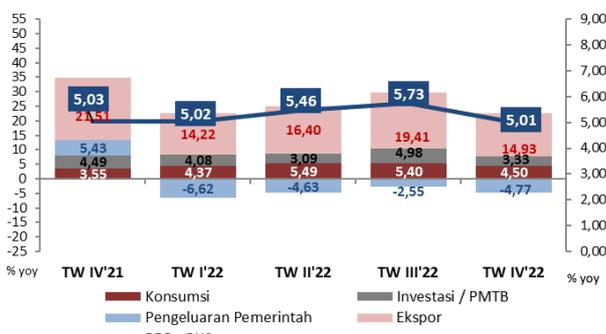


Ekonomi Domestik

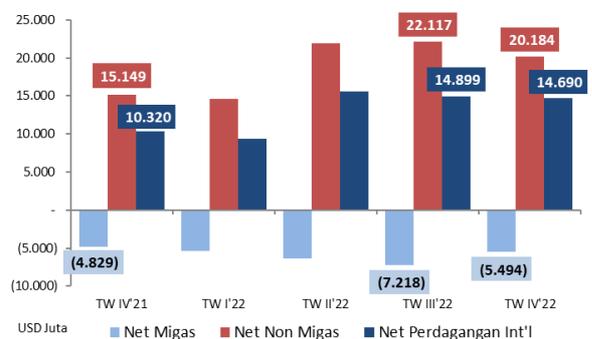
- Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2022 masih tumbuh tinggi sebesar 5,01% (yoy) atau 5,31% (yoy) pada tahun 2022. Pertumbuhan pada periode laporan terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan harga komoditas yang masih cukup tinggi serta masih kuatnya konsumsi domestik sejalan adanya perbaikan mobilitas dan perayaan Nataru.
- Pengeluaran pemerintah masih berkontraksi dipengaruhi konsolidasi fiskal terkait penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).



PDB Indonesia



Neraca Perdagangan Indonesia



INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan

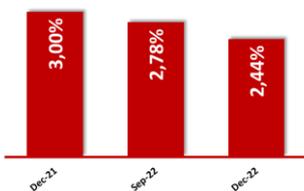
Triwulan IV 2022

KINERJA	Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA	
	 Bank Umum	10,18% (yoy) Rp11.113 T	12,21% (yoy) Rp8.154 T	5,24% (yoy) Rp6.424 T	25,67%	1,84%
 Bank Umum Konvensional	9,90% (yoy) Rp10.581 T	9,01% (yoy) Rp7.725 T	11,35% (yoy) Rp6.101 T	25,63%	2,43%	2022
 Bank Umum Syariah & UUS	10,13% (yoy) Rp10.581 T	12,16% (yoy) Rp7.725 T	5,30% (yoy) Rp6.101 T	25,66%	1,85%	
	13,94% (yoy) Rp782 T	15,24% (yoy) Rp606 T	6,75% (yoy) Rp491 T	25,71%*	1,55%*	
	15,57% (yoy)	12,86% (yoy)	19,91% (yoy)	26,28%*	2,00%*	

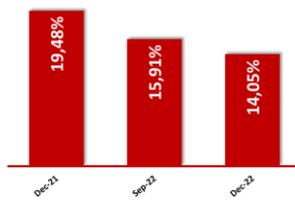
*Khusus rasio BUS

Risiko Kredit

NPL Gross

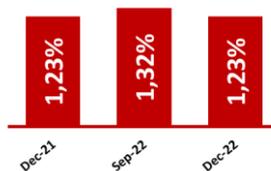


LaR



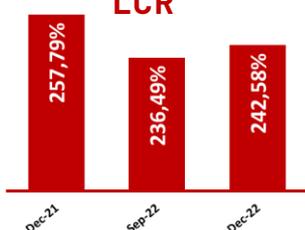
Risiko Pasar

PDN



Risiko Likuiditas

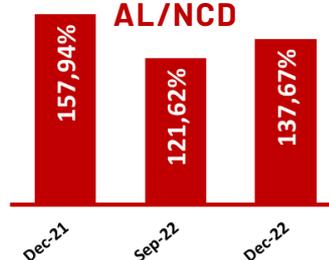
LCR



NSFR



AL/NCD



PROFIL
RISIKO
BANK
UMUM

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV 2022

KINERJA						
	Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA	
 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	8,62% (yoy)	10,23% (yoy)	5,24% (yoy)	32,15%	1,78%	2021
	8,23% (yoy) Rp182 T	8,49% (yoy) Rp127 T	10,91% (yoy) Rp129 T	30,76%	1,74%	2022
 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	14,11% (yoy)	18,05% (yoy)	12,19% (yoy)	23,79%	1,73%	
	18,15% (yoy) Rp20 T	16,00% (yoy) Rp13 T	20,57% (yoy) Rp14 T	24,42%	1,92%	

KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN IV 2022

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 18 Tahun 2022	Perintah Tertulis	14 Oktober 2022	Bank Umum, BPR, BPRS
POJK Nomor 19 Tahun 2022	Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana	27 Oktober 2022	Bank Umum, BPR, BPRS
POJK Nomor 22 Tahun 2022	Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum	1 November 2022	Bank Umum
POJK Nomor 23 Tahun 2022	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	23 November 2022	BPR

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV 2022

KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN IV 2022

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 24 Tahun 2022	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum	25 November 2022	Bank Umum
POJK Nomor 26 Tahun 2022	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	26 Desember 2022	BPRS
POJK Nomor 27 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum	26 Desember 2022	Bank Umum Konvensional
SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum	7 Desember 2022	Bank Umum Konvensional
SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	22 Desember 2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2022	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum	22 Desember 2022	Bank Umum
SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022	Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum	27 Desember 2022	Bank Umum

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan

Triwulan IV 2022

DUKUNGAN OJK TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH



UMKM

Pada triwulan IV-2022, kredit/pembiayaan UMKM tumbuh 10,47% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,19% (yoy). Porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM pada periode laporan tercatat sebesar 21,00% terhadap total kredit/pembiayaan bank umum, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 20,95%. Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 48,67%) yang tumbuh 9,15% (yoy).

SimPel



Perkembangan program SimPel/SimPel iB sampai dengan triwulan IV-2022 tercatat sebanyak 352 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB. Sebanyak 424.896 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 46,4 juta rekening dan nominal Rp8,42 triliun.



LAKU PANDAI

Pada triwulan IV-2022, terdapat 35 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.156.088 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 28.803.125 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,07 triliun.

KEJAR



Sampai dengan triwulan IV-2022, terdapat 53,38 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 81,04% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp29,2 triliun.



SIMUDA

Sampai dengan triwulan IV-2022 tercatat sebanyak 69.634 rekening dan nominal sebesar Rp163 miliar SiMuda Eksisting dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 49 rekening dengan nominal Rp31,87 juta.
- SiMuda RumahKu: 69.585 rekening dengan nominal Rp163,00 miliar.

Terkait dengan SiMuda Lainnya, sampai dengan triwulan IV-2022 tercatat sebanyak 677.698 rekening dan nominal sebesar Rp2,96 triliun.

K/PMR

K/PMR

Sampai dengan triwulan IV-2022 program K/PMR telah diimplementasikan oleh 55 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 88 skema model pembiayaan, dan realisasi penyaluran kepada 887.637 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp26,14 triliun.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features an abstract geometric design. It consists of several red hexagons of varying sizes and shades, some of which are 3D cubes. These are interconnected by a network of thin, light blue lines that form a complex, interconnected pattern. The overall aesthetic is clean, modern, and technical.

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

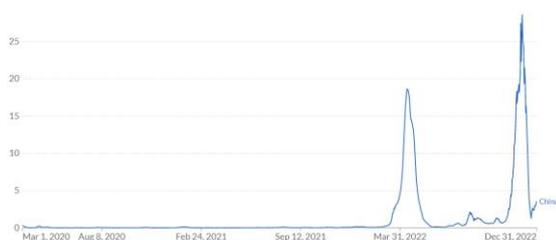
Kinerja Industri Perbankan Nasional

Pada triwulan IV-2022, pertumbuhan ekonomi global melambat seiring ketidakpastian global yang masih cukup tinggi. Dalam kondisi tersebut, ekonomi domestik masih tumbuh cukup baik dipengaruhi peningkatan mobilitas dari penghapusan PPKM dan peningkatan permintaan seiring adanya perayaan Nataru. Di sektor perbankan, kredit modal kerja masih menjadi *driver* utama yang mendorong pertumbuhan kredit ke level yang cukup tinggi dengan ditopang kemampuan bank dalam menyerap risiko cukup baik karena memiliki bantalan permodalan dan likuiditas yang cukup memadai.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan IV-2022, ekonomi global menunjukkan tanda perlambatan sebagaimana tecermin dari pertumbuhan mayoritas negara utama dunia yang melambat seiring dengan ketidakpastian global yang masih cukup tinggi. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh tekanan inflasi global, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut, serta melonjaknya kasus Covid-19 di Tiongkok khususnya pada akhir 2022. Namun demikian, penghapusan kebijakan *zero-Covid policy* oleh pemerintah Tiongkok per Desember 2022 diperkirakan dapat menahan perlambatan perekonomian global lebih dalam ke depannya. Hal ini dikarenakan penghentian kebijakan tersebut berpotensi 'memulihkan' permintaan dari Tiongkok dan mendorong peningkatan perdagangan global.

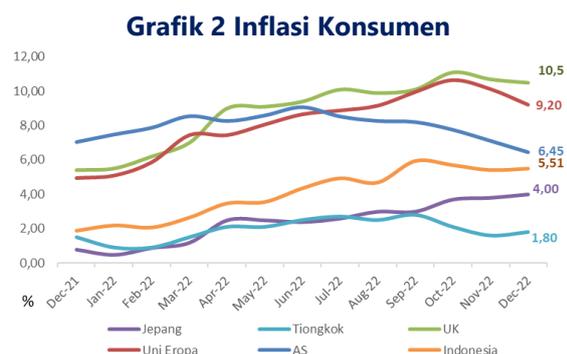
Grafik 1 Rerata Kasus Covid-19 di Tiongkok



Sumber: Ourworldindata

Seiring dengan masih tingginya faktor ketidakpastian tersebut, IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2023 memproyeksikan bahwa perekonomian global tahun 2023 akan tumbuh 2,9% (yoy), meningkat dari proyeksi pada WEO Oktober 2022 sebesar 2,7% antara lain pengaruh potensi *upward effect* dari penghapusan *zero-Covid policy* Tiongkok. Proyeksi tahun 2023 tersebut melambat dari estimasi pertumbuhan tahun 2022 sebesar 3,4% (yoy), dan diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,1% (yoy) pada tahun 2024. Selain itu, inflasi global tahun 2023 diperkirakan akan menurun dari 8,8% (2022) menjadi 6,6% pada 2023, dan 4,3% pada 2024.

Pada akhir 2022, tekanan inflasi global masih berlanjut, meski mulai melandai, namun masih cukup tinggi dan di atas level pra-pandemi. Dalam hal ini, pengetatan kebijakan moneter di negara maju diperkirakan mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih akan tetap tinggi di sepanjang tahun 2023.



Sumber: Reuters



Sumber: Reuters

Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Triwulan IV-2022



Sumber: Trading Economics dan Reuters

Sebagai dampak dari tekanan inflasi tersebut, beberapa negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022, seperti AS, Eropa, dan United Kingdom (UK) yang utamanya masih dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan pangan dunia sehingga berdampak pada penurunan produksi kegiatan manufaktur. Di wilayah Asia, Tiongkok dan Jepang juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

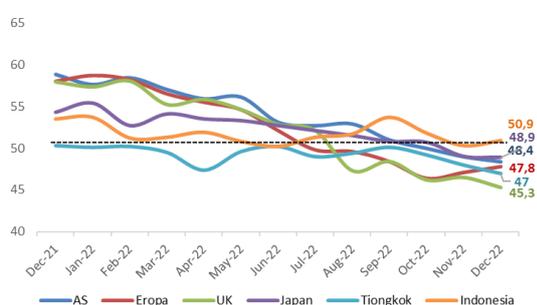
Perlambatan di Tiongkok antara lain sebagai pengaruh dari pembatasan mobilitas akibat *zero-Covid policy* yang menghambat aktivitas usaha serta belum pulihnya sektor properti. Sementara di Jepang, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh lemahnya investasi di tengah konsumsi yang masih belum kuat.

Perlambatan aktivitas usaha di beberapa negara tersebut tercermin dari *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur AS, UK, Eropa, Tiongkok, dan Jepang yang berada di level kontraksi (di bawah 50) yang menunjukkan adanya tekanan terhadap kegiatan usaha. Sementara itu, kegiatan usaha di Indonesia masih cukup baik sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansi (di atas 50) sebagai dampak dari penghapusan kebijakan PPKM seiring dengan melandainya kasus Covid-19 domestik. Selain itu, baiknya aktivitas usaha Indonesia juga turut dipengaruhi *windfall* dari kenaikan harga komoditas.

Harga komoditas global terpantau meningkat tercermin dari indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada Desember 2022 sebesar 536,54 lebih tinggi dari 502,25 pada Desember 2021. Namun demikian dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (September 2022: 538,49), indeks harga komoditas sudah mulai menurun sejalan dengan perkiraan normalisasi harga ke depan. Kenaikan harga komoditas terutama didorong oleh naiknya harga komoditas batubara seiring meningkatnya permintaan pada musim dingin terutama dari Eropa, sementara kenaikan harga minyak dunia masih dipengaruhi oleh dampak pandemi serta

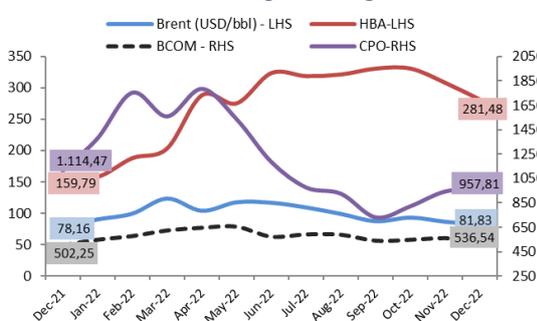
konflik Rusia-Ukraina yang memengaruhi pasokan minyak dunia. Sementara itu, harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) menurun dari tahun lalu sebagai pengaruh antara lain melemahnya permintaan pada musim dingin, naiknya kasus Covid-19 di Tiongkok sehingga menurunkan permintaan dari Tiongkok, dan turunnya harga minyak saingan seperti kedelai sehingga ikut menurunkan harga CPO di pasar nabati.

Grafik 5 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Grafik 6 Perkembangan Harga Komoditas

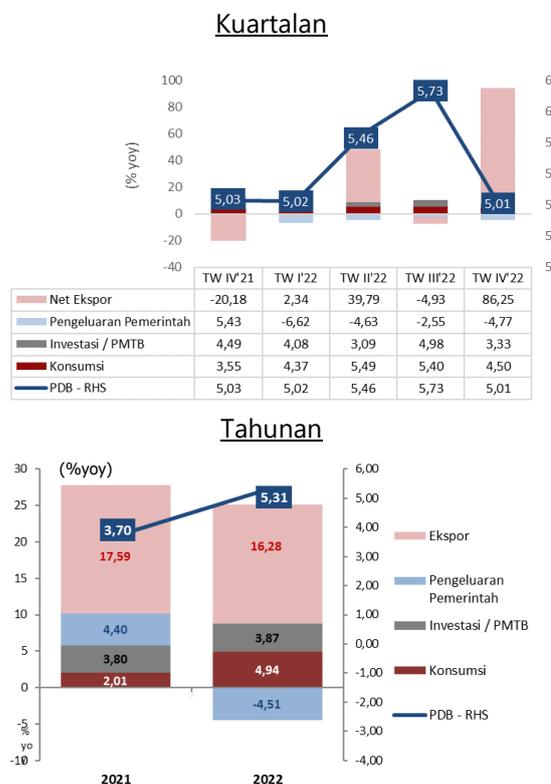


Sumber: Reuters

Indonesia termasuk negara yang pro-siklikal terhadap harga komoditas, sehingga fluktuasi harga komoditas akan sangat memengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Pada triwulan IV-2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% (yoy). Selama tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31% (yoy) meningkat dari pertumbuhan tahun 2021 sebesar 3,70% (yoy). Pertumbuhan terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan harga

komoditas yang masih cukup tinggi serta masih kuatnya konsumsi domestik sejalan perbaikan mobilitas dan perayaan hari raya Natal dan tahun baru (Nataru).

Grafik 7 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran

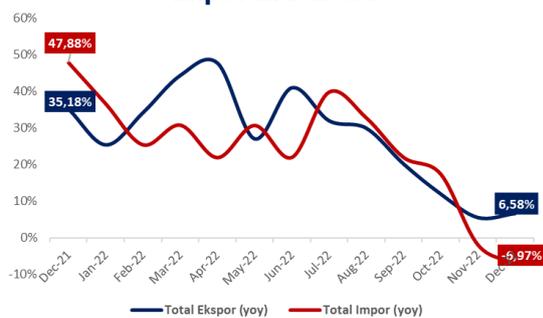


Sumber: BPS

Kinerja ekspor (transaksi perdagangan internasional) menjadi komponen PDB dengan pertumbuhan tertinggi dimana *net export* tumbuh 86,25% (yoy) selama triwulan IV-2022, sebagai dampak tumbuhnya ekspor sementara impor berkontraksi. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia pada triwulan IV-2022 mencatatkan surplus sebesar USD14,69 miliar meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan surplus USD14,90 miliar. Sepanjang tahun 2022, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus USD54,53 miliar lebih tinggi dari

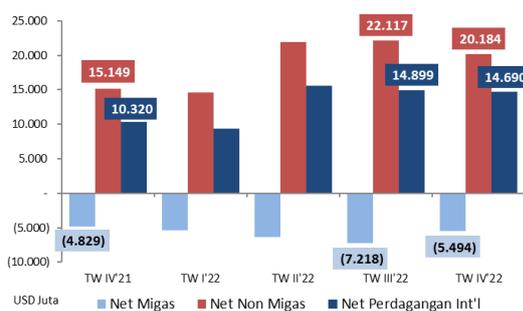
surplus USD35,41 miliar pada tahun 2021. Meski neraca perdagangan Indonesia masih cukup baik, ke depan perlu diperhatikan risiko terkait dengan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas dunia.

Grafik 8 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor Indonesia



Sumber: BPS

Grafik 9 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

Selanjutnya, pada triwulan laporan, konsumsi tumbuh 4,50% (yoy) didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang memiliki porsi terbesar 54,03%. Kenaikan konsumsi rumah tangga terdapat pada semua sektor utamanya sektor transportasi dan komunikasi serta makanan dan minuman, sejalan dengan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dipengaruhi pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pola musiman akhir tahun perayaan Nataru

yang mendorong kenaikan konsumsi. Selain itu, kenaikan konsumsi juga didorong oleh program perlindungan sosial antara lain berupa bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat. Naiknya konsumsi tersebut juga ditunjukkan oleh kuatnya keyakinan konsumen Indonesia pada level optimis (>100) dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 119,9 per Desember 2022, meningkat dari 118,3 per Desember 2021.

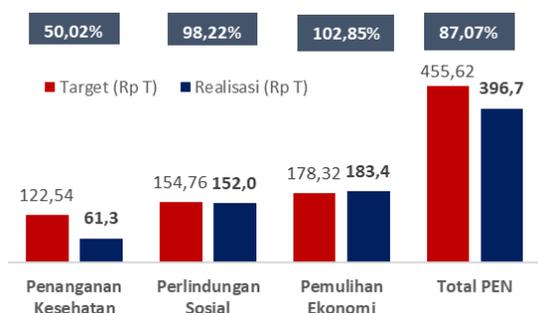
Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,33% (yoy), didorong utamanya oleh investasi mesin dan perlengkapan. Hal ini juga sejalan dengan naiknya nilai impor barang baku/penolong dan barang modal yang tumbuh masing-masing 23,04% (yoy) dan 26,99% (yoy) menandakan tumbuhnya aktivitas kegiatan usaha dan seiring masih berlanjutnya proyek pembangunan pemerintah. Hal ini juga ditunjukkan oleh indeks PMI Manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansi sebesar 50,9.

Sementara itu, pengeluaran pemerintah berkontraksi -4,77% (yoy) antara lain dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal terkait penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik.

Pada tahun 2022, anggaran PC-PEN 2022 ditetapkan sebesar Rp455,62 triliun (lebih rendah dari Rp744,77 triliun pada 2021) dan disederhanakan hanya menjadi tiga kluster, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi. Per 30 Desember 2022, realisasi anggaran PEN tercatat

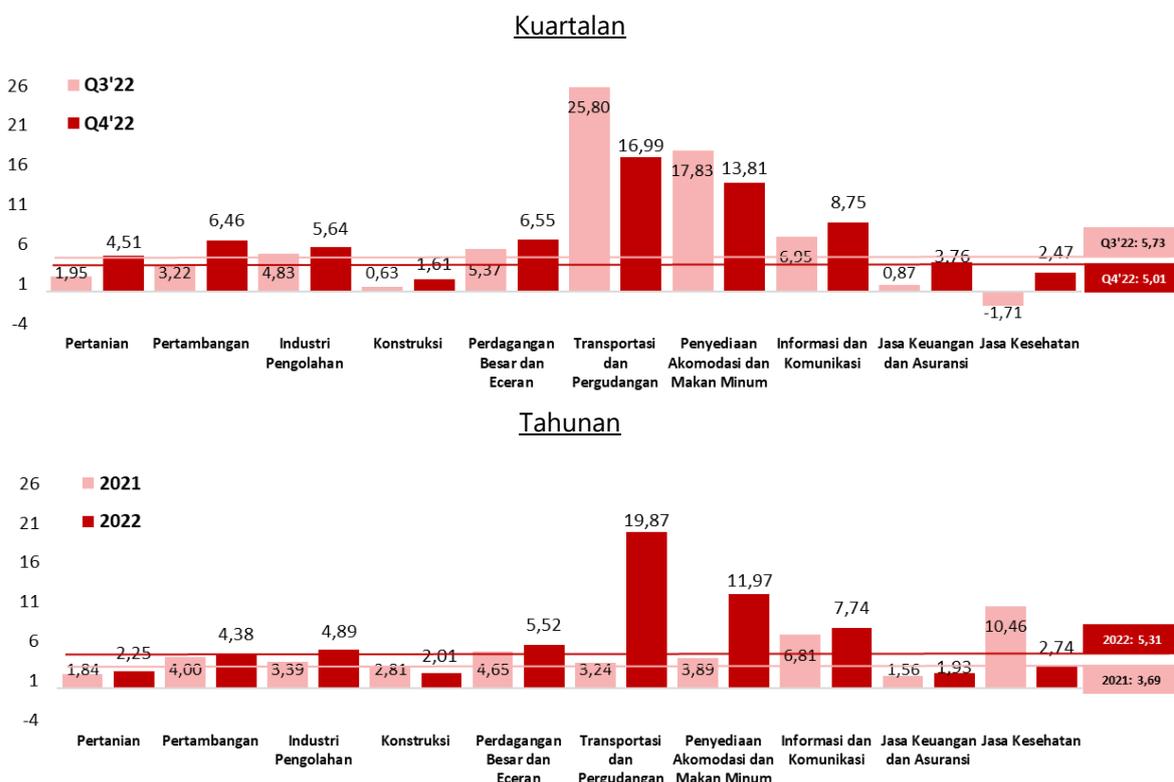
sebesar Rp396,7 triliun atau 87,07% dari target Rp455,62 triliun. Realisasi terbesar dan tertinggi disalurkan pada kluster pemulihan ekonomi yaitu sebesar Rp183,4 triliun atau 102,85% dari target Rp178,32 triliun. Realisasi terbesar pada kluster ini utamanya dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dan dukungan UMKM masing-masing sebesar Rp36,2 triliun dan Rp26,1 triliun. Seiring dengan melandainya kasus Covid-19 domestik, program PC-PEN tidak dilanjutkan pada tahun 2023.

Grafik 10 Realisasi Penyerapan Dana PEN 2022



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 11 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2022 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran yang tumbuh masing-masing sebesar 5,64% (yoy) dan 6,55% (yoy). Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 16,99% (yoy) dan 13,81% (yoy) sejalan dengan berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan IV-2022 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan Rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas threshold. Fungsi intermediasi perbankan membaik terlihat dari kredit yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya bahkan melebihi pertumbuhan DPK. Selanjutnya, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga tercatat meningkat tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga diiringi dengan penurunan risiko kredit.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK melanjutkan perbaikan, dengan kredit yang tumbuh tinggi melebihi pertumbuhan DPK. Hal tersebut mendorong kenaikan LDR dibandingkan tahun sebelumnya sehingga kembali masuk ke dalam *threshold* 78-92%. Di tengah kenaikan LDR, kondisi likuiditas terpantau relatif memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK

juga cukup tinggi yaitu masing-masing 137,90% dan 31,40%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi, risiko kredit yang melandai, serta peningkatan rentabilitas dan tingkat efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Dec '21	Sep '22	Des '22	Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
Total Aset (Rp Milyar)	9.670.515	9.992.629	10.581.455	↑ 1,45%	↑ 5,89%	↑ 10,13%	↑ 9,42%
Kredit (Rp Milyar)	5.512.366	5.964.174	6.100.964	↑ 1,17%	↑ 2,29%	↑ 5,30%	↑ 10,68%
DPK (Rp Milyar)	7.114.041	7.239.294	7.724.561	↑ 0,25%	↑ 6,70%	↑ 12,16%	↑ 8,58%
- Giro (Rp Milyar)	2.089.193	2.186.147	2.481.780	↑ 0,63%	↑ 13,52%	↑ 27,67%	↑ 18,79%
- Tabungan (Rp Milyar)	2.295.109	2.371.822	2.450.312	↓ -0,09%	↑ 3,31%	↑ 11,76%	↑ 6,76%
- Deposito (Rp Milyar)	2.729.739	2.681.325	2.792.469	↑ 0,24%	↑ 4,15%	↑ 2,91%	↑ 2,30%
CAR (%)	25,66	25,17	25,60	49	43	177	(6)
ROA (%)	1,85	2,53	2,45	15	(8)	26	60
NIM (%)	4,63	4,86	4,80	8	(6)	18	17
BOPO (%)	83,65	77,18	78,70	(128)	152	(293)	(495)
NPL Gross (%)	3,02	2,79	2,44	(8)	(35)	(4)	(58)
NPL Net (%)	0,88	0,78	0,71	(2)	(7)	(7)	(17)
LDR (%)	77,49	82,39	78,98	76	(341)	(505)	149
AL/DPK (%)	35,35	27,50	31,40	(267)	390	332	(395)
AL/NCD (%)	158,34	121,74	137,90	(1180)	1616	1029	(2044)

Sumber: SPI Desember 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh 9,42% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,13% (yoy). Penurunan pertumbuhan aset seiring dengan penurunan pertumbuhan DPK secara umum pada periode laporan.

Berdasarkan kelompok bank, penurunan aset BUK terjadi pada semua kelompok Bank kecuali kelompok Bank KCBLN, yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, kelompok bank BUMN dan BUSN sebagai kelompok Bank dengan porsi terbesar (masing-masing 44,69% dan 42,20%, yoy) justru tercatat melambat. Kelompok bank BUMN tumbuh 11,21% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,34% (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, kelompok BUSN juga tercatat hanya tumbuh 7,23% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,47% (yoy).

Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 52,03% atau lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,09% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Des '21	52,62	81,97
Mar '22	52,03	81,42
Jun '22	51,68	81,09
Sep '22	53,09	81,67
Des '22	52,03	81,09

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '21	Sep '22	Des '22		Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
	BUMN	4.251.749	4.323.082		4.728.435	44,69%	2,16%	9,38%
BUSN	4.163.950	4.310.705	4.465.116	42,20%	0,87%	3,58%	9,47%	7,23%
BPD	821.803	832.100	864.727	8,17%	-3,84%	3,92%	12,91%	5,22%
KCBLN	433.014	526.742	523.177	4,94%	10,00%	-0,68%	0,59%	20,82%
Total	9.670.515	9.992.629	10.581.455	100%	1,45%	5,89%	10,13%	9,42%

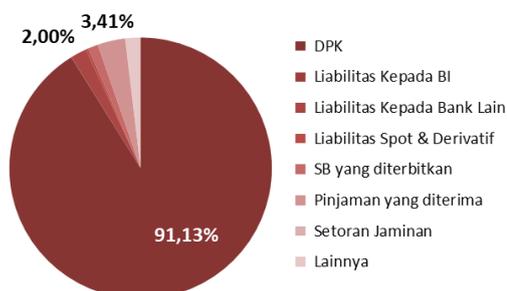
Sumber: SPI Desember 2022

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 91,13% dari total kewajiban Bank, diikuti pinjaman yang diterima (3,41%) dan kewajiban kepada bank lain (2,00%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 8,58% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,16% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima dan kewajiban kepada bank lain tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing 28,15% (yoy) dan 7,82% (yoy)

setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi masing-masing -15,66% (yoy) dan -9,06% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbankan mulai mencari sumber pendanaan lain seiring dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit.

Grafik 12 Komposisi Sumber Dana Perbankan

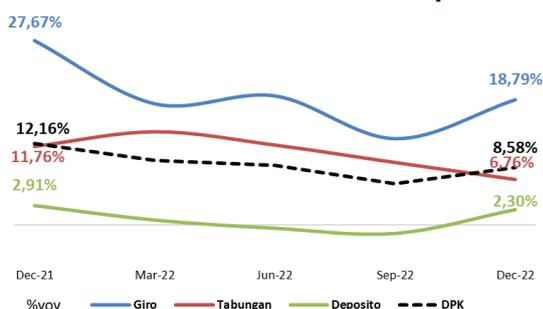


Sumber: SPI Desember 2022

Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen DPK, utamanya pada komponen giro yang tercatat tumbuh cukup tinggi 18,79% (yoy), namun tetap melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 27,67% (yoy). Selain itu, tabungan dan deposito juga tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing hanya tumbuh 6,76% (yoy) dan 2,30% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,76% (yoy) dan 2,91% (yoy).

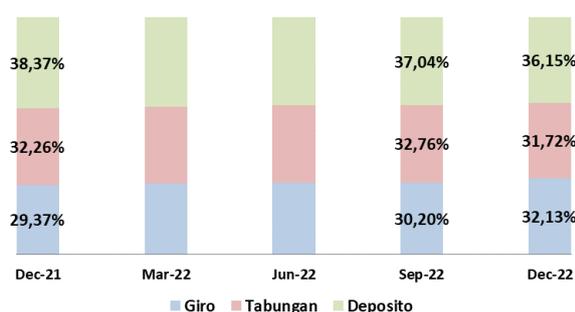
Perlambatan pertumbuhan DPK secara umum terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas dunia usaha dan konsumsi masyarakat yang mulai pulih.

Grafik 13 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI Desember 2022

Grafik 14 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Desember 2022

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,09%) tercatat tumbuh 7,06% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,67% (yoy).

Sementara itu, berbanding terbalik dengan perlambatan pada DPK Rupiah, DPK Valas tercatat tumbuh tinggi 20,26% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,17% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas juga tercatat tumbuh melambat sebesar 9,08% (yoy), dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 13,85% (yoy).

Berdasarkan jenisnya (*tiering*), perlambatan DPK disebabkan melambatnya 2 komponen DPK dengan porsi terbesar. Yaitu Giro >Rp2M dan Tabungan <Rp2M. Giro >Rp2M (porsi 28,76%) tumbuh 19,12% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 30,45% (yoy). Sementara itu, Tabungan <Rp2M (porsi 24,75%) tumbuh 5,34% (yoy) dari 8,93% (yoy) pada Desember 2021.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 46,36%, diikuti BUSN sebesar 41,77%. DPK BUMN tumbuh 12,63% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,66% (yoy), sementara itu BUSN hanya tumbuh 4,78% (yoy), melambat dari 13,11% (yoy) pada tahun sebelumnya, sehingga secara umum menarik ke bawah pertumbuhan DPK BUK.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 79,35%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (54,39%) diikuti Jawa Timur (8,79%) dan Jawa Barat (7,61%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Des '21	Sep '22	Des '22		Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
BUMN	3.179.487	3.208.804	3.581.139	46,36	1,50%	11,60%	10,66%	12,63%
BUSN	3.079.110	3.116.863	3.226.257	41,77	-0,38%	3,51%	13,11%	4,78%
BPD	648.918	653.453	664.150	8,60	-6,69%	1,64%	15,54%	2,35%
KCBLN	206.526	260.173	253.015	3,28	12,61%	-2,75%	11,33%	22,51%
Total	7.114.041	7.239.294	7.724.561	100	0,25%	6,70%	12,16%	8,58%

Sumber: SPI Desember 2022

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	Nominal Rp(M)			% Pangsa terhadap total DPK
	Des '21	Sep '22	Des'22	
DKI Jakarta	3.761.941	3.804.367	4.201.299	54,39%
Jawa Timur	657.040	673.285	679.369	8,79%
Jawa Barat	568.272	567.345	587.536	7,61%
Jawa Tengah	354.434	356.168	365.482	4,73%
Sumatera Utara	283.414	292.973	295.801	3,83%
Total DPK 5 Provinsi	5.625.102	5.694.138	6.129.486	79,35%
Total DPK	7.114.041	7.239.294	7.724.561	

Sumber: SPI Desember 2022, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (57,26%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (16,30%) dan penempatan pada Bank Indonesia (11,61%). Sejalan dengan mulai meningkatnya

penyaluran kredit dibandingkan tahun sebelumnya, penempatan bank pada surat berharga dan pada Bank Indonesia tercatat mulai melambat, menjadi tumbuh masing-masing 1,65% (yoy) dan 12,04% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 23,81% (yoy) dan 49,24% (yoy).

Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

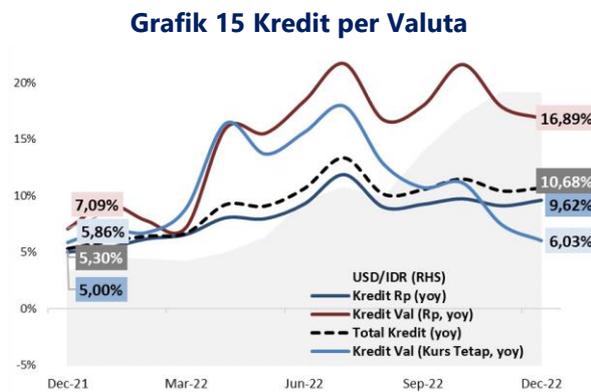
Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '21	Sep '22	Des '22		Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
Kredit Yang Diberikan	5.564.232	6.026.721	6.174.728	57,96	1,21	2,46	4,97	10,97
- Kepada Pihak Ketiga	5.512.366	5.964.174	6.100.964	57,26	1,17	2,29	5,30	10,68
- Kepada Bank Lain	51.866	62.547	73.764	0,69	5,27	17,93	-20,98	42,22
Penempatan pada Bank Lain	220.722	235.507	243.430	2,28	12,10	3,36	-9,08	10,29
Penempatan pada Bank Indonesia	1.104.268	939.269	1.237.196	11,61	-16,31	31,72	49,24	12,04
Surat Berharga	1.708.539	1.705.326	1.736.706	16,30	-0,08	1,84	23,81	1,65
Penyertaan	96.072	103.394	110.424	1,04	0,90	6,80	76,05	14,94
CKPN Aset Keuangan	344.775	358.317	456.266	4,28	-0,25	27,34	2,86	32,34
Tagihan Spot dan Derivatif	18.065	28.001	28.581	0,27	45,32	2,07	-81,77	58,22
Tagihan Lainnya	623.365	616.562	667.013	6,26	44	8	-52,00	7,00
TOTAL	9.680.037	10.013.097	10.654.345	100	1,11	6,40	2,42	10,07

Sumber: SPI Desember 2022

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk

rupiah dengan porsi 84,58%, sedangkan kredit valas sebesar 15,42%. Secara umum,

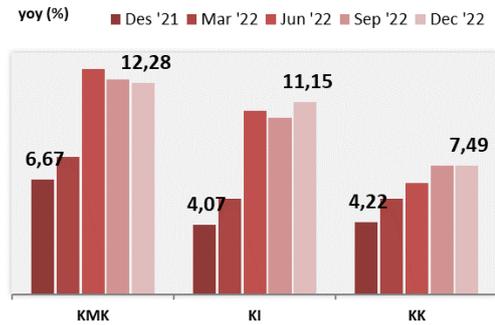
pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 9,62% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,00% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan kredit rupiah, kredit valas pada periode ini juga tercatat tumbuh 16,89% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,09% (yoy). Jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas tercatat tumbuh sebesar 6,03% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,86% (yoy).



Sumber: SPI Desember 2022

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (73,59%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,81% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,78%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 26,41%. Kredit produktif tercatat tumbuh 11,87% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,71% (yoy). Peningkatan kredit produktif utamanya didorong oleh KMK yang tumbuh 12,28% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,67% (yoy). Selain itu, kredit konsumsi juga tercatat tumbuh positif 7,49% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,22% (yoy).

Grafik 16 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Desember 2022

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Desember 2022, rentabilitas BUK tercatat membaik dengan meningkatnya ROA sebesar 60 bps dari tahun sebelumnya sebesar 1,85% menjadi 2,45%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 44,63% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 24,84% (yoy), sementara rerata total aset juga tercatat tumbuh namun melambat menjadi 5,04% (yoy) dari 10,94% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dari sisi margin, NIM tercatat meningkat 17 bps menjadi sebesar 4,80% dari 4,63% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NIM seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 12,85% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset produktif yang tercatat sebesar 8,91% (yoy).

Sementara itu, efisiensi BUK juga tercatat membaik tecermin dari rasio BOPO perbankan juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 83,65% menjadi 78,70%. Perbaikan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan operasional yang tumbuh 10,94% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,04% (yoy).

Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK

Rasio	BUMN			BUSN		
	Des '21	Sep '22	Dec '22	Des '21	Sep '22	Dec '22
CAR	21,39%	21,49%	21,16%	26,77%	25,75%	27,04%
ROA	2,16%	3,24%	3,05%	1,59%	2,01%	2,00%
BOPO	81,66%	68,73%	72,35%	80,92%	75,09%	75,52%
NIM	5,16%	5,52%	5,24%	4,15%	4,29%	4,39%

Rasio	BPD			KCBLN		
	Des '21	Sep '22	Dec '22	Des '21	Sep '22	Dec '22
CAR	22,77%	22,49%	23,59%	60,86%	58,71%	57,31%
ROA	2,03%	2,21%	2,12%	1,16%	1,48%	1,64%
BOPO	79,38%	75,19%	76,38%	96,73%	96,92%	96,65%
NIM	5,72%	5,80%	5,76%	2,17%	2,38%	2,71%

Sumber: SPI Desember 2022

1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, baik ATMR BUK maupun modal tercatat mengalami peningkatan. ATMR BUK tumbuh 8,74% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,98% (yoy). Pertumbuhan ATMR utamanya disebabkan oleh tumbuhnya ATMR kredit sebesar 9,76% (yoy) dari 4,28% (yoy) pada tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit seiring pemulihan ekonomi.

Sementara itu, modal tercatat tumbuh 8,49% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,68% (yoy), utamanya dalam bentuk modal disetor. Pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan modal menyebabkan CAR BUK turun sebesar 6 bps (yoy) menjadi 25,60% dari tahun sebelumnya 25,66%. Meskipun turun, nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBLN yaitu 57,31%. Tingginya CAR KCBLN tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBLN dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan IV-2022 juga cukup baik, yang tercermin dari indikator CAR BUS yang terjaga jauh di atas *threshold* dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kualitas pembiayaan juga membaik ditandai dengan penurunan NPF *gross* serta intermediasi

yang membaik, tecermin dari pembiayaan dan DPK yang masih tercatat tumbuh, dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK. Selain itu, rentabilitas dan efisiensi BUS juga tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 8 Indikator Umum Bank Syariah

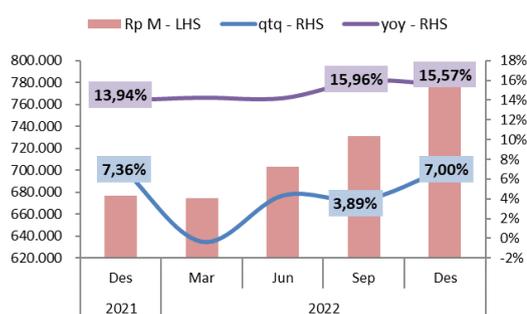
Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Des '21	Sep '22	Des'22	Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	676.735	730.931	782.100	↑ 3,89%	↑ 7,00%	↑ 13,94%	↑ 15,57%
Pembiayaan	409.878	477.505	491.489	↑ 6,29%	↑ 2,93%	↑ 6,75%	↑ 19,91%
Dana Pihak Ketiga	536.993	570.864	606.063	↑ 2,79%	↑ 6,17%	↑ 15,24%	↑ 12,86%
- Giro Wadiah	79.606	94.933	98.208	↑ 9,83%	↑ 3,45%	↑ 17,58%	↑ 23,37%
- Tabungan Mudharabah	183.744	204.711	218.043	↑ 4,67%	↑ 6,51%	↑ 15,28%	↑ 18,67%
- Deposito Mudharabah	273.643	271.220	289.812	↓ -0,78%	↑ 6,86%	↑ 14,55%	↑ 5,91%
BUS (%)							
CAR	25,71	23,52	26,28	25	276	407	57
ROA	1,55	2,07	2,00	3	(7)	15	45
NOM	1,66	2,66	2,59	6	(7)	20	93
BOPO	84,33	76,67	77,28	(186)	61	(122)	(705)
NPF gross	2,59	2,57	2,35	(6)	(22)	(54)	(24)
FDR	70,12	76,15	75,19	220	(96)	(624)	507

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022
 Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 15,57% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,94% (yoy). Komponen utama aset adalah pembiayaan (62,84%), surat berharga (22,88%) dan penempatan pada Bank Indonesia (10,81%). Dari ketiga komponen aset tersebut, pertumbuhan didorong oleh pembiayaan yang tumbuh 19,91% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,75% (yoy). Sementara itu, surat berharga tercatat tumbuh 8,02% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 38,32% (yoy) maupun penempatan pada Bank Indonesia yang hanya tumbuh 5,60% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 34,21% (yoy). Penurunan pada komponen selain pembiayaan tersebut mengindikasikan Bank mulai menyalurkan dananya kembali ke pembiayaan seiring dengan perbaikan ekonomi secara umum.

Grafik 17 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah



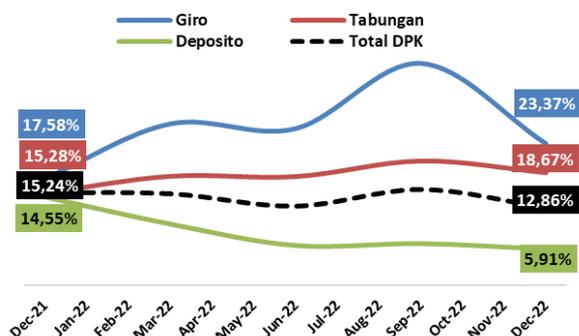
Sumber: SPS Desember 2022

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Desember 2022, DPK bank syariah tumbuh 12,86% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,24% (yoy). Perlambatan DPK utamanya disebabkan oleh deposito mudharabah sebagai komponen DPK terbesar (47,82%), yang pertumbuhannya melambat 5,91% (yoy) dari 14,55% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, tabungan mudharabah dan giro wadiah masih tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing 18,67% (yoy) dan 23,37% (yoy) dari tahun

sebelumnya sebesar 15,28% (yoy) dan 17,56% (yoy). Namun pertumbuhan keduanya belum dapat mendongkrak pertumbuhan DPK secara umum untuk tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Grafik 18 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Desember 2022

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 96,10%, sedangkan valuta asing sebesar 3,90%. DPK rupiah tumbuh 13,13% (yoy), melambat dari 18,33% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, DPK valuta asing tercatat tumbuh 6,58% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -28,21% (yoy).

Sementara itu, jika dilihat dari golongan nasabahnya, perlambatan pertumbuhan DPK bank syariah disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan DPK Pemerintah yang hanya tumbuh 5,19% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 30,93% (yoy).

Sedangkan secara spasial, hampir setengah DPK Bank Syariah (44,63%) berpusat di DKI Jakarta. Selain itu, DPK Bank Syariah terbesar kedua berada di provinsi Jawa Barat (9,85%).

DPK Bank Syariah di DKI Jakarta tercatat melambat, tumbuh 13,50% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 19,87% (yoy). Di sisi lain, DPK Bank Syariah di Jawa Barat justru tumbuh 7,71% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 3,72% (yoy).

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar dana yang dihimpun perbankan syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pada Desember 2022, pembiayaan bank Syariah tumbuh 19,91% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,75% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan utamanya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan produktif (porsi 48,05%) yang tumbuh 16,25% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 0,51% (yoy). Pembiayaan konsumsi juga masih tercatat tumbuh 23,51% (yoy), meningkat dibanding 13,70% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil merupakan komponen terbesar, dengan porsi masing-masing sebesar 50,76% dan 47,62% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Pembiayaan bagi hasil tercatat tumbuh tinggi 18,41% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 5,83% (yoy). Sementara itu, piutang tercatat tumbuh lebih tinggi, 21,53% (yoy) dari 8,89% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Tabel 9 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

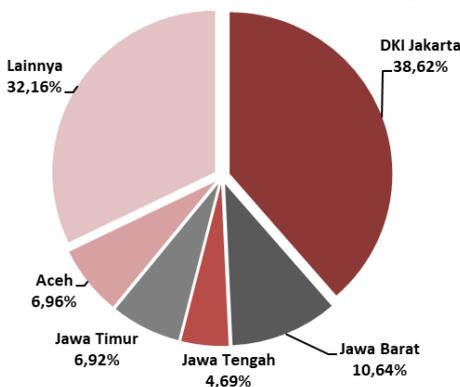
JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '21	Sep '22	Des '22		Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
Modal Kerja	112.969	127.915	124.866	25,41	0,69	-2,38	-1,69	10,53
Investasi	90.152	104.561	111.255	21,90	7,03	6,40	3,40	23,41
Konsumsi	206.757	245.028	255.368	51,31	9,14	4,22	13,70	23,51
Total	409.878	477.505	491.489	100	6,29	2,93	6,75	19,91

Sumber: SPS, Desember 2022

Sejalan dengan risiko kredit di BUK yang menurun, risiko kredit BUS juga tercatat mengalami penurunan, dengan rasio NPF *gross* sebesar 2,35%, atau turun 24 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,59%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan BUS terpusat di wilayah Jawa sebesar 65,29%, khususnya DKI Jakarta (38,62%), Jawa Barat (10,64%) dan Jawa Timur (6,92%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di pulau Jawa antara lain disebabkan sebaran jaringan kantor BUS/UUS dan jumlah penduduk yang lebih banyak di wilayah Jawa. Secara umum, pertumbuhan di ketiga provinsi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pembiayaan DKI Jakarta tumbuh 17,00% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,44% (yoy). Sementara itu Jawa Barat dan Jawa Timur juga tumbuh masing-masing 17,01% (yoy) dan 13,12% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing 8,08% (yoy) dan 2,12% (yoy).

Grafik 19 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

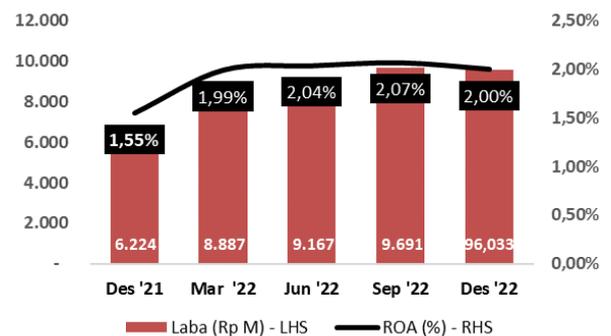


Sumber: SPS Desember 2022

2.4 Rentabilitas BUS

Tingkat rentabilitas BUS membaik dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat dari peningkatan ROA sebesar 45 bps (yoy) menjadi 2,00% dari 1,55% tahun sebelumnya. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata total aset pada periode laporan. Laba tercatat tumbuh 54,17% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 22,35% (yoy). Di sisi lain, rata-rata total aset tumbuh 19,27% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 10,70% (yoy).

Grafik 20 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Desember 2022

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat membaik, efisiensi BUS juga mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya tecermin dari rasio BOPO yang turun 705 bps menjadi 77,28% dari tahun sebelumnya sebesar 84,33%, yang disebabkan oleh biaya operasional yang tumbuh melambat pada bulan laporan sebesar 0,32% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,06% (yoy). Selain itu, pendapatan operasional juga tercatat tumbuh 9,47% (yoy) dari 9,62% (yoy) pada tahun sebelumnya.

2.5 Permodalan BUS

Pada Desember 2022, modal BUS tumbuh 40,68% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,12% (yoy), didorong oleh modal pinjaman.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat tumbuh tinggi 37,61% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -9,00% (yoy).

Seiring dengan pertumbuhan ATMR yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan modal, indikator CAR BUS naik 57 bps menjadi 26,28% pada Desember 2022 dari 25,71% pada tahun sebelumnya.

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum berjalan cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh serta ditopang tingkat permodalan yang cukup memadai. Namun demikian, rentabilitas dan kualitas kredit pada BPR yang sedikit menurun perlu menjadi perhatian ke depan.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Pada Desember 2022, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kredit tercatat tumbuh meningkat, diiringi dengan DPK yang juga masih tumbuh cukup tinggi meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid

didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat turun dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan penurunan laba dan efisiensi yang diiringi dengan peningkatan risiko kredit pada periode laporan.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

	Nominal		qtq			yoy	
	Des '21	Sep '22	Des '22	Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
Total Aset (Rp milyar)	168.443	175.659	182.302	↑ 2,05%	↑ 3,78%	↑ 8,62%	↑ 8,23%
Kredit (Rp milyar)	116.580	126.052	129.295	↑ 2,11%	↑ 2,57%	↑ 5,24%	↑ 10,91%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	117.006	122.909	126.944	↑ 1,91%	↑ 3,28%	↑ 10,23%	↑ 8,49%
- Tabungan (Rp milyar)	35.867	38.129	40.169	↑ 4,18%	↑ 5,35%	↑ 9,47%	↑ 11,99%
- Deposito (Rp milyar)	81.139	84.779	86.775	↑ 0,92%	↑ 2,35%	↑ 10,56%	↑ 6,95%
CAR (%)	32,15	31,46	30,76	(75)	(70)	226	(139)
ROA (%)	1,78	1,78	1,74	10	(4)	(9)	(4)
BOPO (%)	83,61	83,94	83,66	(116)	(28)	(63)	5
NPL Gross (%)	6,72	8,12	7,89	32	(23)	(50)	117
NPL Net (%)	4,37	5,37	5,23	23	(14)	(96)	86
LDR (%)	73,67	76,25	75,83	58	(42)	(177)	216
CR (%)	14,05	13,12	13,66	25	54	(462)	(39)

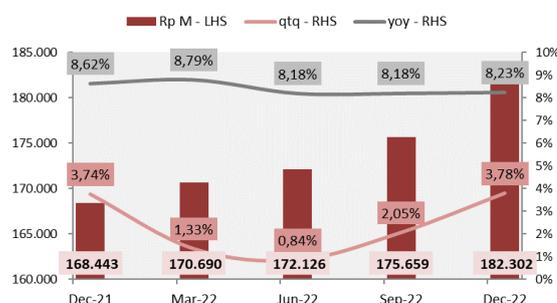
Sumber: SPI, Desember 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPR

Aset BPR pada Desember 2022 tumbuh 8,23% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,62% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK yang juga melambat pada periode laporan.

Grafik 21 Perkembangan Aset BPR



Sumber: SPI, Desember 2022

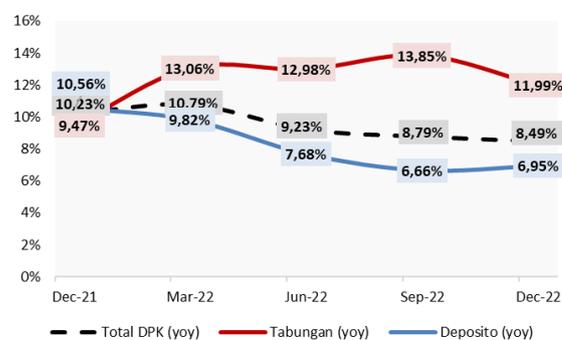
Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (59,57%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 25,15% dan 12,67%, yang tumbuh masing-masing 11,83% (yoy) dan 6,01% (yoy), dari tahun sebelumnya masing-masing 8,84% (yoy) dan 6,97% (yoy).

3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Desember 2022 tumbuh 8,49% (yoy) menjadi Rp126,94 triliun, melambat dibandingkan Desember 2021 yang tumbuh sebesar 10,23% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh komponen deposito (porsi: 68,36%) yang tumbuh 6,95% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,56% (yoy). Di sisi lain, tabungan (porsi: 31,64%) tercatat tumbuh 11,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,47% (yoy).

Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (58,80%), diikuti Sumatera (18,66%), Bali-Nusa Tenggara (11,12%), Sulampua (8,59%), dan Kalimantan (2,82%). Porsi DPK terbesar berada di Jawa Tengah (25,80%) dan Jawa Barat (12,25%). Pertumbuhan DPK di Jawa Tengah tumbuh meningkat 11,78% (yoy) dari 6,29% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan DPK di Jawa Barat juga tumbuh 13,42% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,58% (yoy).

Grafik 22 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI Desember 2022

Tabel 11 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '21	Sep '22	Des '22		Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
Sumatera	21.928	23.404	24.133	18,66%	2,74%	3,11%	2,71%	10,06%
Jawa	67.690	74.397	76.029	58,80%	2,01%	2,19%	6,00%	12,32%
Kalimantan	2.649	3.099	3.648	2,82%	4,27%	17,71%	30,85%	37,72%
Bali dan Nusa Tenggara	10.492	14.157	14.376	11,12%	1,02%	1,55%	-21,61%	37,02%
Sulawesi, Maluku dan Papua	13.822	10.994	11.109	8,59%	2,26%	1,04%	36,14%	-19,63%
Jumlah	116.580	126.052	129.295	100%	2,11%	2,57%	5,24%	10,91%

Sumber: SPI Desember 2022

3.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada Desember 2022 tumbuh 10,91% (yoy), meningkat dibandingkan 5,24% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (55,15%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (47,22%) dan Kredit

Investasi/KI (7,93%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (44,85%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh semua jenis penggunaan di mana KMK tumbuh 13,84% (yoy) dari 7,08% (yoy), sementara KI tercatat tumbuh 12,62% (yoy) dari 6,93% (yoy). Sejalan dengan peningkatan kredit produktif, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 7,70% (yoy)

setelah tahun sebelumnya tumbuh 3,21% (yoy).

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat, terlihat dari rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang meningkat sebesar masing-masing 117 bps dan 86 bps dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 7,89% dan 5,23%.

Grafik 23 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI, Desember 2022

3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Desember 2022 sedikit turun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari ROA yang menurun menjadi 1,74% atau turun 4 bps dibandingkan 1,78% pada tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan sebelum pajak tumbuh 5,46% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,57% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan rata-rata total aktiva meskipun sedikit melambat dari tahun sebelumnya namun tetap tumbuh sebesar 8,23% (yoy) lebih tinggi dari laba tahun berjalan sehingga

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan IV-2022 tumbuh cukup baik dengan aset, dan pembiayaan BPRS yang masih tercatat tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 18,15% (yoy), dan 20,57% (yoy). DPK

secara umum menarik rasio ROA turun pada periode laporan.

Sejalan dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari peningkatan rasio BOPO sebesar 5 bps menjadi 83,66% dari 83,61% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO disebabkan oleh beban operasional yang tumbuh lebih tinggi daripada pendapatan operasional. Pendapatan operasional tercatat masih tumbuh 4,96% (yoy) dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,92% (yoy). Sementara itu, beban operasional tercatat tumbuh 5,02% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -1,66% (yoy).

3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 30,76%, jauh di atas KPMM meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 32,15%, disebabkan oleh pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal. Secara umum, modal BPR tumbuh meningkat 6,25% (yoy) dari 3,63% (yoy) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, ATMR tumbuh lebih tinggi 11,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -3,65% (yoy), seiring dengan tumbuhnya penyaluran kredit.

BPRS juga masih tercatat tumbuh dua digit sebesar 16,00% (yoy). Risiko pembiayaan BPRS juga tercatat membaik ditandai dengan penurunan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Selain itu, ketahanan BPRS juga

masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup baik dan meningkat dibanding tahun sebelumnya,

disertai rentabilitas dan efisiensi yang juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 12 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Des '21	Sep '22	Des '22	Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22
Total Aset (Rp Miliar)	17.060	18.966	20.157	↑ 7,06%	↑ 6,28%	↑ 14,11%	↑ 18,15%
Pembiayaan (Rp Miliar)	11.984	13.950	14.448	↑ 6,50%	↑ 3,57%	↑ 12,19%	↑ 20,57%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	11.592	12.727	13.446	↑ 6,78%	↑ 5,65%	↑ 18,05%	↑ 16,00%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3.898	3.892	4.345	↑ 6,10%	↑ 11,63%	↑ 15,60%	↑ 11,47%
- Deposito iB (Rp Miliar)	7.694	8.835	9.102	↑ 7,09%	↑ 3,02%	↑ 19,34%	↑ 18,29%
CAR (%)	23,79	23,74	24,42	22	68	(481)	63
ROA (%)	1,73	1,82	1,92	15	10	(28)	19
BOPO (%)	87,63	86,51	86,02	(46)	(49)	1	(161)
NPF Gross (%)	6,95	6,87	5,91	(39)	(96)	(29)	(104)
FDR (%)	103,38	109,61	107,45	(29)	(216)	(540)	407

Sumber: SPS Desember 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

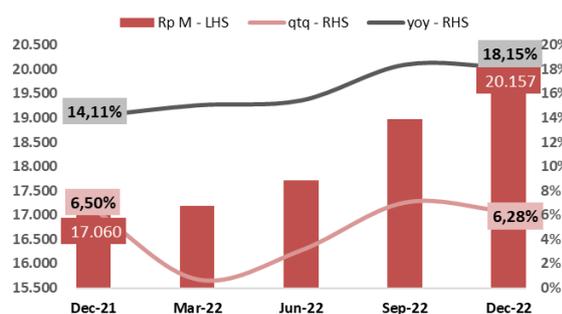
4.1 Aset BPRS

Pada Desember 2022, aset BPRS tercatat sebesar Rp20,16 triliun atau tumbuh 18,15% (yoy), meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,11% (yoy).

Secara spasial, aset BPRS sebagian besar berada di Jawa Barat (30,51%) dan Jawa Tengah (16,04%).

Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp100 Miliar (157 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana jumlah BPRS dengan total aset pada kelompok ini sebanyak 150 BPRS.

Grafik 24 Tren Aset BPRS



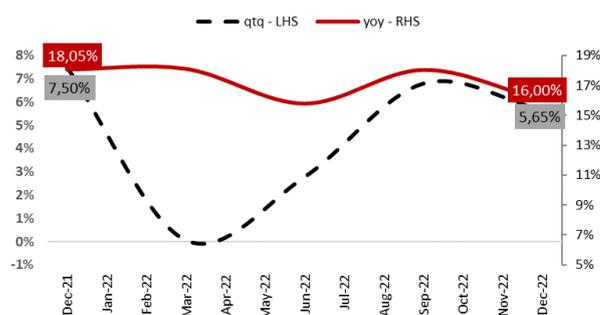
Sumber: SPS Desember 2022

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp13,45 triliun. Pada Desember 2022, DPK BPRS tumbuh 16,00% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,05% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad Mudharabah yakni 67,69% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (38,06% atau senilai Rp5,12 triliun). Deposito iB tenor 12 bulan ini tumbuh 20,96% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 24,36% (yoy).

Grafik 25 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Desember 2022

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Desember 2022, pembiayaan BPRS mencapai Rp14,45 triliun, tumbuh meningkat sebesar 20,57% (yoy) dari 12,19% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad *Murabahah* (63,56%) yang tumbuh 12,79% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,45% (yoy), yang secara umum mendorong peningkatan pertumbuhan pembiayaan BPRS.

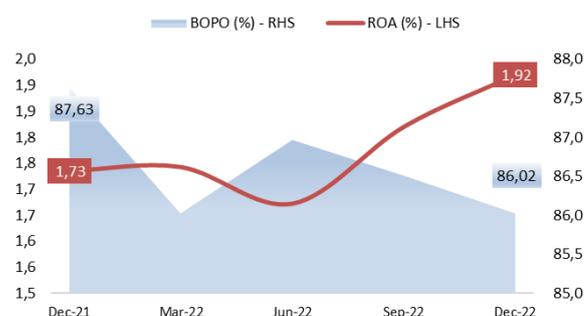
Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 65,75% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 44,38%) tumbuh 28,25% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,26% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan investasi tumbuh tinggi 9,13% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 13,89% (yoy). Namun demikian, pembiayaan konsumtif juga tumbuh melambat 16,88% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 21,47% (yoy).

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat meningkat tecermin dari rasio ROA

tercatat naik 19 bps menjadi 1,92% dari 1,73% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, efisiensi BPRS membaik tecermin dari BOPO yang turun 161 bps menjadi 86,02%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 87,63%.

Grafik 26 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Desember 2022

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR sebesar 24,42%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 23,79%. Peningkatan CAR didorong oleh pertumbuhan total modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ATMR. CAR BPRS tersebut cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2023

Dalam pelaksanaan *surveillance* perbankan, dibutuhkan informasi lebih mendalam, baik kuantitatif dan kualitatif, untuk melihat sinyal awal perubahan prospek/orientasi kegiatan bisnis bank. Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) dilaksanakan kepada Bank Umum pertama kali pada TW III-2019 setiap triwulan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah/tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. SBPO menghasilkan suatu Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP), yaitu indeks komposit yang menunjukkan persepsi dengan rentang nilai 1 s.d 100, di mana indeks >50 menunjukkan persepsi optimis, indeks =50 menunjukkan persepsi stabil, dan indeks <50 menunjukkan persepsi pesimis. IBP terdiri dari tiga subindeks yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR) dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK).

Selain IBP, SBPO juga menghasilkan proyeksi beberapa indikator baik makroekonomi maupun Perbankan. Berdasarkan perbandingan antara hasil survei dan realisasi secara historis terlihat bahwa SBPO cukup dapat memprediksi arah dari beberapa indikator baik makroekonomi maupun perbankan di Indonesia.

1. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)

Secara keseluruhan, hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan I-2023 menunjukkan persepsi yang masih optimis. Hal ini tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan I-2023 tercatat pada level 56, meningkat dari level 53 pada triwulan IV-2022. Optimisme tersebut timbul seiring dengan keyakinan akan meningkatnya kinerja perbankan, terindikasi dari Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) yang tercatat pada triwulan I-2023 sebesar 73. Ekspektasi meningkatnya kinerja perbankan juga didukung oleh risiko perbankan yang diperkirakan masih akan terjaga (*manageable*) tecermin pada Indeks Persepsi Risiko (IPR) di level 53 pada triwulan I-2023. Sementara itu, kondisi makroekonomi diperkirakan masih di level pesimis namun membaik dari triwulan sebelumnya, terindikasi dari Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I-2023 sebesar 43, lebih tinggi dari 22 pada triwulan sebelumnya. Perbaikan dipengaruhi oleh ekspektasi menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap USD di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan I-2023

Komponen Indeks	TW IV-22	TW I-23
Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)	22	43
PDB	43	49
BI7DRR	4	10
Inflasi	5	45
IDR/USD	35	68
Indeks Persepsi Risiko (IPR)	57	53
NPL/NPF	64	56
NIM	51	46
PDN	54	55
Cashflow	58	54
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)	81	73
Kredit/Pembiayaan	94	81
DPK	67	69
Keuntungan	77	66
Modal	87	73
IBP	53	56

Sumber: OJK

2. Komponen Pembentuk IBP

2.1 Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I-2023 meningkat menjadi 43 dari 22 pada triwulan IV-2022 namun masih di zona pesimis. Pesimisme tersebut dipengaruhi oleh perkiraan bahwa laju inflasi dan suku bunga acuan masih akan meningkat. Hal ini juga diperkirakan berakibat pada melambatnya pertumbuhan PDB. Pada triwulan I-2023, PDB diperkirakan tumbuh melambat atau lebih rendah dari realisasi

triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Hal ini didorong oleh masih tingginya ketidakpastian global dan potensi resesi global yang menurunkan permintaan dan investasi terhadap pasar domestik. Selain itu, konsumsi masyarakat diperkirakan menurun akibat peningkatan harga dan normalisasi pola konsumsi setelah triwulan IV tahun sebelumnya terdapat momen nataru.

Pesimisme responden terhadap kondisi makroekonomi pada triwulan I-2023 juga didorong oleh ekspektasi kenaikan inflasi yang dipengaruhi oleh efek meningkatnya harga pangan dan menjelang bulan Ramadhan. Selanjutnya, mayoritas responden memperkirakan bahwa BI7DRR akan meningkat sebesar 25 hingga 50 bps sebagai langkah pengendalian atas kenaikan tekanan inflasi dan kenaikan FFR yang agresif oleh The Fed. Selanjutnya, nilai tukar Rupiah terhadap USD diperkirakan menguat dari Rp15.731/USD (kurs tengah 30 Desember 2022) seiring dengan ekspektasi kenaikan FFR yang sudah tidak setinggi tahun lalu sehingga efek terhadap nilai tukar mata uang negara berkembang diharapkan mereda.

2.2 Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan I-2023 masih relatif stabil dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 53, meskipun menurun dari 57 pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan keyakinan akan pertumbuhan penyaluran kredit disertai usaha bank untuk menjaga kualitas kredit, yang didukung melalui kebijakan restrukturisasi dan hapus buku untuk menekan peningkatan NPL, responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan I-2023 relatif stabil dari 2,44% per Desember 2022. Selanjutnya, risiko pasar juga diperkirakan cukup terjaga antara lain karena perbankan menjaga PDN pada level rendah dan berada pada posisi *long*. Berdasarkan data aktual, rasio PDN per Desember 2022 sebesar 1,23% atau masih pada level rendah, jauh di bawah *threshold* 20%. Sedangkan untuk risiko pasar dari suku bunga diperkirakan meningkat yang menyebabkan NIM diperkirakan menurun seiring dengan kenaikan suku bunga acuan dan persaingan suku bunga yang semakin ketat. Risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga dan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya karena "alat likuid (kas dan setara kas)" perbankan yang masih cukup *ample*. Sejalan dengan hal tersebut, hingga Desember 2022 rasio AL/NCD masih di atas *threshold* 50% yaitu sebesar 137,67%.

2.3 Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan I-2023 optimis dengan IEK sebesar 73 meskipun menurun dari 81 pada triwulan IV-2022. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan. Optimisme kenaikan pertumbuhan kredit didorong ekspektasi akan membaiknya perekonomian. Pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan terus meningkat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Responden memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit hapus buku diperkirakan relatif stabil, sedangkan untuk kredit restrukturisasi dan *undisbursed loan* diperkirakan menurun seiring dengan membaiknya kinerja debitur dan perkiraan peningkatan penyaluran kredit. Dari sisi pertumbuhan kredit, kredit/pembiayaan diperkirakan masih akan tumbuh pada triwulan I-2023, meskipun melambat dari pertumbuhan kredit pada triwulan IV-2022 (Desember 2022) sebesar 2,37% (qtq).

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan I-2023 DPK masih akan tumbuh sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, usaha bank memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit, serta adanya peningkatan suku bunga simpanan. Lebih lanjut, suku bunga DPK diperkirakan cenderung meningkat dibandingkan triwulan IV-2022 seiring dengan perkiraan peningkatan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI).

3. Anecdotal Information

Berdasarkan hasil survei pada triwulan I-2023, diperoleh informasi terkait beberapa isu sebagai berikut:

a. Outlook Ekonomi Global dan Indonesia 2023

Ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan, seiring dengan kenaikan biaya dana akibat meningkatnya suku bunga acuan untuk menekan laju inflasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kawasan

yang menunjukkan resiliensi seperti negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang diperkirakan masih akan tumbuh cukup baik.

Selanjutnya, menurut responden adanya kemungkinan resesi global dapat berdampak pada munculnya beberapa tantangan yang diperkirakan dihadapi perbankan pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Penurunan nilai aset seiring kenaikan tingkat suku bunga acuan dapat menekan valuasi aset likuid perbankan;
- 2) Prospek penurunan permintaan kredit akibat penurunan keyakinan kondisi ekonomi yang berdampak pada penurunan profitabilitas; dan
- 3) Pelemahan kondisi usaha yang berpotensi memperburuk kualitas kredit dan meningkatkan risiko kredit.

Dalam menghadapi kemungkinan tantangan tersebut, beberapa strategi yang telah disiapkan antara lain melakukan *monitoring* terhadap risiko suku bunga, perkembangan dana, kualitas kredit, cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas untuk memastikan cadangan likuiditas.

b. Potensi dana dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang belum masuk ke Bank

Berdasarkan hasil survei, terdapat responden yang menyampaikan bahwa masih terdapat potensi DHE yang belum masuk ke perbankan berdasarkan transaksi eksportir yang dilakukan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kesepakatan *trustee* dengan para *shareholder*, nasabah masih memiliki kewajiban pembayaran atas transaksi impor atau hutang kepada pihak di luar negeri, serta repatriasi atas keuntungan perusahaan yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan di luar negeri. Atas hal tersebut, beberapa masukan kebijakan antara lain: 1) Mewajibkan dana DHE untuk disimpan di dalam negeri untuk periode tertentu; 2) Kewajiban penggunaan *Letter of Credit* (L/C) untuk semua transaksi ekspor nasabah DHE SDA; 3) Pemberian insentif terkait layanan ekspor kepada eksportir; 4) Pemberian insentif atas dana DHE di bank pemerintah di Indonesia dan 5) Insentif pajak.

c. Komoditas Batu Bara

Berdasarkan hasil survei, kredit pertambangan batubara diperkirakan masih akan tumbuh. Proyeksi peningkatan pertumbuhan kredit pertambangan batubara pada 2023 tidak setinggi realisasi pertumbuhan pada 2022, hal ini sejalan dengan perkiraan harga komoditas batubara yang peningkatannya tidak setinggi peningkatan harga tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk rasio NPL kredit pertambangan batubara diperkirakan masih akan di bawah *threshold* 5% pada tahun 2023.

d. Komoditas Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil survei, diperoleh bahwa harga kelapa sawit tahun 2023 diperkirakan menurun dari 957,81 USD/Ton pada Desember 2022. Meskipun mengalami penurunan harga, namun demikian kredit perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit diperkirakan masih akan tumbuh pada tahun 2023.

e. Kredit Spasial

Berdasarkan lokasi proyek, kredit didominasi oleh kredit dengan lokasi proyek di Pulau Jawa sebesar Rp4.344,83 triliun atau 67,64% dari total kredit perbankan. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei diperoleh bahwa secara triwulanan pertumbuhan kredit pada triwulan I-2023 diproyeksi melambat pada hampir seluruh wilayah, sedangkan secara tahunan seluruh wilayah diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan kredit meskipun terdapat beberapa wilayah yang tumbuh melambat. Adapun wilayah dengan proyeksi pertumbuhan kredit tertinggi selama triwulan I-2023 adalah Kalimantan. Sedangkan untuk risiko kredit diproyeksi menurun dan terjaga di bawah *threshold* 5%.

f. Kredit Stimulus Covid-19

Sehubungan dengan stimulus restrukturisasi kredit yang akan diberikan secara *targeted* setelah triwulan I-2023, berdasarkan hasil survei eksposur kredit restrukturisasi akan menurun signifikan pada Maret 2023 dan Juni 2023, baik pada kredit restru Kol 1, Kol 2 dan restru NPL, dengan proyeksi kredit hapus buku yang meningkat pada Juni 2023. Sejalan dengan itu, CKPN diproyeksi meningkat pada kredit restrukturisasi Kol 1, sementara pada kredit restrukturisasi Kol 2 dan kredit restrukturisasi NPL diproyeksi menurun.

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURVEI ORIENTASI BISNIS PERBANKAN OJK SBPO TW I - 2023



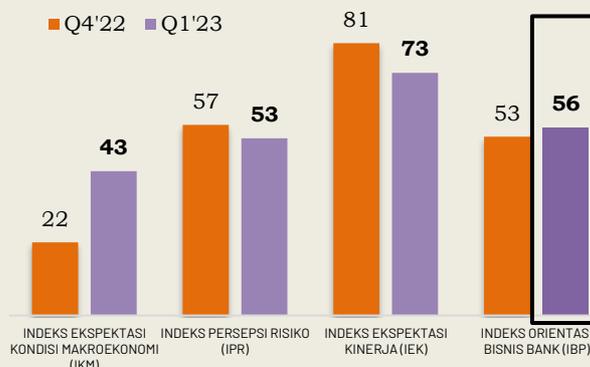
Indeks Orientasi Bisnis Bank (IBP)

56

Zona Optimis

Optimisme kondisi perbankan meningkat didorong oleh kinerja perbankan yang diperkirakan meningkat dari triwulan sebelumnya.

Tren Orientasi Bisnis Perbankan



Responden



96 Bank Umum

92,33%

Total Aset Perbankan

Keterangan Indeks:

< 50 = Pesimis
= 50 = Stabil
> 50 = Optimis

IBP

Komponen Indeks	TW IV-22	TW I-23
Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)	22	43
PDB	43	49
BI7DRR	4	10
Inflasi	5	45
IDR/USD	35	68
Indeks Persepsi Risiko (IPR)	57	53
NPL/NPF	64	56
NIM	51	46
PDN	54	55
Cashflow	58	54
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)	81	73
Kredit/Pembiayaan	94	81
DPK	67	69
Keuntungan	77	66
Modal	87	73
IBP	53	56

Ekspektasi Kondisi Makroekonomi

IKM berada pada zona pesimis, dipengaruhi oleh peningkatan laju inflasi dan suku bunga acuan, Hal ini juga diperkirakan berakibat pada melambatnya pertumbuhan PDB. Sedangkan untuk nilai tukar USD/IDR diperkirakan menguat.

Persepsi Risiko

IPR berada pada zona optimis, didorong ekspektasi risiko kredit (NPL) yang relatif stabil dan terjaganya risiko pasar (NIM, PDN dan Cashflow).

Ekspektasi Kinerja

IEK berada pada zona optimis didorong ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan.

Outlook Ekonomi Global dan Indonesia 2023

Ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan, seiring dengan kenaikan biaya dana akibat meningkatnya suku bunga acuan untuk menekan laju inflasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kawasan yang menunjukkan resiliensi seperti negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang diperkirakan masih akan tumbuh cukup baik.



SURVEI ORIENTASI BISNIS PERBANKAN OJK SBPO TW I - 2023



Potensi Dana dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang Masih Belum Masuk ke Bank

Berdasarkan hasil survei, terdapat responden yang menyampaikan bahwa masih terdapat potensi DHE yang belum masuk ke perbankan berdasarkan transaksi eksportir yang dilakukan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kesepakatan *trustee* dengan para *shareholder*, nasabah masih memiliki kewajiban pembayaran atas transaksi impor atau hutang kepada pihak di luar negeri, serta repatriasi atas keuntungan perusahaan yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan di luar negeri.

Komoditas Batu Bara

Kredit pertambangan batubara pada tahun 2023 diperkirakan masih akan tumbuh, meskipun tidak setinggi realisasi pertumbuhan pada 2022. Hal ini sejalan dengan perkiraan harga komoditas batubara yang peningkatannya tidak setinggi peningkatan harga tahun sebelumnya.



Komoditas Kelapa Sawit

Kelapa sawit diperkirakan mengalami penurunan harga di tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan harga, namun demikian kredit perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit diperkirakan masih akan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.



Kredit Spasial

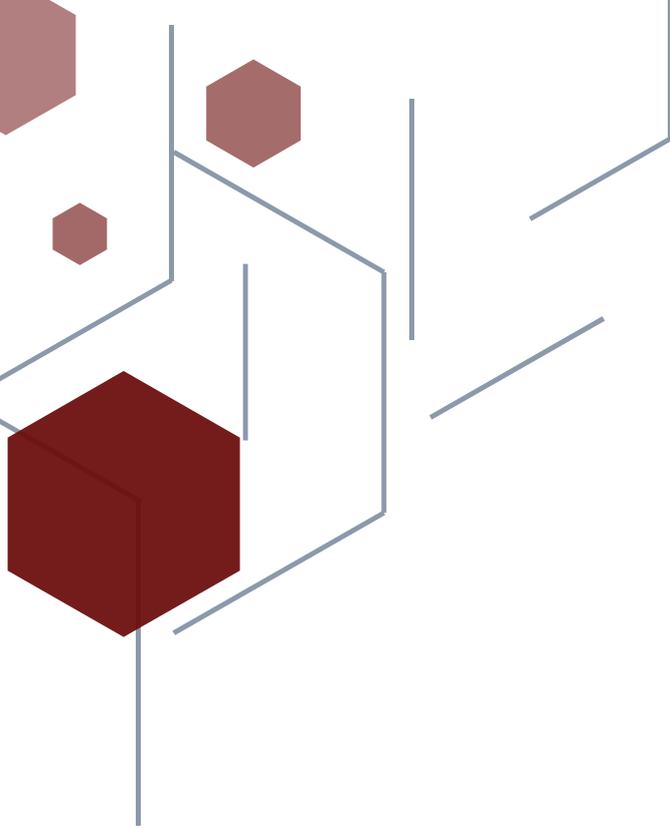
Kredit dengan lokasi proyek di Pulau Jawa masih mendominasi penyaluran kredit pada Desember 2022. Secara tahunan, pada triwulan I-2023 sebagian besar wilayah diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan kredit meskipun terdapat beberapa wilayah yang tumbuh melambat dengan risiko kredit yang diproyeksi menurun dan terjaga di bawah *threshold* 5%.



Kredit Stimulus Covid-19

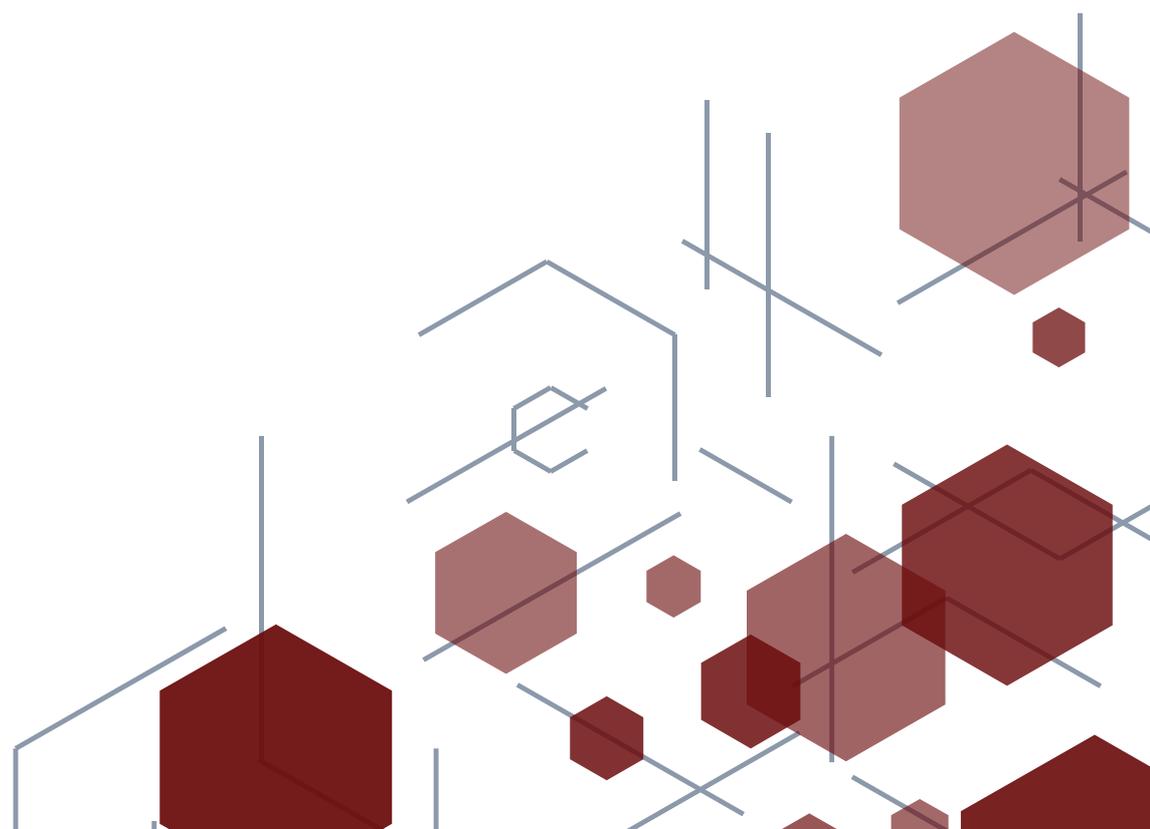
Sehubungan dengan stimulus restrukturisasi kredit yang akan diberikan secara *targeted* setelah triwulan I-2023, berdasarkan hasil survei, eksposur kredit restrukturisasi akan menurun di Maret 2023 dan Juni 2023, baik pada kredit restrukturisasi Kol 1, restrukturisasi Kol 2 maupun restrukturisasi NPL, dengan proyeksi hapus buku yang meningkat pada Juni 2023. Sejalan dengan itu, CKPN diproyeksi meningkat pada kredit restrukturisasi Kol 1, sementara pada restrukturisasi Kol 2 dan restrukturisasi NPL diproyeksi menurun.





Bab II

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan IV-2022, penyaluran kredit/pembiayaan perbankan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan naiknya permintaan kredit mengikuti perbaikan mobilitas masyarakat. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan sebagian besar didorong oleh sektor rumah tangga, industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian.

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan bank umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan IV-2022 tumbuh tinggi 11,35% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,24% (yoy). Secara triwulanan, kredit juga tumbuh 2,37% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tumbuh 1,59% (qtq). Pertumbuhan kredit yang masih tetap terjaga positif ini antara lain didorong oleh permintaan kredit yang kian membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga yang disertai menurunnya persepsi risiko kredit.

Tabel 13 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Des '21	Sep '22	Des '22	Sep '22	Des '22	Des '21	Des '22	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	415,52	447,33	458,32	1,57%	2,46%	7,76%	10,30%	7,14%
2	Perikanan	18,69	19,54	19,73	1,11%	0,97%	16,56%	5,56%	0,31%
3	Pertambangan dan Penggalian	153,80	220,12	237,39	4,35%	7,84%	23,42%	54,35%	3,70%
4	Industri Pengolahan	951,11	1.047,50	1.067,01	0,47%	1,86%	6,43%	12,19%	16,61%
5	Listrik, gas dan air	159,70	160,56	162,33	-5,88%	1,10%	-5,44%	1,64%	2,53%
6	Konstruksi	380,38	386,86	396,58	1,47%	2,51%	1,04%	4,26%	6,17%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	974,42	1.047,69	1.043,91	0,47%	-0,36%	3,42%	7,13%	16,25%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	120,74	122,60	123,62	1,10%	0,83%	3,92%	2,38%	1,92%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	306,24	319,00	313,05	-2,30%	-1,86%	15,05%	2,22%	4,87%
10	Perantara Keuangan	224,71	271,87	305,79	0,84%	12,47%	3,89%	36,08%	4,76%
11	Real Estate	265,32	304,67	314,58	6,61%	3,25%	2,05%	18,57%	4,90%
12	Administrasi Pemerintahan	34,27	37,06	43,83	8,53%	18,27%	10,96%	27,88%	0,68%
13	Jasa Pendidikan	13,99	14,73	14,89	3,92%	1,13%	2,92%	6,45%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,51	29,79	31,52	0,01%	5,80%	0,89%	10,55%	0,49%
15	Jasa Kemasyarakatan	95,69	112,18	114,67	5,24%	2,22%	6,97%	19,83%	1,79%
16	Jasa Perorangan	3,87	4,04	3,98	2,36%	-1,34%	29,53%	2,93%	0,06%
17	Badan Internasional	0,37	0,01	0,02	-96,49%	75,96%	1,94%	-94,05%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,72	-	-	-	-	-71,25%	-100,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.384,70	1.486,17	1.524,48	3,20%	2,58%	4,89%	10,09%	23,73%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	235,83	243,18	247,85	2,77%	1,92%	3,78%	5,10%	3,86%
Industri		5.769	6.275	6.424	1,59%	2,37%	5,24%	11,35%	100%

Sumber: SPI Desember 2022

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,73%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 10,09% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,89% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 7,82% (yoy) khususnya untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 9,71% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh tinggi sebesar 17,01%, membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -6,31% (yoy). Peningkatan kredit pemilikan rumah tinggal serta kendaraan bermotor tersebut antara lain didorong oleh adanya dukungan otoritas moneter dan pemerintah melalui berbagai regulasi, antara lain: a) perpanjangan relaksasi *Loan to Value* (LTV) yang memungkinkan konsumen mendapatkan KPR dengan uang muka 0% sampai dengan 31 Desember 2023; dan b) perpanjangan insentif uang muka 0% untuk kredit kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2023.

Untuk kredit produktif, salah satu sektor ekonomi dengan penyaluran kredit terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 16,61%). Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini merupakan pendorong terbesar pertumbuhan kredit pada tahun 2022 dari sisi lapangan usaha, dengan pertumbuhan sebesar Rp115,90 triliun atau 12,19% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,43% (yoy). Peningkatan didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh tinggi 20,41% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,31% (yoy). Pertumbuhan

subsektor ini didorong oleh industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 19,31% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 17,00% (yoy). Selain itu, subsektor industri logam dasar utamanya industri logam dasar besi dan baja juga tumbuh tinggi sebesar 26,32% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,11% (yoy). Peningkatan kredit pada subsektor besi dan baja antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan ekspor besi baja sehingga mendorong kebutuhan investasi untuk meningkatkan produksi. Peningkatan produksi juga seiring dengan program hilirisasi nikel dalam negeri oleh Pemerintah.

Selain kredit ke sektor industri pengolahan, pendorong kedua terbesar pertumbuhan kredit korporasi adalah kredit ke sektor pertambangan dan penggalian. Kredit ke sektor ini tercatat tumbuh tinggi sebesar Rp83,59 T atau 54,35% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 23,42% (yoy). Pertumbuhan kredit utamanya didorong oleh naiknya kredit pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara yang tumbuh masing-masing 161,20% (yoy) dan 35,06% (yoy) sejalan dengan naiknya harga komoditas minyak bumi dan batubara global.

Penyaluran kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi: 16,25%) tumbuh 7,13% (yoy), membaik setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 3,42% (yoy). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) yang tumbuh tinggi sebesar 23,49% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang

tumbuh 3,54% (yoy), didorong oleh tumbuhnya kredit perdagangan besar barang antara (*intermediate products*), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*). Subsektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi terbesar, yaitu perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor (7,46%) juga tercatat tumbuh 7,16% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,75% (yoy). Kenaikan pertumbuhan kredit pada sektor perdagangan dalam negeri antara lain dipengaruhi oleh membaiknya daya beli masyarakat seiring indeks keyakinan konsumen yang berada pada level optimis. Hal ini juga sejalan dengan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan IV-2022 yang menunjukkan adanya peningkatan persepsi kinerja perbankan dibandingkan triwulan sebelumnya dan tahun sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan kredit pada sektor ini juga dapat dipengaruhi implikasi dari kebijakan Pemerintah dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui himbauan kepada industri perbankan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha terutama pada sektor-sektor prioritas dan UMKM. Selain itu, peningkatan kredit di sektor ini juga dapat dipengaruhi oleh pola musiman Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kredit ke sektor perantara keuangan juga tumbuh cukup tinggi sebesar Rp81,07 triliun atau 36,08% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,89% (yoy) meskipun hanya memiliki porsi yang kecil (4,76%). Peningkatan terutama didorong oleh kredit ke subsektor perantara keuangan non-bank dalam bentuk *leasing* yang tumbuh 32,32%

(yoy), meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 2,69% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,14% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 10,30% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,76% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 10,22% (yoy), utamanya pada subsektor pembibitan dan budidaya unggas yang tumbuh 70,34% (yoy) serta perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 3,37% (yoy).

Kredit sektor konstruksi (porsi: 6,17%) tercatat tumbuh 4,26% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 1,04% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kredit ke subsektor konstruksi bangunan sipil, terutama bangunan jalan tol yang tumbuh 9,91% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,37% (yoy). Peningkatan kredit pada subsektor tersebut sejalan dengan akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan konektivitas di Indonesia.

Kredit sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan (porsi: 4,90%) tumbuh 18,57% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,05% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan pada subsektor *real estate* serta subsektor jasa komputer dan kegiatan yang terkait yang masing-masing tumbuh 20,43% (yoy) dan 69,86% (yoy).

Sementara itu, kredit ke sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi: 4,87%)

tercatat tumbuh 2,22% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya tumbuh 15,05% (yoy). Perlambatan kredit dipengaruhi oleh turunnya kredit subsektor angkutan udara yang berkontraksi -22,44% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 16,32% (yoy). Hal ini dapat dipengaruhi antara lain oleh naiknya nominal NPL subsektor angkutan udara sehingga membuat bank memitigasi risiko dengan mengurangi penyaluran kredit ke subsektor ini. Meskipun demikian, kredit

pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi masih tercatat tumbuh didorong oleh subsektor jaringan telekomunikasi yang masih tumbuh tinggi 49,39% (yoy) seiring dengan akselerasi pembangunan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital di Indonesia. Selain itu, transportasi angkutan air dan darat juga masih tumbuh cukup baik antara lain dipengaruhi oleh perbaikan mobilitas masyarakat sejalan membaiknya kasus Covid-19 domestik.

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)

Pada triwulan IV-2022, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan (selanjutnya disebut kredit) perbankan berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 67,64% dan 14,35%. Penyaluran kredit pada wilayah Jawa tercatat naik cukup signifikan yakni tumbuh 11,81% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,43% (yoy). Demikian halnya dengan penyaluran kredit pada wilayah Sumatera yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan IV-2021 sebesar 5,56% (yoy) menjadi 10,71% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Jawa didominasi oleh provinsi DKI Jakarta dengan porsi 45,17% dan tumbuh 13,74% (yoy) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,56% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit di DKI Jakarta utamanya ditopang oleh sektor perantara keuangan yang naik Rp78,51 T atau tumbuh signifikan dari 3,66% (yoy) menjadi 39,18% (yoy) pada triwulan IV-2022. Adapun pertumbuhan kredit perantara keuangan utamanya terdapat pada subsektor perantara keuangan non bank-*leasing*. Hal tersebut sejalan

dengan hasil Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Desember 2022 yang dilakukan oleh Bank Indonesia bahwa mayoritas rumah tangga memilih koperasi dan *leasing* sebagai preferensi alternatif sumber pembiayaan.

Sementara itu, penyaluran kredit di wilayah Sumatera didominasi oleh provinsi Sumatera Utara dengan porsi 27,51% dan tumbuh 6,61% (yoy) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,29% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit di Sumatera Utara utamanya ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang naik Rp4,57 triliun atau tumbuh positif menjadi 11,64% (yoy) dari yang sebelumnya berkontraksi -9,41% (yoy). Adapun pertumbuhan kredit perdagangan besar dan eceran utamanya terdapat pada subsektor perdagangan dalam negeri barang antara (*intermediate product*).

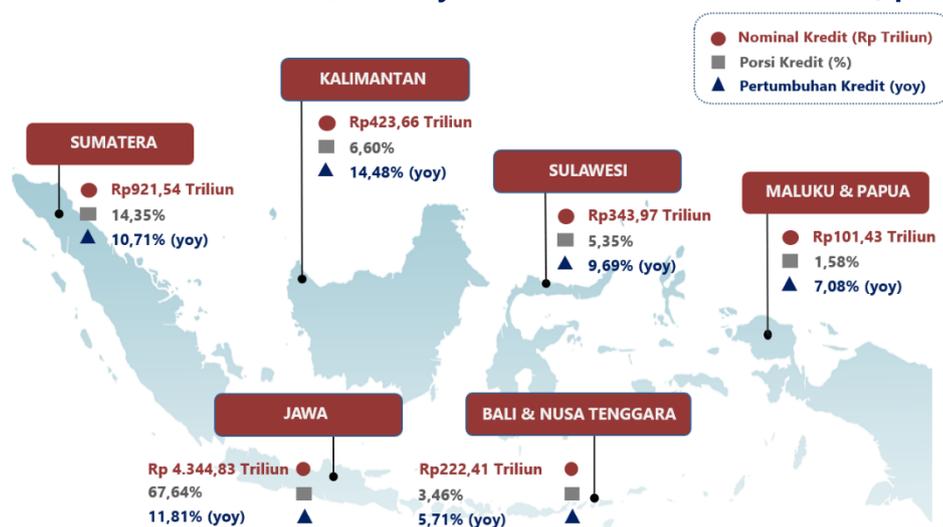
Dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran kredit pada wilayah Kalimantan tumbuh tertinggi yaitu dari 8,85% (yoy) menjadi 14,48% (yoy) meskipun porsinya hanya sebesar 6,60%. Penyaluran kredit di wilayah

ini sebagian besar disalurkan pada provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan porsi 42,16% dan tumbuh 18,47% (yoy) atau tumbuh meningkat dari 14,29% (yoy). Pertumbuhan kredit di Kaltim utamanya ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang naik Rp13,9 triliun atau tumbuh signifikan dari 26,39% (yoy) menjadi 73,43% (yoy). Adapun pertumbuhan kredit sektor pertambangan dan penggalian utamanya terdapat pada subsektor pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara. Sebagaimana diketahui, sektor pertambangan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kaltim dan menyumbang 83,70% dari seluruh ekspor Kaltim.

Tidak hanya itu, penyaluran kredit di wilayah Sulawesi juga tumbuh meningkat dari 9,52% (yoy) menjadi 9,69% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut utamanya ditopang oleh sektor pertambangan yang mencapai 87,00% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -9,02% (yoy). Penyaluran kredit sektor pertambangan di wilayah tersebut didominasi oleh provinsi Sulawesi Tengah (porsi: 32,31%) dengan kenaikan sebesar Rp4,88 triliun atau tumbuh signifikan dari

1,44% (yoy) menjadi 604,62% (yoy). Adapun pertumbuhan kredit sektor pertambangan Sulawesi Tengah utamanya ditopang oleh penyaluran kredit pada subsektor pertambangan bijih nikel yang meningkat hingga Rp3,8 triliun. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki tambang nikel terbesar di Indonesia seluas 115.397,37 hektar. Dalam kaitan tersebut, kenaikan penyaluran kredit pertambangan bijih nikel ditengarai sebagai salah satu bentuk dukungan perbankan untuk mendorong volume produksi nikel seiring dengan permintaan domestik maupun global yang semakin meningkat. Sebagai Informasi, pada Desember 2022, PT. Hillcon Tbk (kontraktor penambang nikel terbesar di Indonesia) telah menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) dengan dua perusahaan tambang nikel, yaitu PT Sarana Mineralindo Perkasa (SMP) dan PT Adhi Kartiko Pratama (AKP). SMP berlokasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, sementara AKP berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dua perusahaan ini diharapkan dapat menambah volume produksi nikel sebesar 6 juta *wet metric ton* (wmt) atau senilai USD60 juta per tahun.

Grafik 27 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial)



Sumber: LBUT, diolah

Tabel 14 Porsi Penyaluran Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)

No.	Sektor Ekonomi	Porsi					
		Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
Lapangan Usaha							
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3,18%	17,45%	26,78%	7,29%	5,41%	7,18%
2	Perikanan	0,23%	0,37%	0,33%	0,90%	0,47%	0,78%
3	Pertambangan dan Penggalian	1,94%	4,04%	14,09%	5,12%	9,98%	6,04%
4	Industri Pengolahan	18,96%	16,23%	6,26%	6,61%	3,11%	9,78%
5	Listrik, Gas, dan Air	2,78%	2,00%	1,72%	3,65%	0,98%	0,07%
6	Konstruksi	7,39%	3,78%	3,98%	3,79%	2,58%	2,84%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15,91%	16,10%	12,91%	19,96%	22,33%	17,70%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	1,71%	1,35%	1,05%	1,85%	10,73%	2,12%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	6,23%	2,20%	2,45%	1,42%	1,33%	2,97%
10	Perantara Keuangan	6,86%	0,16%	0,33%	0,39%	0,27%	0,09%
11	Real Estate	6,19%	2,08%	2,34%	2,44%	1,46%	1,24%
12	Administrasi Pemerintahan	0,95%	0,02%	0,11%	0,09%	0,12%	0,84%
13	Jasa Pendidikan	0,26%	0,21%	0,09%	0,19%	0,22%	0,03%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54%	0,50%	0,14%	0,29%	0,67%	0,25%
15	Jasa Kemasyarakatan	1,94%	1,21%	1,52%	1,88%	2,13%	1,63%
16	Jasa Perorangan	0,05%	0,07%	0,03%	0,09%	0,12%	0,41%
17	Badan Internasional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
19	Rumah Tangga	21,40%	28,21%	25,00%	35,23%	29,79%	39,74%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,50%	4,01%	0,87%	8,81%	8,28%	6,30%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ket: *Shading* hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut

Sumber: LBUT, diolah

3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan IV-2022, kredit/pembiayaan UMKM tumbuh 10,47% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,19% (yoy). Meski demikian, porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM pada per Desember 2022 tercatat sebesar 21,00% terhadap total kredit/pembiayaan bank umum, meningkat dari posisi September 2022 sebesar 20,95%.

Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 48,67%) yang tumbuh 9,15% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 13,33% (yoy) sehingga mendorong ke bawah pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (15,88%) tercatat tumbuh

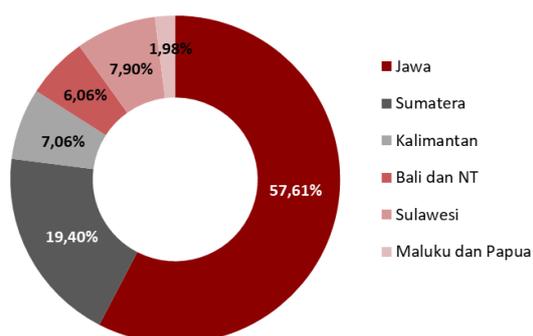
tinggi sebesar 32,67% (yoy), meningkat dari 24,19% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit/pembiayaan UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% dan tercatat turun dari tahun sebelumnya 3,83% menjadi 3,41%. Perbaikan rasio NPL utamanya terdapat pada sektor konstruksi dan industri pengolahan yang masing-masing menurun dari 12,75% dan 4,23% menjadi 10,81% dan 3,45%. Meski demikian, perlu diperhatikan adanya kenaikan nominal NPL UMKM sektor perdagangan besar dan eceran disertai kenaikan rasio NPL dari tahun sebelumnya 3,59% menjadi 3,63%.

Secara spasial, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 57,61%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi

kredit/pembiayaan UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 22,99%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM tertinggi terdapat di provinsi Maluku Utara yang tumbuh sebesar 24,97% (yoy), meskipun dengan porsi yang kecil hanya sebesar 0,29%. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan penyaluran kredit UMKM terbesar (14,77%), tumbuh sebesar 10,76% (yoy) meskipun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 12,97% (yoy).

Grafik 28 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM



Sumber: SPI Desember 2022

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM disalurkan oleh BUMN (62,96%) dan BUSN (30,23%). Pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh tinggi 13,39% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,30% (yoy). Sementara itu,

pertumbuhan kredit UMKM BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 4,42% (yoy) dan 12,57% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing 2,66% (yoy) dan 9,11% (yoy). Di sisi lain, kredit/pembiayaan UMKM kelompok Bank Asing masih berkontraksi -15,62% (yoy) namun sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam -42,25% (yoy).

Terkait dengan penyaluran kredit/pembiayaan UMKM dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi penyaluran KUR selama tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp365,50 triliun (97,95% dari target plafon KUR tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun) dan diberikan kepada 7,62 juta debitur. Berdasarkan jenisnya, sebagian besar KUR disalurkan kepada KUR Mikro sebesar Rp242,74 triliun (66,41%), diikuti KUR Kecil Rp116,38 triliun (31,84%), KUR Super Mikro Rp6,35 triliun (1,74%), dan KUR PMI Rp26,51 miliar (0,0073%).

Kebijakan KUR tahun 2023 akan kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19, antara lain: (i) suku bunga KUR kembali ke 6% karena tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar 3% tidak dilanjutkan; (ii) kembalinya target penyaluran KUR sektor produksi sebesar 60%; (iii) kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil menjadi maksimal Rp500 juta; dan (iv) memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR s.d Maret 2024.

B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran BPR dan BPRS pada triwulan IV-2022 tumbuh 11,81% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 5,86% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu penyaluran kredit/pembiayaan terbesar antara lain disalurkan ke sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel dengan porsi 22,30%. Kredit/pembiayaan pada sektor ini tumbuh sebesar 11,08% (yoy), meningkat dari 6,60% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran ke sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga juga cukup besar dengan porsi 12,29% dan

tumbuh cukup tinggi sebesar 17,33% (yoy) meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 14,85% (yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada kedua sektor tersebut antara lain sejalan dengan naiknya optimisme keyakinan konsumen dan mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan konsumsi serta pariwisata. Hal ini juga tecermin pada tumbuhnya kredit/pembiayaan pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 15,71% (yoy), jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,26% (yoy).

Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)		qtq		yoy		Porsi	
		Des'21	Sep'22	Des'22	Sep'22	Des'22	Des'21		Des'22
1	Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	7.437	8.467	9.140	-0,19%	7,94%	9,90%	22,89%	6,36%
2	Perikanan	504	551	609	3,18%	10,51%	-1,37%	20,78%	0,42%
3	Pertambangan dan Penggalian	690	944	1.010	10,60%	6,92%	-1,11%	46,21%	0,70%
4	Industri Pengolahan	3.011	4.024	4.269	7,26%	6,07%	15,91%	41,75%	2,97%
5	Listrik, Gas dan Air	173	170	189	-12,63%	11,49%	5,91%	9,10%	0,13%
6	Konstruksi	6.097	7.647	8.118	9,00%	6,16%	16,92%	33,14%	5,65%
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	28.855	31.116	32.052	3,46%	3,01%	6,60%	11,08%	22,30%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3.425	3.704	3.963	5,08%	7,01%	0,26%	15,71%	2,76%
9	Perantara Keuangan	835	1.504	1.640	8,86%	9,09%	13,52%	96,40%	1,14%
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa	5.391	6.147	6.364	3,74%	3,53%	5,83%	18,06%	4,43%
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	102	250	236	-2,55%	-5,53%	11,64%	132,28%	0,16%
12	Jasa Pendidikan	372	403	426	-2,29%	5,49%	2,59%	14,36%	0,30%
13	Jasa Sosial/Masyarakat	9.027	11.368	11.223	-3,61%	-1,27%	4,82%	24,33%	7,81%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	816	294	259	-13,19%	-11,92%	8,42%	-68,23%	0,18%
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	2.628	28	3	-11,78%	-87,39%	-5,28%	-99,87%	0,00%
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	15.053	16.985	17.661	3,95%	3,98%	14,85%	17,33%	12,29%
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	44.146	46.399	46.581	1,68%	0,39%	1,52%	5,51%	32,41%
	Total	128.564	140.001	143.743	2,53%	2,67%	5,86%	11,81%	100%

Sumber: SPI dan SPS Desember 2022

2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit/pembiayaan BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 60,43%. Kredit/pembiayaan di wilayah ini tumbuh 13,28% (yoy), meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 6,66% (yoy). Peningkatan

utamanya didorong oleh provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing tumbuh 13,15% (yoy) dan 15,26% (yoy). Besarnya penyaluran kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, penyaluran kredit/pembiayaan kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 18,39%. Kredit/pembiayaan di wilayah ini tumbuh 10,94% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,47% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh 19,42% (yoy).

Dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Kalimantan

tumbuh tertinggi sebesar 36,75% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 31,04% (yoy) namun dengan porsi yang relatif kecil hanya sebesar 2,61% dari total penyaluran kredit/pembiayaan BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh provinsi Kalimantan Tengah dengan nominal kenaikan Rp706 miliar (yoy) atau tumbuh 84,98% (yoy).

Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)			qtq		yoy		Porsi
	Des'21	Sep-22	Dec-22	Sep'22	Des'22	Des'21	Des'22	
Jawa	76.677	84.883	86.858	2,60%	2,33%	6,66%	13,28%	60,43%
Sumatera	23.833	25.616	26.440	2,94%	3,22%	3,47%	10,94%	18,39%
Kalimantan	2.741	3.204	3.749	4,33%	17,02%	31,04%	36,75%	2,61%
Bali - Nusra	14.546	15.003	15.277	1,32%	1,82%	3,40%	5,03%	10,63%
Sulampua	10.767	11.295	11.419	2,22%	1,09%	3,85%	6,05%	7,94%
Total	128.564	140.001	143.743	2,53%	2,67%	5,86%	11,81%	100%

Sumber: SPI dan SPS Desember 2022

Box 2. Kasus Adani Grup di India dan Pentingnya Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan

Pasar Modal sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di India

India merupakan salah satu negara industri terkemuka yang diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok pada tahun 2030. Prediksi tersebut mengacu pada laju pertumbuhan ekonomi India yang konsisten dan terpesat dibandingkan negara-negara besar lainnya. Capaian pertumbuhan ekonomi negara ini salah satunya ditopang oleh pasar modal India yang menarik perhatian investor dari seluruh penjuru dunia sehingga melaju pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ekonomi India diketahui mulai tumbuh pesat sejak Manmohan Singh (Menteri Keuangan India) meluncurkan program reformasi ekonomi pada tahun 1991 yang meliputi deregulasi sektor keuangan, liberalisasi dari kebijakan perdagangan yang terlalu proteksionis, serta kebebasan berinvestasi dari kebijakan yang terlalu restriktif.

Reformasi kebijakan ini telah mendorong investasi swasta langsung termasuk asing sehingga menjadikan India sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik. Dikutip dari situs resmi *India Brand Equity Foundation/IBEF* (sebuah perserikatan yang didirikan oleh Departemen Perdagangan Kementerian Perdagangan dan Industri, Pemerintah India), penanaman modal asing langsung tidak hanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi sumber keuangan non-utang yang signifikan bagi pembangunan ekonomi India. Perusahaan asing berinvestasi di India untuk mendapatkan keuntungan dari hak istimewa negara tersebut seperti keringanan pajak dan gaji yang relatif lebih rendah. Hal ini membantu India mengembangkan pengetahuan teknologi dan menciptakan lapangan kerja serta manfaat lainnya.

Derasnya aliran masuk modal asing yang masuk ke India dipengaruhi oleh kerangka kebijakan Pemerintah yang mendukung, iklim bisnis yang dinamis, daya saing global yang meningkat, dan pengaruh ekonomi. Aliran masuk modal asing India telah meningkat 20 kali lipat sejak Januari 2000 hingga tahun fiskal 2021-22. Menurut Laporan Investasi Dunia 2022, India menempati peringkat ke-8 di antara penerima aliran modal masuk asing utama dunia pada tahun 2020, naik dari posisi ke-9 pada tahun 2019. Lebih lanjut, Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Dalam Negeri (DPIIT), aliran masuk modal asing kumulatif India mencapai USD871,01 miliar antara April 2000-Juni 2022 yang utamanya disebabkan oleh upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

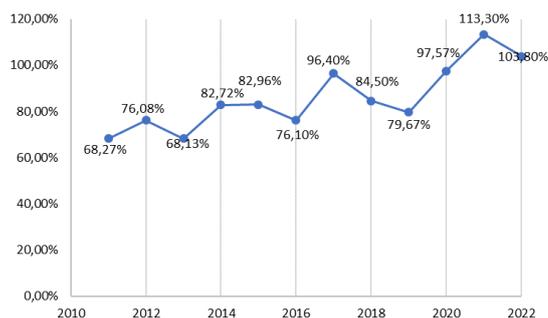
Peningkatan investasi asing tersebut menjadi salah satu kontributor paling signifikan bagi pertumbuhan ekonomi India. Menurut data CEIC, tingkat rata-rata pertumbuhan PDB Riil triwulanan di India sejak Juni 2005 hingga Desember 2022 adalah sebesar 7,2% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, rasio kapitalisasi saham India terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga terus tumbuh meningkat dan mencapai 103,8% pada 2022 meskipun sedikit turun dari tahun sebelumnya sebesar 112,4%. Namun demikian, rasio tersebut masih lebih unggul dibandingkan beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia (91,7%), Indonesia (48,5%). Goldman Sachs, perusahaan bank investasi AS bahkan memprediksi pangsa India dalam nilai pasar saham global diperkirakan akan meningkat dari 2,8% pada tahun 2021 menjadi 3,7% selama lima tahun ke depan.

Tingkat Pertumbuhan GDP Tahunan India



Sumber: Macrotrends

Rasio Kapitalisasi Saham terhadap PDB India



Sumber: CEIC

Pasar keuangan global dikejutkan oleh kasus yang menimpa perusahaan Adani Grup di India

Perkembangan pasar keuangan India sepanjang kurun waktu tersebut merefleksikan bahwa perekonomian negara ini senantiasa terjaga tumbuh positif. Namun demikian, sejak pertengahan Februari lalu, pasar keuangan global dikejutkan oleh tuduhan skema penipuan dalam skala kolosal yang dilakukan perusahaan swasta multinasional "raksasa" India, Adani Grup. Tuduhan penipuan itu kemudian menyebabkan harga saham Adani Grup jatuh dan terpaksa mengalami kerugian yang sangat besar hingga USD118 miliar. Kejatuhan Adani Grup mengguncang bursa saham India yang didominasi oleh beberapa konglomerasi besar yang selanjutnya mendorong aliran modal asing keluar (*capital outflow*) serta menekan nilai tukar Rupee.

Tak pelak, kasus tersebut juga memperburuk reputasi India di tengah persaingan menarik aliran modal asing masuk ke dalam negeri, tidak hanya dengan Tiongkok, tetapi juga negara-negara lainnya di Asia. Sebagaimana diketahui, sejalan dengan semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi di tengah era globalisasi, maka *financial distress* yang terjadi pada suatu negara dapat dengan mudah menyebar ke sektor riil, sosial, dan politik maupun negara-negara lain dalam kurun waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, perlu dicermati potensi risiko yang sama di pasar saham wilayah Asia termasuk Indonesia.

Adani Grup, konglomerasi yang bisnisnya menggurita dan dikenal kontroversial

Perusahaan Adani Grup didirikan oleh Gautam Adani pada tahun 1988 dan memiliki porsi bisnis yang signifikan terhadap perekonomian India serta berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Menurut data dari Forbes, nilai bersih Gautam Adani, pendiri dan pemilik mayoritas Adani Grup, mencapai sekitar USD135 miliar pada bulan Februari 2022 dan menjadikannya sebagai orang terkaya kedua di India. Adani Grup sendiri merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di India dan sahamnya terdaftar di bursa saham India, yaitu Bursa Efek Bombay (BSE) dan National Stock Exchange of India (NSE).

Per Maret 2022, perusahaan yang memiliki 100 operasi bisnis di 70 negara ini mencatatkan nilai kapitalisasi saham hingga INR7,6 miliar atau sebesar 6,3% dari total kapitalisasi saham di India (sumber laporan keuangan perusahaan sebelum publikasi laporan Hindenburg Research). Bidang usaha perusahaan ini terdiversifikasi pada banyak sektor yang mencakup infrastruktur, logistik, energi, agrikultur, dan sektor keuangan serta terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur dan energi di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Selain itu, Adani Grup juga memiliki beberapa hubungan bisnis dengan Indonesia sebagai berikut:

1. Tambang Batu bara: Adani Grup memiliki beberapa tambang batu bara di Indonesia di antaranya yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
2. Energi Terbarukan: Adani Grup yaitu Adani Green Energy Limited pada tahun 2020 mengumumkan rencana untuk membangun proyek pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia.
3. Infrastruktur: Adani Grup memiliki rencana untuk membangun pelabuhan di Indonesia.

Diversifikasi Bidang Usaha Adani Grup

adani Adani Grup

Perusahaan swasta multinasional yang berbasis di India, didirikan pada tahun 1988 oleh Gautam Adani. Grup ini beroperasi di sejumlah sektor, termasuk infrastruktur, logistik, energi, agrikultur, dan sektor keuangan

Infrastruktur

Adani Grup memiliki port laut terbesar di India, yaitu Mundra Port, yang berada di Gujarat. Grup ini juga terlibat dalam pembangunan bandara, jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya di seluruh India.

Energi

Adani Grup adalah salah satu produsen energi terbesar di India, dengan portofolio energi terdiversifikasi yang mencakup pembangkit listrik tenaga batu bara, energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik.



Logistik

Adani Grup memiliki perusahaan logistik terbesar di India, yaitu Adani Logistics. Perusahaan ini menyediakan layanan logistik untuk sektor kargo, logistik pelabuhan, dan perkeretaapian.

Agrikultur

Adani Grup terlibat dalam sektor agrikultur melalui perusahaan agribisnis Adani Agri Fresh. Perusahaan ini fokus pada produksi dan distribusi produk-produk pertanian seperti buah-buahan dan sayuran.

Keuangan

Adani Grup memiliki perusahaan keuangan, yaitu Adani Capital, yang menyediakan layanan pembiayaan dan investasi untuk sektor infrastruktur dan energi.

Sumber: Adani Group, disarikan

Bloomberg melaporkan bahwa beberapa saham Adani Grup yang terdaftar di bursa saham India telah melonjak lebih dari 600% selama dua tahun terakhir seiring keputusannya beralih dari bisnis bahan bakar fosil dan batu bara menuju berbagai proyek energi hijau. Hal tersebut sejalan dengan upaya Perdana Menteri India, Narendra Modi, untuk memulihkan kembali ekonomi India dan memenuhi target nol karbon pada tahun 2070 (Fortune Indonesia, 2022). Komitmen Adani Grup dalam proyek energi hijau ini mengundang banyak investor asing mulai masuk ke perusahaannya. Dalam waktu yang relatif singkat, Saham Adani Green dan Adani Total Gas Ltd.–perusahaan patungan yang terdaftar di Mumbai dengan perusahaan Prancis–meningkat lebih dari 1.000% sejak awal tahun 2020. Flagship Adani Enterprises Ltd juga naik lebih dari 730%, Adani Transmission Ltd lebih dari 500%, dan Adani Ports 95%.

Selama ini, aksi korporasi yang dilakukan oleh Adani Grup dikenal cukup kontroversial karena lebih memprioritaskan ekspansi agresif yang sebagian besar didanai oleh utang tanpa memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan secara cermat. Bahkan, Credit Suisse dalam 2015 House of Debt Report telah memberikan peringatan bahwa Adani Grup termasuk dalam 10 konglomerasi dalam kategori *severe stress* dengan 12% utang dari perbankan. Pada 2022, CreditSight juga mengkategorikan Adani sebagai "*deeply overleveraged*" atau berpotensi gagal bayar disebabkan terlalu banyak hutang daripada aset dan ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Adani Grup berpotensi tinggi terjebak dalam "jebakan utang" pada "skenario terburuk".

Publikasi laporan Hindenburg Research menjadi awal terbongkarnya kecurangan Adani Grup

Pada Juni 2021, perusahaan riset investasi asal AS (Hindenburg Research) dalam analisis pasar sahamnya yang kemudian diterbitkan dalam sebuah laporan dan dipublikasikan pada Januari 2023 menyebutkan tuduhan “penipuan terbesar dalam sejarah perusahaan” atas perusahaan Adani. Dalam laporan tersebut, Hindenburg Research menyebutkan tuduhan-tuduhan mengenai pelanggaran hukum, konflik kepentingan, dan kesalahan akuntansi meliputi:

1. Adani Grup diduga menggunakan jaringan perusahaan yang kompleks dan terinterkoneksi untuk melakukan kecurangan akuntansi, menghindari pajak dan mengalihkan laba dari bisnis yang rugi ke bisnis yang menguntungkan.
2. Adani Grup diduga melakukan kecurangan akuntansi untuk memanipulasi harga saham dengan tujuan memengaruhi harga saham anak perusahaannya dan menguntungkan investor terkait.
3. Adani Grup diduga melakukan konflik kepentingan dalam beberapa transaksi, termasuk pengalihan saham antara perusahaan yang terkait dan pengadaan lahan.

Hindenburg Research dikenal sebagai firma “riset forensik finansial” yang berfokus dalam mengungkap praktik keuangan yang mencurigakan. Hidenburg telah menerbitkan puluhan laporan yang menyebabkan perusahaan yang mencurigakan diinvestigasi, dikeluarkan dari bursa saham, hingga ditutup. Investigasi Hinderburg Research terhadap Adani Grup ini berlangsung selama dua tahun dan berangkat dari kecurigaan utama atas kenaikan nilai saham pada semua perusahaannya yang dinilai tidak wajar. Misalnya, harga saham Adani Total Gas, Adani Transmission, Adani Enterprises, dan Adani Green Energy melonjak antara 7 sampai 20 kali lipat dalam waktu 3 tahun (Kontan, 2022).

Pergerakan harga saham Adani Grup ekstrem namun demikian tidak sejalan dengan kinerja keuangan dan aksi korporasi yang dilakukannya. Pengelolaan keuangan Adani Grup terlihat semakin mencurigakan karena didukung oleh fakta bahwa 5 dari 7 perusahaannya memiliki *current ratio* di bawah 1 (satu) yang artinya sebagian besar aset perusahaan berasal dari utang daripada ekuitas. Laporan Direktur Keuangan Adani Grup belum lama ini bahkan menyebutkan bahwa perusahaan tersebut tengah terjerat utang sebesar USD30 miliar, yang mana USD9 miliar di antaranya berasal dari bank-bank di India.

Adani Grup juga disinyalir melakukan praktik curang dengan cara *round-tripping* uang yaitu memutar modal yang didapatkan dari pasar saham untuk kembali diinvestasikan pada semua bidang usahanya. Dalam praktiknya, kenaikan harga saham Adani Grup kemudian digunakan untuk ekspansi agar perusahaan memperoleh modal dengan cepat. Adani diduga melakukan aksi goreng saham dan terkait dengan aktivitas *money laundering* (pencucian uang), kepemilikan saham yang *undisclosed*, dan lain sebagainya yang merupakan tindakan ilegal dalam dunia keuangan dan merugikan para investor karena harus membeli lembar saham lebih tinggi dari semestinya. Keberadaan saham gorengan ini juga berpotensi merusak kepercayaan investor baik dalam negeri maupun asing dan memberikan sentimen negatif terhadap pasar keuangan global.

Respon Adani Grup menghadapi tuduhan Hindenburg Research

Adani Grup membantah tuduhan-tuduhan tersebut dengan merilis dokumen “Adani Response” sebanyak 413 halaman pada 29 Januari 2023 untuk menjawab laporan Hindenburg. Dalam dokumen tersebut, Adani Grup menyatakan bahwa laporan Hindenburg Research mengandung kesalahan dan kelalaian yang signifikan. Adani Grup juga mengatakan bahwa pihaknya selalu beroperasi sesuai dengan hukum dan mengikuti praktik bisnis yang etis dan transparan. Beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh Adani Grup untuk membantah tuduhan terangkum sebagai berikut:

Beberapa Aksi Korporasi Adani Grup untuk Membantah Tuduhan Hindenburg Research

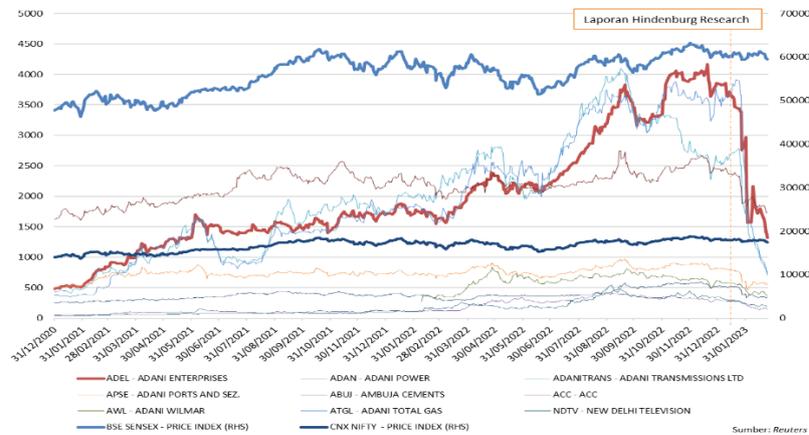
Penawaran Saham Adani Wilmar	<ul style="list-style-type: none"> Mengumumkan penawaran saham awal (IPO) untuk Adani Wilmar, sebuah perusahaan patungan dengan Wilmar International yang bergerak di bidang pengolahan minyak nabati dan produksi bahan pangan senilai \$1 miliar
Membantah Tuduhan	<ul style="list-style-type: none"> Adani Grup membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Hindenburg Research, dengan menyatakan bahwa mereka telah mengikuti praktik akuntansi yang benar dan transparan.
Pembentukan Komite Independen	<ul style="list-style-type: none"> Bertujuan untuk menyelidiki tuduhan yang dilontarkan oleh Hindenburg Research dan memastikan bahwa praktik akuntansi yang dilakukan oleh Adani Grup sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
Pengurangan saham	<ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Juni 2021, Adani Grup telah mengurangi kepemilikan saham pada beberapa perusahaan di bawah naungan Adani Grup, termasuk Adani Ports and Special Economic Zone dan Adani Green Energy
Pengunduran Diri dari Dewan Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa anggota dewan direksi Adani Ports and Special Economic Zone mengundurkan diri setelah tuduhan yang dilontarkan oleh Hindenburg Research.
Menjalin kerjasama dengan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Adani Grup menjalin kerja sama dengan pemerintah India dalam beberapa proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan jalan tol dan proyek pembangkit listrik tenaga surya, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi India dan memperkuat posisi Adani Grup di pasar domestik.



Sumber: Adani Response, disaripatkan

Namun demikian, respon panjang tersebut tidak dapat menghentikan jatuh bebasnya harga saham Adani Grup yang menembus USD50 miliar per 30 Januari 2023.

Pergerakan Harga Saham Adani Grup



Sumber: Reuters

Penurunan harga saham Adani Grup yang cukup tajam pada saat laporan Hindenburg Research dirilis memang berdampak pada pasar keuangan India, terutama dalam jangka pendek. Pada hari berikutnya setelah laporan dirilis, saham Adani Grup turun sekitar 8-20%. Kondisi tersebut sempat memengaruhi nilai pasar saham India secara keseluruhan, karena Adani Grup merupakan salah satu perusahaan terbesar di India dan memiliki bobot yang signifikan dalam indeks saham India. Saat ini, masalah tersebut masih menjadi perdebatan dan Adani Grup belum dinyatakan bersalah oleh otoritas yang berwenang.

Langkah Otoritas India dalam menyikapi kasus Adani Grup

Pada perkembangannya ditemukan informasi baru yang mengatakan bahwa Adani Grup melalui kontributor Wikipedia (situs ensiklopedia) telah melakukan manipulasi informasi yang disajikan di situs Wikipedia. Hal tersebut memberikan sentimen negatif terhadap harga saham Adani Grup yang kemudian turun sampai dengan -10,4% pada 23 Februari 2023. Setelah tuduhan Hindenburg Research terhadap Adani Grup, otoritas India melakukan beberapa tindakan, diantaranya:

1. Menyelidiki Tuduhan: Otoritas India, termasuk Securities and Exchange Board of India (SEBI) dan Kementerian Keuangan, melakukan penyelidikan terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh Hindenburg Research terhadap Adani Grup, untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum atau praktik yang tidak etis.
2. Memeriksa Laporan Keuangan: Otoritas India juga memeriksa laporan keuangan Adani Grup, untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan laporan tersebut, serta memastikan bahwa praktik akuntansi Adani Grup sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
3. Meningkatkan Pengawasan: Otoritas India juga meningkatkan pengawasan terhadap Adani Grup dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau praktik yang tidak etis di masa depan.
4. Menjalin Kerja Sama dengan Adani Grup: Pemerintah India dan Adani Grup menjalin kerja sama dalam beberapa proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan jalan tol dan proyek pembangkit listrik tenaga surya, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi India dan memperkuat posisi Adani Grup di pasar domestik.
5. Mempertahankan Kredibilitas Pasar Modal: Otoritas India juga memastikan bahwa pasar modal tetap stabil dan kredibel, meskipun terdapat tuduhan terhadap Adani Grup. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum atau praktik yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di India.

Saat ini, otoritas pasar modal dan regulator di India seperti Securities and Exchange Board of India (SEBI) telah memulai investigasi terhadap Adani Grup atas tuduhan yang dituduhkan oleh Hindenburg Research. Namun, dampak jangka panjang terhadap kondisi Adani Grup masih sulit diprediksi karena tergantung pada hasil investigasi dan perkembangan selanjutnya terkait dengan tuduhan tersebut.

Lesson Learned atas kasus Adani Grup yang melanda pasar keuangan India

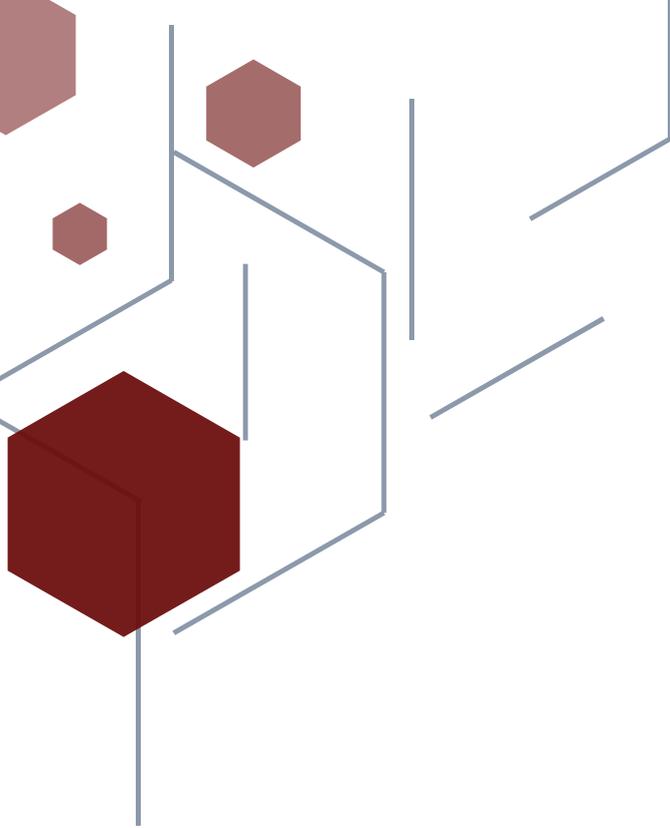
Berdasarkan kriteria konglomerasi keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (POJK Konglomerasi Keuangan) terdapat 16 konglomerasi keuangan yang diawasi OJK dengan total aset mencapai Rp8.092 triliun dan menguasai 61,00% aset sektor jasa keuangan (posisi Juni 2022). Konglomerasi keuangan tersebut didominasi oleh konglomerasi keuangan yang entitas utamanya adalah bank, yaitu sebanyak 15 konglomerasi keuangan (60,08% terhadap aset sektor jasa keuangan), sedangkan satu konglomerasi keuangan lainnya memiliki entitas utama berupa perusahaan asuransi (0,92% terhadap aset sektor jasa keuangan).

Tingginya porsi konglomerasi keuangan terhadap sektor jasa keuangan secara keseluruhan memperlihatkan pentingnya peran konglomerasi keuangan. Permasalahan yang terjadi di Konglomerasi Keuangan dapat berdampak signifikan pada perbankan atau SJK secara keseluruhan. Produk/layanan jasa keuangan dari konglomerasi terjadi di lintas sektor, sehingga menjadi sangat kompleks dan dinamis dan punya potensi meningkatkan eksposur risiko. Sumber kerentanan krisis pada sektor keuangan tentu

sekarang menjadi sangat beragam, sehingga pengawasan diperlukan untuk mencegah timbulnya risiko sistemik dalam sektor keuangan.

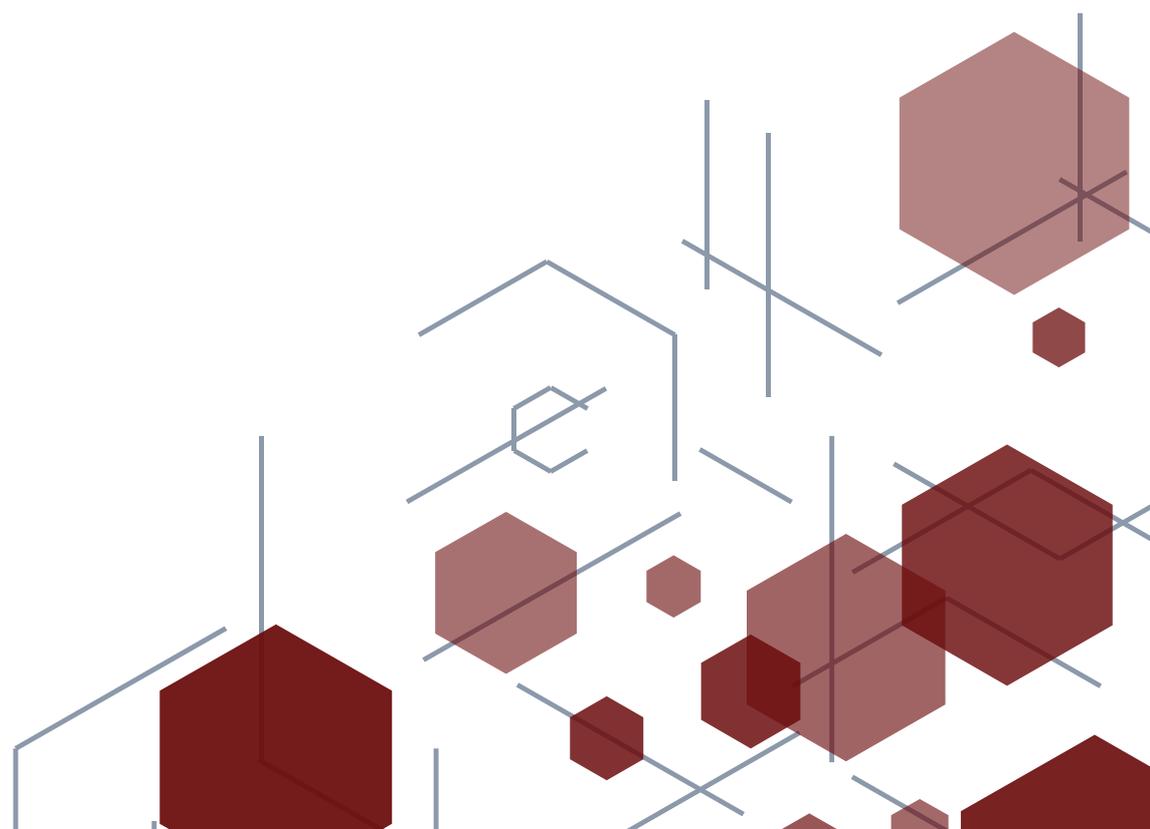
Berkaca dari kasus Adani yang terjadi di India, menunjukkan bahwa permasalahan pada Konglomerasi Keuangan tidak hanya terkait dengan pengawasan *prudential*, namun juga *market conduct*. Selain itu, penerapan *Governance, Risk Management, Compliance* (GRC) secara terintegrasi juga menjadi kunci penting dalam konglomerasi keuangan. Dalam hal ini, penerapan GRC untuk mendukung prinsip kehati-hatian dan perilaku pelaku pasar yang bertanggung jawab, tidak hanya perlu diterapkan pada lembaga jasa keuangan namun juga perusahaan terkait konglomerasi keuangan lainnya terutama pemegang saham pengendali.

Dalam pasar modal, fluktuasi harga saham biasa terjadi karena adanya faktor-faktor yang berbeda, seperti kondisi ekonomi, keputusan bisnis, dan sentimen pasar. Integritas dari seluruh pihak yang terkait menjadi faktor utama yang harus dijaga dan ditingkatkan untuk melindungi kepercayaan investor dalam menciptakan kondisi perekonomian yang tumbuh dan berkesinambungan.



Bab III

Profil Risiko Perbankan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Sementara itu, risiko pasar sedikit meningkat namun masih terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portfolio SSB (*bonds' portfolio rebalancing*) yang dimiliki, di tengah naiknya *yield* obligasi mengikuti kenaikan suku bunga acuan secara global. Ke depan, kenaikan risiko perlu tetap diwaspadai seiring dengan tren kenaikan suku bunga untuk meredam laju inflasi yang berpotensi meningkatkan tekanan di pasar keuangan domestik

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan IV-2022, eksposur risiko pada aset perbankan meningkat tecermin dari ATMR yang tumbuh 9,67% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,50% (yoy). Kenaikan ATMR tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ATMR Kredit dan ATMR Operasional, sementara ATMR Pasar masih mengalami penurunan.

ATMR Kredit yang memiliki porsi terbesar 84,10% tumbuh 10,17% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 4,20% (yoy), sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit perbankan. ATMR Operasional tumbuh 8,62% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,86% (yoy). Peningkatan ATMR Operasional antara lain dipengaruhi oleh kenaikan laba perbankan seiring dengan mulai membaiknya kegiatan usaha dan naiknya penyaluran kredit. Sementara itu, ATMR Pasar masih menunjukkan penurunan sebesar -13,57% (yoy) namun tidak sedalam tahun

sebelumnya yang berkontraksi -18,50% (yoy). Penurunan pada ATMR Pasar antara lain seiring dengan penurunan exposure surat berharga kategori *Available For Sale* (AFS).

OJK senantiasa memperkuat mitigasi risiko perbankan melalui implementasi tata kelola perbankan, didukung oleh perbaikan *internal control* bank serta fungsi pengawasan yang semakin efektif. Pada periode laporan, fungsi penguatan pengawasan bank antara lain dilakukan dengan penguatan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*, penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank berdasarkan risiko, serta optimalisasi penggunaan OJK-BOX (OBOX) dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Tabel 17 Perkembangan ATMR Bank Umum

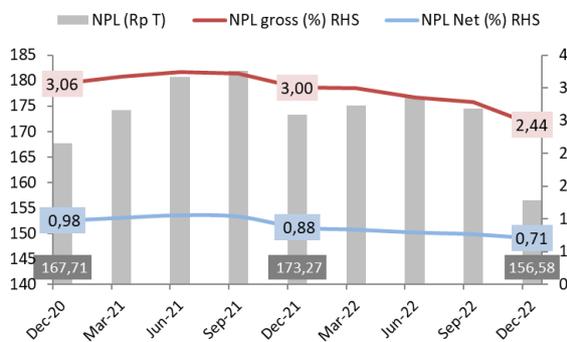
Komponen ATMR (Rp T)	Des '22	yoy		
		Des '21	Sep '22	Des '22
ATMR Kredit	5.642	4,20%	9,33%	10,17%
ATMR Operasional	1.011	1,86%	8,81%	8,62%
ATMR Pasar	62	-18,50%	-15,86%	-13,57%
Total ATMR	6.708	3,50%	8,85%	9,67%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

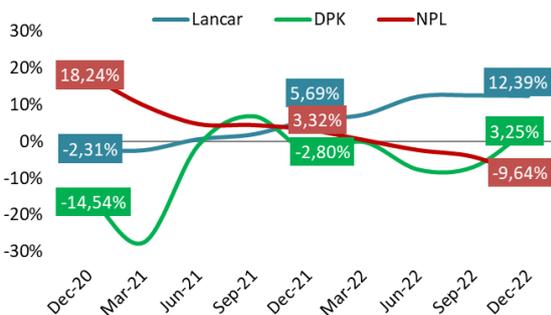
Pada Desember 2022, risiko kredit membaik tecermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,44%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,00% seiring dengan turunnya nominal NPL. Selain itu, rasio NPL *net* juga tercatat menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,88% menjadi 0,71% utamanya karena penurunan nominal NPL yang besar meskipun CKPN NPL menurun.

Grafik 29 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



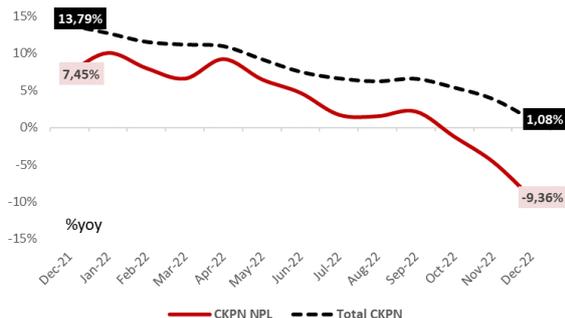
Sumber: SPI Desember 2022

Grafik 30 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit (yoy)



Sumber: SPI Desember 2022

Grafik 31 Pertumbuhan CKPN (yoy)



Sumber: LBUT

Secara total CKPN tumbuh 1,08% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 13,79% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh turunnya CKPN NPL sebesar -9,36% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,45% (yoy). Meskipun CKPN tumbuh melambat, namun *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar meningkat menjadi sebesar 15,90% (tahun sebelumnya 10,38%). *Coverage* CKPN terhadap kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) juga masih memadai sebesar 32,52% meskipun sedikit menurun dari tahun lalu (33,35%). Selain itu, *coverage* CKPN terhadap NPL juga meningkat menjadi sebesar 223,07% dari tahun lalu 119,42% sejalan dengan turunnya nominal NPL. Hal ini mengindikasikan antisipasi bank terhadap risiko kredit masih memadai. Perbankan senantiasa didorong untuk terus meningkatkan *coverage* CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur, serta sebagai langkah antisipatif akan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2023. Stimulus tersebut diperpanjang kembali menjadi s.d. 31 Maret 2024 khususnya untuk kredit UMKM, kredit sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.

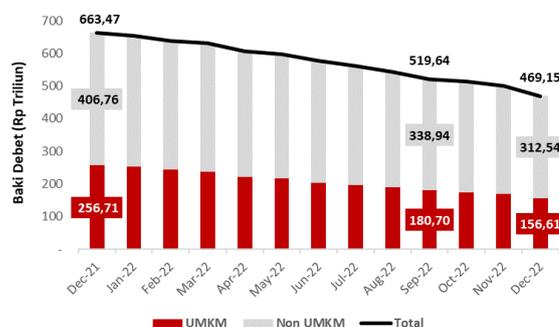
Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun lebih dalam sebesar -23,54% (yoy) dibandingkan posisi Desember 2021 yang turun -11,51% (yoy). Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar sebesar Rp501,38 triliun atau 67,45% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi

kualitas Lancar tersebut turun -29,73% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang turun -18,02% (yoy). Kredit restrukturisasi selain Lancar juga turun -6,44% (yoy) dari tahun lalu yang tumbuh 13,32% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 7,81% dari 12,37% pada Desember 2021.

Lebih lanjut, kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 berada dalam tren menurun, di mana per Desember 2022 tercatat menurun menjadi sebesar Rp469,15 triliun, atau terkontraksi -29,29% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp663,47 triliun. Jumlah debitur kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 juga menunjukkan tren penurunan menjadi 2,27 juta debitur dari tahun lalu sebanyak 4,08 juta debitur. Penurunan kredit restrukturisasi tersebut menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat.

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan seiring masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko stagflasi, tekanan geopolitik, dan efek pascapandemi Covid-19 yang berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi global maupun domestik. Selain itu, tetap perlu diwaspadai rasio *Loan at Risk* sebesar 14,05%, meskipun sudah menurun dari tahun sebelumnya (19,48%).

Grafik 32 Tren Kredit Restrukturisasi terkait Covid-19



Sumber: SLIK OJK

Tabel 18 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Des'21	Sep'22	Des'22	Porsi	qtq		yoy	
					Sep'22	Des'22	Des'21	Des'22
1. Lancar	5.359	5.834	6.023	93,76%	1,95%	3,23%	5,69%	12,39%
- Non Restru	4.645	5.276	5.521	85,95%	2,87%	4,64%	10,60%	18,86%
- Restru	714	558	501	7,81%	-6,01%	-10,11%	-18,02%	-29,73%
2. DPK	237	266	244	3,80%	-4,11%	-8,28%	-2,80%	3,25%
3. Kurang Lancar	22	21	19	0,29%	-3,74%	-9,13%	-19,92%	-13,72%
4. Diragukan	21	31	25	0,40%	-0,58%	-18,85%	42,59%	23,28%
5. Macet	131	122	112	1,75%	-0,96%	-8,24%	3,82%	-14,14%
Nominal NPL	173	174	157		-1,23%	-10,25%	3,32%	-9,64%
Rasio NPL Gross %	3,00%	2,78%	2,44%		-8	-34	-6	-57
Rasio NPL Net %	0,88%	0,77%	0,71%		-3	-6	-10	-17
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	950	824	746		-5,41%	-9,52%	-14,69%	-21,52%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit	16,47%	13,13%	11,61%		-97	-152	-385	-486
<i>Loan at Risk</i> (LaR)	1.123	999	902		-4,70%	-9,64%	-12,34%	-19,69%
Rasio <i>Loan at Risk</i> (LaR)	19,48%	15,91%	14,05%		-105	-187	-390	-543
Total Kredit	5.769	6.275	6.424		1,59%	2,37%	5,24%	11,35%

Sumber: SPI Desember 2022

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit pada semua jenis penggunaan kredit. Rasio NPL Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing turun menjadi 3,25%; 1,97%; dan 1,54% dari 3,99%; 2,70%; dan 1,69% pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, perbaikan NPL KMK, KI, dan KK terdapat pada semua kelompok bank dengan utamanya didorong oleh kelompok BUMN. Rasio NPL KMK, KI, dan KK BUMN turun masing-masing menjadi 3,52%, 2,02%, dan 1,41% dari tahun sebelumnya 4,32%, 2,98%, dan 1,59%.

Secara umum rasio NPL KMK pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Namun demikian, pada periode laporan rasio NPL KMK BPD tercatat membaik menjadi 5,88% dari 7,52% pada tahun sebelumnya. Tingginya NPL KMK pada BPD antara lain karena selain masih terbatasnya sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif juga dipengaruhi oleh penyaluran kredit BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan NPL BPD masih terjaga pada level 2,13%, membaik dari tahun sebelumnya sebesar 2,54%.

Tabel 19 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Dec-21	Sep'22	Des'22	YOY	
				Des'21	Des'22
KMK	2.621	2.892	2.940	6,32%	12,17%
KI	1.528	1.653	1.711	4,01%	12,00%
KK	1.620	1.729	1.772	4,67%	9,42%
Total Kredit	5.769	6.275	6.424	5,24%	11,35%

Sumber: SPI Desember 2022

Tabel 20 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Dec-21	Sep'22	Des'22	YOY	
				Des'21	Des'22
NPL KMK	3,99	3,68	3,25	7	-74
NPL KI	2,70	2,39	1,97	-25	-73
NPL KK	1,69	1,65	1,54	-10	-15
Total NPL	3,00	2,78	2,44	-6	-56

Tabel 21 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.324.889	45,78	3,52	795.726	27,49	2,02	773.527	26,73	1,41	2,54
Bank Swasta	1.362.136	48,93	2,96	809.460	29,08	1,90	612.029	21,99	2,04	2,45
BPD	114.251	20,30	5,88	72.672	12,91	2,27	375.924	66,79	0,97	2,13
KCBLN	139.013	75,98	1,34	33.086	18,08	1,80	10.852	5,93	2,04	1,46
TOTAL	2.940.289	45,77	3,25	1.710.944	26,64	1,97	1.772.331	27,59	1,54	2,44

Sumber: SPI Desember 2022

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan rasio NPL terbesar terdapat pada sektor pertambangan yang juga diikuti oleh sektor industri pengolahan; Penyediaan Akomodasi

dan Penyediaan Makan Minum (PMM); dan *real estate*.

Rasio NPL sektor pertambangan turun signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,42% menjadi 2,42% sejalan dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,04 triliun (yoy) disertai naiknya pertumbuhan

kredit sektor pertambangan yang tumbuh 54,35% (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada subsektor pertambangan batubara, penggalan gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara sejalan dengan realisasi produksi batubara dalam negeri yang mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batu bara dalam negeri tercatat telah mencapai 671,75 juta ton (101,32%) atau melampaui dari target tahun 2022 yang dipatok sebesar 663 juta ton. Produksi batu bara ini terpantau mencapai rekor tertinggi dan melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada tahun 2019 lalu yakni sebesar 616,2 juta ton. Di samping itu, sektor pertambangan juga tercatat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp173,5 triliun atau sekitar 170% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp101,8 triliun. Kontribusi PNBP di tahun 2022 jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun 2021 sebesar Rp75,48 triliun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi Rp173,5 triliun atau 170% dari target. Besarnya capaian PNBP tersebut dipengaruhi oleh Harga Batu bara Acuan (HBA) yang lebih tinggi dari rata-rata dua tahun terakhir meskipun cenderung turun dari harga puncak batubara yang mencapai USD450/ton pada pertengahan triwulan III-2022 menjadi sekitar USD405/ton pada awal Desember 2022. Untuk ke depannya, HBA diprediksi akan tetap tinggi yang antara lain karena didorong oleh meningkatnya permintaan komoditas tersebut utamanya dari India, Tiongkok, dan beberapa negara

Eropa. Batubara menjadi sumber energi alternatif pembangkit listrik Eropa dan India di tengah terbatasnya pasokan minyak dan gas akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Krisis listrik yang menimpa India akibat gelombang hawa panas menyebabkan pemerintah India meningkatkan jumlah impor batubara karena ketatnya suplai domestik. Selain itu, permintaan batubara Tiongkok sebagai konsumen terbesar batubara dunia juga akan meningkat seiring cuaca yang lebih dingin dan potensi pelanggaran kontrol Covid-19 secara bertahap.

Rasio NPL sektor industri pengolahan tercatat membaik dari 5,18% menjadi 3,77%, sejalan dengan nominal NPL yang menurun sebesar Rp9,06 triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor industri furnitur dan industri pengolahan lainnya serta industri pakaian jadi. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, NPL subsektor industri furnitur dan industri pengolahan lainnya membaik dari 11,75% menjadi 2,95%. Sementara itu, NPL subsektor industri pakaian jadi membaik dari 12,06% menjadi 8,71% meskipun masih tergolong sangat tinggi (>5%). Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya NPL pada subsektor industri pakaian jadi merupakan salah satu dampak berkelanjutan dari pandemi Covid-19 akibat perubahan pola konsumsi masyarakat serta penurunan produksi industri yang padat karya sebagai imbas pembatasan mobilitas. Dampak pandemi Covid-19 bahkan telah menyebabkan subsektor tersebut mengalami kontraksi yang cukup dalam, tidak hanya berpengaruh pada turunnya utilitas produksi industri tetapi juga penurunan jumlah tenaga kerja akibat

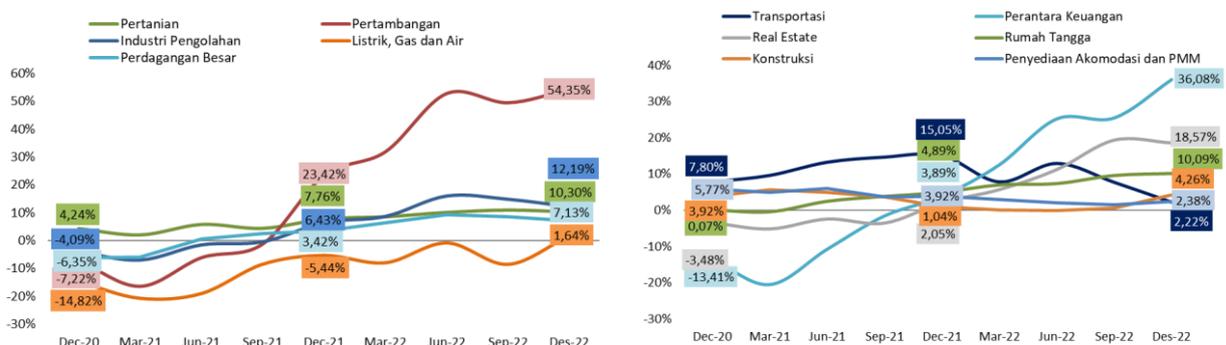
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia saat ini tidak hanya kesulitan untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor agar lebih luas, tetapi juga menghadapi penurunan serapan di pasar domestik, karena juga kalah bersaing dengan produk impor.

Rasio NPL sektor Penyediaan Akomodasi dan PMM tercatat membaik dari 6,34% menjadi 5,37% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,02 triliun (yoy). Hal tersebut sejalan dengan kinerja sektor penyediaan akomodasi dan PMM yang kembali bangkit dan tumbuh positif seiring dengan pelonggaran kebijakan mobilitas masyarakat. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, seiring dengan kondisi Covid-19 domestik yang terus membaik di sepanjang tahun 2022. Kebijakan tersebut juga dinilai akan mendorong ketahanan (resiliensi) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihadapkan dengan ancaman krisis global

serta pemulihan sektor ekonomi terutama pariwisata karena aktivitas masyarakat akan kembali normal. Hal tersebut salah satunya terlihat dari usaha akomodasi termasuk perhotelan yang kembali membaik. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sampai Desember 2022 tercatat terdapat 29.742 usaha akomodasi dengan 788.982 kamar. Jumlah usaha akomodasi tersebut tumbuh sebesar 7,73% (yoy) dibandingkan tahun 2021.

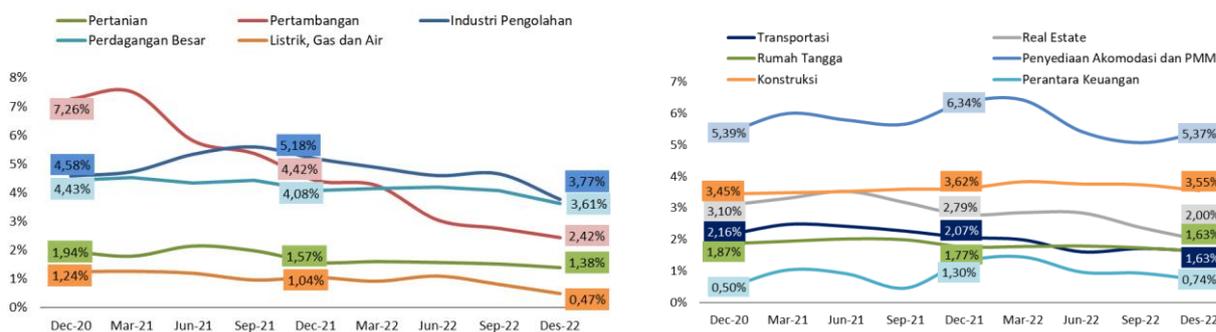
Rasio NPL sektor *real estate* juga tercatat membaik dari 2,79% menjadi 2,00% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,13 triliun (yoy). Secara umum, perbaikan NPL sektor *real estate* turut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja sektor tersebut yang antara lain tecermin dari penjualan properti residensial yang tumbuh sebesar 4,54% (yoy) pada triwulan IV-2022. Selanjutnya dari hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia diperoleh bahwa Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan IV-2022 meningkat sebesar 2,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 1,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Grafik 33 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



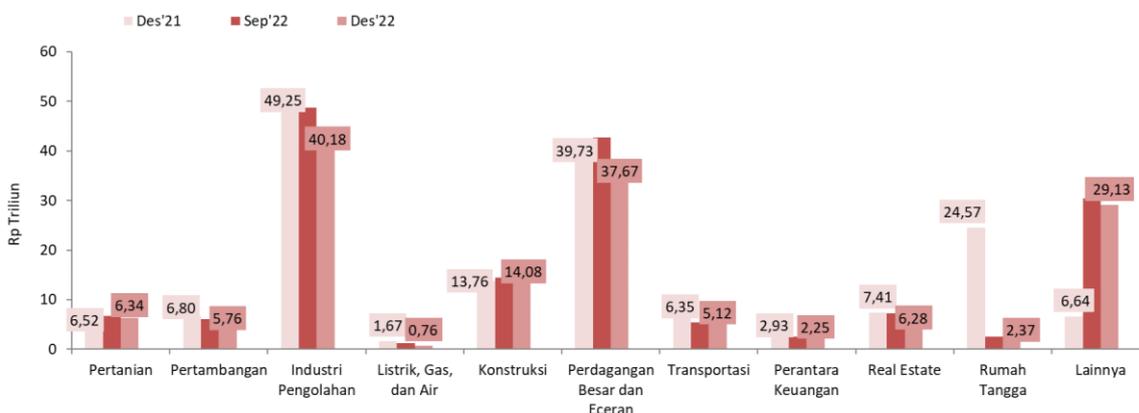
Sumber: SPI Desember 2022, diolah

Grifik 34 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Desember 2022, diolah

Grifik 35 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Desember 2022

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, perbaikan risiko kredit terdapat di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yaitu masing-masing mengalami penurunan NPL dari 3,03%; 3,16%; 2,41%; dan 3,97% menjadi 2,49%; 2,57%; 1,71%; dan 2,66%. Secara umum, penurunan rasio NPL di keempat wilayah tersebut sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi domestik yang masih terus berlanjut dan menunjukkan penguatan sehingga mendorong kenaikan mobilitas masyarakat, pemulihan kinerja, aktivitas sektor usaha, dan meningkatkan permintaan kredit.

Penurunan NPL di wilayah Jawa terutama terdapat pada Provinsi Jawa Tengah (porsi kredit 9,96% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) sebesar Rp1,07 triliun atau secara rasio turun dari 5,28% menjadi 4,51%. Sebagai informasi, selama ini Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki rasio NPL tertinggi di Pulau Jawa. Adapun perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan yang mencatatkan rasio NPL tertinggi sebesar 14,92% (Desember 2022), namun sedikit membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 16,81%. Adapun nominal NPL sektor industri pengolahan pada provinsi tersebut turun sebesar Rp235,23 miliar. Secara struktur, sektor industri pengolahan merupakan

kontributor utama PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 33,96% pada triwulan IV-2022. Selain itu, perbaikan risiko kredit di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh turunnya rasio NPL sektor pertambangan dan penggalian dari 10,98% pada tahun sebelumnya menjadi 0,96%. Dalam hal ini, nominal NPL sektor pertambangan pada provinsi tersebut turun sebesar Rp112,16 miliar.

Selanjutnya, wilayah Sumatera juga tercatat mengalami penurunan nominal NPL yang utamanya didorong oleh provinsi Bengkulu (porsi: 3,36% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) sebesar Rp985,06 miliar atau secara rasio turun dari 4,96% menjadi 1,58%. Secara umum perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran dari 19,84% (Desember 2021) menjadi 2,72% (Desember 2022) dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,00 triliun. Perbaikan rasio NPL sektor perdagangan besar dan eceran tersebut sejalan dengan neraca perdagangan provinsi Bengkulu yang mengalami surplus dan mencatatkan total nilai ekspor sebesar USD17,70 juta. Secara kumulatif, total nilai ekspor provinsi Bengkulu selama periode Januari s.d. Desember 2022 mencapai USD311,22 juta atau meningkat 30,71% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni USD238,10 juta. Jika dilihat menurut komoditas, ekspor provinsi Bengkulu selama 2022 didominasi oleh batubara (porsi: 84,13%) dan karet (porsi 13,87%) dari total ekspor Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2022.

Selain itu, nominal NPL di wilayah Kalimantan juga tercatat menurun yang utamanya

didorong oleh Provinsi Kalimantan Timur (porsi kredit 21,10% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan) sebesar Rp1,37 triliun atau secara rasio turun dari 2,91% menjadi 1,69%. Dalam hal ini, penurunan NPL di provinsi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan rumah tangga. Secara umum perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut seiring dengan perekonomian Kalimantan Timur yang terus tumbuh positif dan diperkirakan akan terus berlanjut. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga ditengarai akan mendorong percepatan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur prioritas lainnya yang secara langsung akan berdampak positif terhadap kinerja sektor konstruksi dan meningkatkan *appetite* investor.

Penurunan nominal NPL juga terlihat pada wilayah Sulawesi sebesar Rp3,30 triliun. Penurunan tersebut utamanya ditopang oleh provinsi Sulawesi Selatan (porsi: 43,92% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi) sebesar Rp3,19 triliun. Dalam hal ini, penurunan NPL di provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, rumah tangga, dan perantara keuangan. Secara umum perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut seiring dengan perekonomian Sulawesi Selatan yang terus tumbuh positif menuju target Pemerintah. Kinerja positif terjadi hampir pada seluruh sektor usaha dan komponen pengeluaran Pemerintah. Perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan salah satunya ditandai dengan surplus neraca perdagangannya yang secara konsisten berlanjut sejak awal 2020 hingga akhir tahun 2022 (memasuki

bulan ke-25). Per Desember 2022, nilai ekspor Sulawesi Selatan tercatat sebesar USD257,69 Juta sedangkan secara kumulatif (Januari s.d. Desember 2022) mencapai USD2,71 miliar atau tumbuh 48,97% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan rasio NPL antara lain: Bali dan Nusa Tenggara serta Papua dan Maluku. Pada Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali dan Nusra), rasio NPL tercatat naik dari 2,66% menjadi 2,71%. Kenaikan rasio NPL Bali dan Nusra antara lain dipengaruhi oleh sektor penyediaan akomodasi dan PMM; perikanan; *real estate*; serta pertanian. Dari keempat sektor tersebut hanya rasio NPL sektor pertanian yang masih tergolong relatif terjaga (<5%) meskipun sedikit meningkat dari 1,59% (Desember 2021) menjadi 1,62% (Desember 2022). Sementara itu, kenaikan rasio NPL pada ketiga sektor lainnya perlu diwaspadai karena tergolong relatif tinggi. Rasio NPL sektor penyediaan akomodasi dan PMM naik dari 7,80% menjadi 9,18%. Rasio NPL sektor

perikanan naik dari 6,57% menjadi 17,11%. Rasio NPL sektor *real estate* naik dari 2,34% menjadi 5,29%.

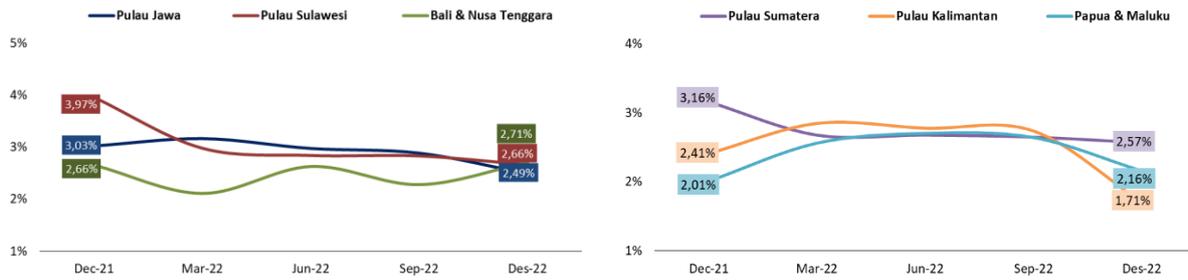
Selanjutnya, pada wilayah Papua dan Maluku juga terjadi kenaikan rasio NPL dari 2,10% menjadi 2,16%. Kenaikan rasio NPL Papua dan Maluku antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya nominal NPL pada sektor transportasi; konstruksi; industri pengolahan; dan rumah tangga. Dari keempat sektor tersebut, sektor konstruksi mencatatkan rasio NPL tertinggi (>5%) yakni dari 11,72% menjadi 12,80%. Sementara itu, rasio NPL pada ketiga sektor lainnya masih tergolong relatif terjaga. Rasio NPL sektor transportasi naik dari 1,21% menjadi 3,57% dan NPL sektor industri pengolahan naik dari 0,45% menjadi 0,61%. Khusus sektor rumah tangga meskipun secara nominal NPL meningkat sebesar Rp11,23 miliar namun demikian rasio kredit bermasalahnya justru membaik dari 1,30% menjadi 1,24%. Adapun kenaikan nominal NPL sektor rumah tangga didorong oleh subsektor kepemilikan rumah tangga lainnya termasuk pinjaman multiguna.

Tabel 22 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Perantara Keuangan	Total
Jawa	1,55%	2,03%	4,37%	0,42%	2,94%	3,41%	1,11%	1,72%	0,72%	2,49%
Sumatera	1,20%	9,15%	1,60%	0,09%	5,07%	4,67%	8,36%	1,54%	2,66%	2,57%
Kalimantan	0,75%	0,70%	0,64%	2,93%	6,06%	4,45%	0,98%	1,47%	1,54%	1,71%
Sulawesi	4,74%	1,22%	5,89%	0,09%	6,34%	3,85%	2,63%	1,61%	1,71%	2,66%
Bali & Nusa Tenggara	1,62%	0,02%	1,94%	0,20%	11,48%	2,75%	3,16%	1,27%	1,41%	2,71%
Papua & Maluku	0,60%	0,04%	0,61%	5,15%	12,80%	3,27%	3,57%	1,24%	0,42%	2,16%
Total	1,38%	2,42%	3,77%	0,47%	3,55%	3,61%	1,63%	1,63%	0,74%	2,44%

Sumber: SPI Desember 2022, diolah

Grafik 36 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)

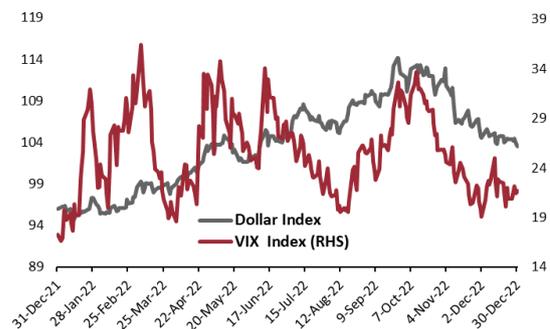


Sumber: SPI Desember 2022

3. Risiko Pasar

Pada Tekanan di pasar keuangan global mulai mereda pada akhir triwulan IV-2022 meski masih diliputi ketidakpastian global. Hal tersebut didorong oleh pemulihan kondisi ekonomi beberapa negara termasuk Indonesia yang masih tumbuh cukup baik serta kondisi ekonomi Tiongkok pasca berakhirnya kebijakan *Zero-Covid Policy* yang dipercaya dapat menahan perlambatan ekonomi global lebih lanjut. Meski demikian, faktor ketidakpastian global masih tetap perlu diwaspadai seiring dengan adanya tekanan geopolitik serta berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter seiring tingkat inflasi yang masih cukup tinggi meski mulai melambat. Pengetatan kebijakan moneter dengan kenaikan suku bunga acuan global berpotensi membuat arus pembalikan modal dari negara *emerging* ke negara maju, khususnya ke pasar keuangan AS (*dollar USD* sebagai *safe-haven asset*) yang kemudian dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Kenaikan tekanan di pasar keuangan global ini tecermin dari naiknya index volatilitas dan memicu penguatan *dollar index*.

Grafik 37 Dolar Index dan VIX Index

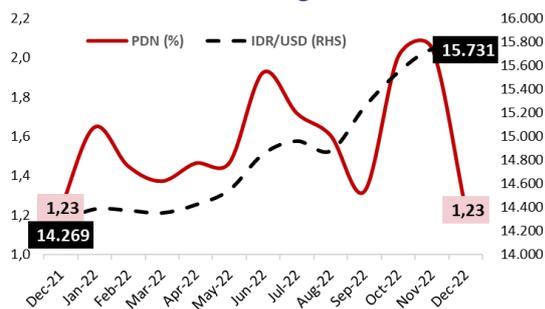


Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

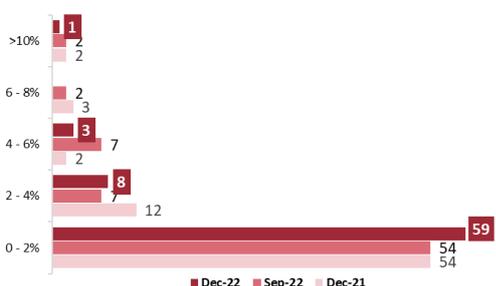
Pada akhir Desember 2022, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp15.731/USD, melemah 10,25% dari posisi akhir Desember 2021 sebesar Rp14.269/USD. Meski demikian, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada Desember 2022 masih terjaga rendah dan stabil sebesar 1,23% dan berada pada posisi *long* (kewajiban valas yang dimiliki bank lebih rendah dibandingkan aset valasnya). Hal tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (59 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 38 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 39 Distribusi Komposisi PDN Perbankan

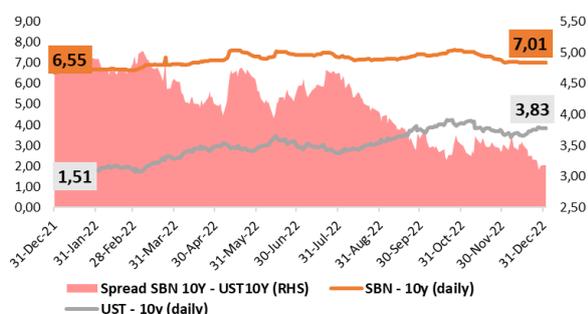


Sumber: Bank Indonesia

3.2 Risiko Suku Bunga

Sejalan dengan naiknya FFR dalam merespon tingginya inflasi di AS, *yield Treasury* AS (UST) juga menunjukkan peningkatan pada akhir tahun 2022. Kenaikan tersebut berdampak pada menyempitnya *spread yield* UST dengan *yield* SBN yang dapat memengaruhi terbatasnya aliran arus modal asing masuk ke domestik.

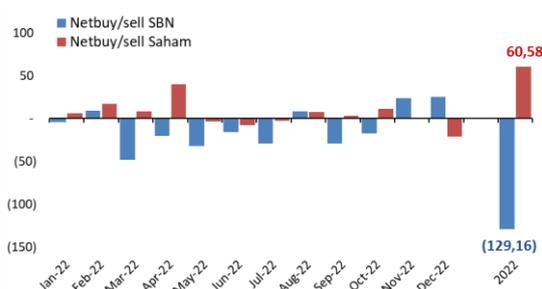
Grafik 40 Spread Yield UST dan SBN



Sumber: PHEI dan Reuters

Indikasi tersebut ditunjukkan oleh transaksi investor non residen di pasar SBN yang mencatatkan *capital outflow* selama setahun terakhir atau *net sell* sebesar Rp129,16 triliun. Meskipun demikian, pelemahan lebih dalam tertahan oleh masuknya modal asing di pasar saham yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp60,58 triliun.

Grafik 41 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



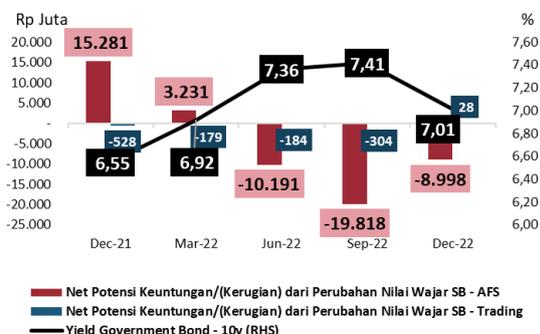
Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* meningkat sejalan dengan naiknya *yield* obligasi. Pada Desember 2022, *yield* obligasi meningkat dibandingkan dengan posisi tahun lalu (Desember 2021) sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank menurun. Potensi kerugian nilai wajar surat berharga kategori *trading* dan *Available For Sale* (AFS) akibat kenaikan *yield* sebesar Rp8,97 triliun, dibandingkan dengan posisi tahun lalu yang masih mencatatkan potensi keuntungan sebesar Rp14,75 triliun (disetahunkan).

Namun demikian, perbankan memitigasi potensi kerugian tersebut dengan (1) menyesuaikan portofolio surat berharga dengan mengurangi porsi/nominal kepemilikan kategori AFS ke kategori *Hold to Maturity* (HTM), dan (2) mengalihkan kepemilikan surat berharga ke tenor jangka

pendek yang memiliki risiko suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan tenor jangka panjang.

Grafik 42 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan



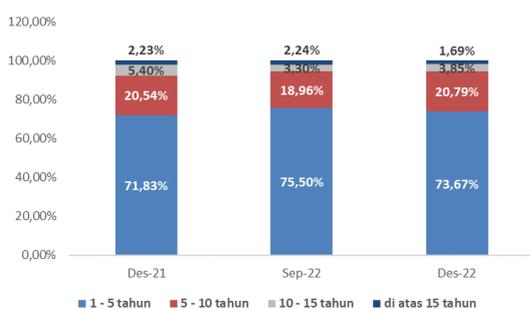
Sumber: Reuters dan LBU

Tabel 23 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)		Porsi SSB (%)	
	Des-21	Des-22	Des-21	Des-22
AFS	1.042,90	892,42	56,96%	47,89%
Trading	99,29	100,32	5,42%	5,38%
HTM	688,78	870,76	37,62%	46,73%
Total Industri	1.830,97	1.863,50	100%	100%

Sumber: LBU/LBUT

Grafik 43 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (Trading dan AFS) berdasarkan Tenor

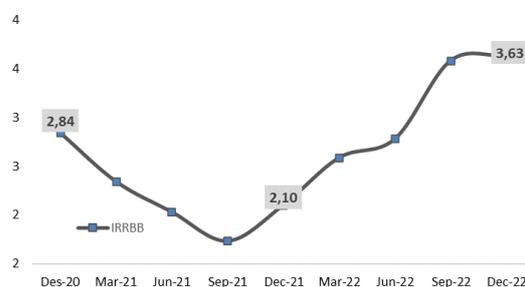


Sumber: LBU/LBUT

Di sisi lain, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 3,63%, meski meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,10%. Peningkatan IRRBB didorong oleh meningkatnya kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang tumbuh

122,74% (yoy) utamanya dalam bentuk kenaikan pinjaman yang diterima dan simpanan berjangka. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang juga meningkat dengan pertumbuhan 28,99% (yoy) yang utamanya didorong oleh kenaikan kredit. Sementara itu, aset jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -2,44% (yoy), jauh menurun dari tahun lalu yang tumbuh 27,07% (yoy).

Grafik 44 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

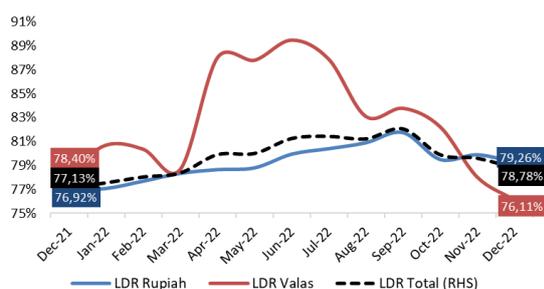
4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai di tengah naiknya pertumbuhan kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio LCR di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih berada di atas *threshold* (100%). Meski demikian, perlu diperhatikan adanya kenaikan pada volume transaksi PUAB yang juga diiringi dengan kenaikan suku bunga yang dapat mengindikasikan

adanya kebutuhan dana jangka pendek oleh Bank.

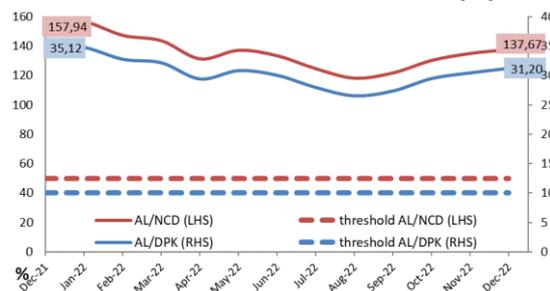
Pada Desember 2022, LDR perbankan tercatat sebesar 78,78%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 77,13%. Peningkatan LDR didorong oleh naiknya LDR rupiah menjadi 79,26% dari tahun sebelumnya sebesar 76,92%. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 137,67% dan 31,20%, masih terjaga jauh berada di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), meskipun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 157,94% dan 35,12%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh terkontraksinya alat likuid seiring meningkatnya penyaluran kredit serta naiknya kebutuhan penempatan dana di Bank Indonesia dalam pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM). Hal ini dikarenakan per 1 September 2022 lalu, pemenuhan GWM Rupiah naik menjadi 9% dari 7,5% pada Juli 2022 (untuk BUK), dan menjadi 7,5% dari 6,0% (untuk BUS dan UUS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Grafik 45 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBUT

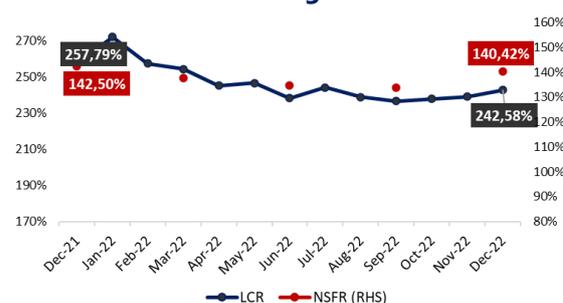
Grafik 46 AL/NCD dan AL/DPK (%)



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 242,58% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 257,79%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh lebih tinggi sebesar 14,64% (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan *High Quality Liquid Asset* (HQLA) sebesar 7,88% (yoy). Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 140,42%, meski lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 142,50%. Pada Desember 2022, tidak terdapat bank yang memiliki rasio LCR maupun NSFR di bawah *threshold* 100%.

Grafik 47 Perkembangan LCR dan NSFR



Sumber: APOLO

Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Dec-21	Sep-22	Dec-22
KBMI 2	345	401	412
KBMI 3	671	639	669
KBMI 4	1.459	1.365	1.592
Bank Asing	111	117	116
TOTAL HQLA	2.585	2.522	2.789

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Dec-21	Sep-22	Dec-22
KBMI 2	113	145	152
KBMI 3	273	286	297
KBMI 4	573	592	657
Bank Asing	44	44	44
TOTAL NCO	1.003	1.067	1.150

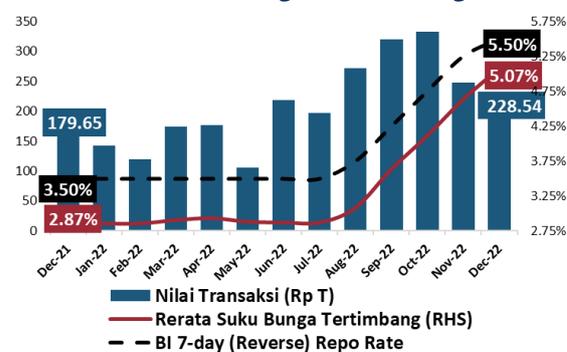
Kelompok	LCR (%)		
	Dec-21	Sep-22	Dec-22
KBMI 2	306,13	277,07	270,41
KBMI 3	246,09	223,87	225,13
KBMI 4	254,48	230,69	242,46
Bank Asing	249,76	262,61	265,85
LCR Industri	257,79	236,49	242,58

Sumber: OJK

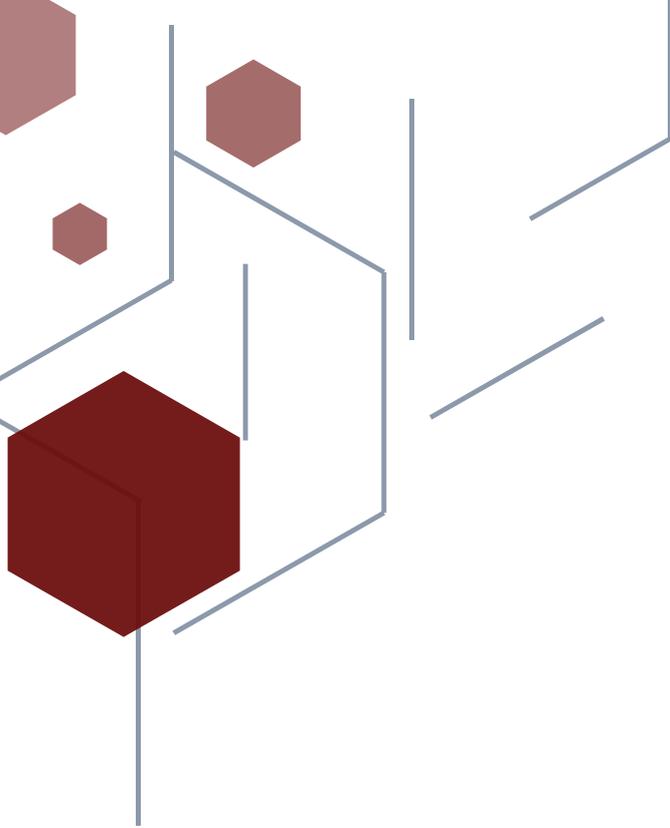
Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar

Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, dengan volume yang meningkat diiringi suku bunga rata-rata tertimbang yang juga meningkat. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan keputusan BI meningkatkan suku bunga acuan BI *7-Days Repo Rate* (BI7DRR) sepanjang tahun 2022 sebesar 200 bps menjadi 5,50%. Selain itu, meningkatnya volume transaksi PUAB juga antara lain dapat dipengaruhi oleh naiknya pemenuhan kewajiban GWM BI.

Grafik 48 Perkembangan Suku Bunga PUAB

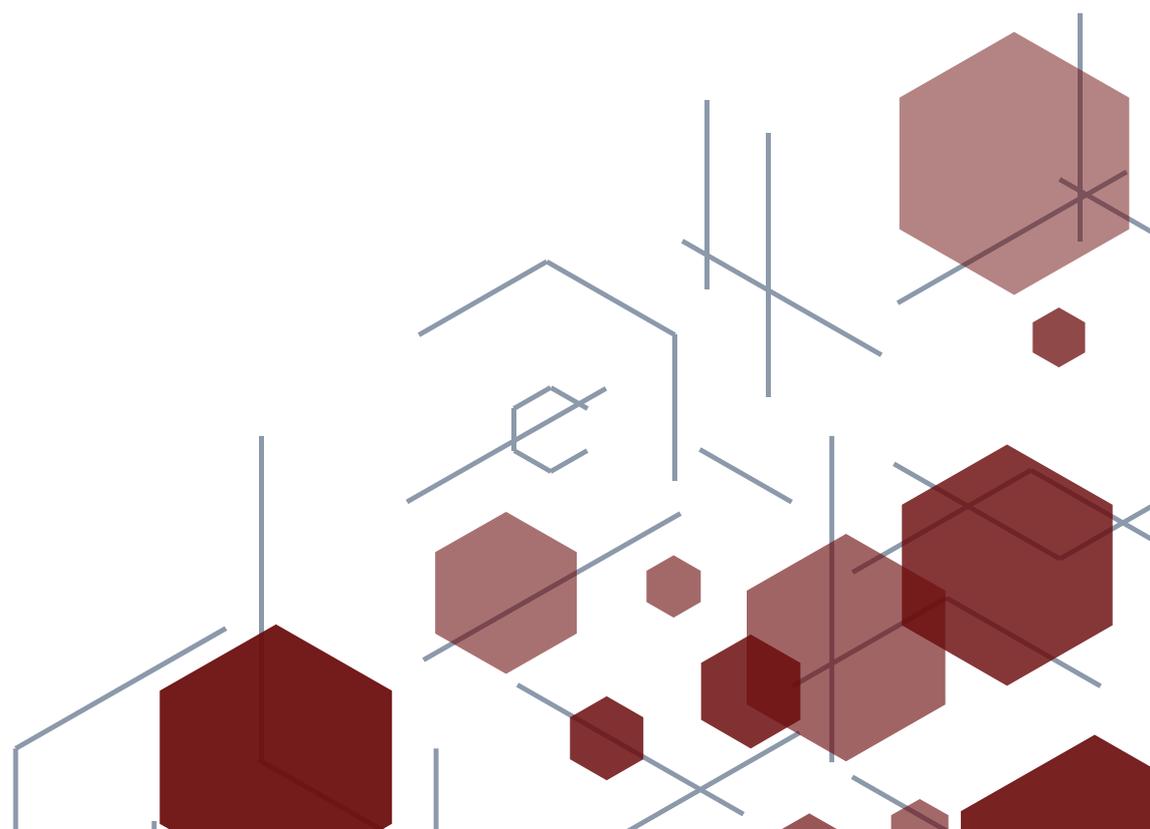


Sumber: LHBU dan LBUT Harian



Bab IV

Pengawasan Perbankan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengawasan Perbankan

Secara umum kondisi perbankan pada semester II-2022¹ cukup terjaga, antara lain tecermin dari risiko yang *manageable* serta ditopang tata kelola yang baik. Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan bank, OJK secara aktif memantau tingkat kepatuhan bank serta melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan bank, antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan dan penyusunan kajian penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko dan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*.

1. Penilaian Risiko Operasional²

Pada semester II-2022, risiko operasional sebagian besar bank umum tergolong moderat. Sesuai hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan peningkatan risiko operasional antara lain tingginya *turn over* pegawai, *fraud*, *human error*, dan kelemahan pada pengendalian Teknologi Informasi. Untuk memitigasi terjadinya *fraud*, bank secara umum **meningkatkan *internal control* baik di kantor cabang maupun di pusat**. Selain itu, OJK juga mewajibkan seluruh bank untuk memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan hasil implementasinya disampaikan kepada OJK setiap semester³. Strategi meminimalisasi kejadian *fraud* mencakup upaya pencegahan dan deteksi dini, melakukan investigasi, serta

memperbaiki sistem pengendalian internal bank.

2. Penilaian Tata Kelola Perbankan⁴

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi, dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

-
- ¹ Penggunaan periode waktu untuk hasil pengawasan pada triwulan IV-2022 dan Semester II-2022 dilakukan untuk maksud yang sama.
 - ² Rating penilaian risiko operasional yaitu: 1=*Low*; 2=*Low to moderat*; 3=*Moderat*; 4=*Moderat to high*; 5=*High*. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan risiko operasional bank rendah.
 - ³ Kewajiban penyampaian laporan Strategi *Anti Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.
 - ⁴ *Rating* penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah *rating* semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

Penilaian tata kelola Bank Umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sedangkan penilaian tata kelola BPR dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan Desember. Salah satu aspek penilaian penerapan tata kelola BPR adalah pemenuhan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dipantau oleh pengawas melalui penyampaian laporan bulanan oleh BPR kepada OJK. Pada periode ini penilaian tata kelola yang akan dibahas adalah tata kelola pada BPR.

2.1 Bank Umum

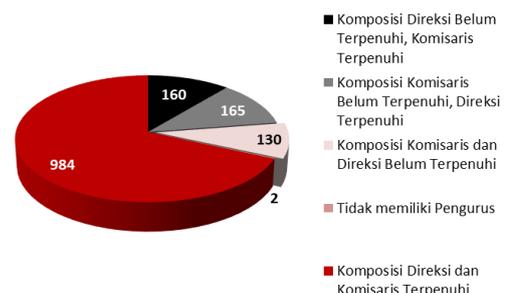
Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Pada semester II-2022, implementasi GCG oleh Bank Umum sebagian besar tergolong baik. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa bank telah melaksanakan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness* (TARIF) pada penerapan GCG secara memadai serta memiliki *governance structure* yang baik dan mendukung terlaksananya proses *corporate governance* sehingga menghasilkan *outcome* yang memadai sesuai dengan harapan *stakeholders*.

2.2 BPR dan BPRS

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. Besaran modal inti BPR akan menentukan syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembentukan unit kerja/fungsi, serta komite. Dalam hal ini, BPR dengan modal inti \geq Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal inti $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan GCG yang lebih baik dan memadai.

Grafik 49 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

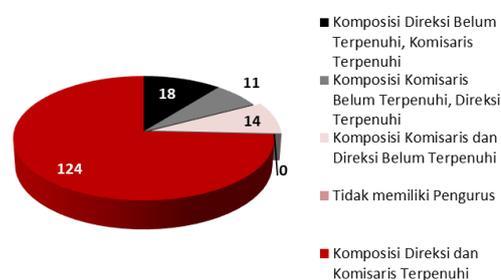
Pada triwulan IV-2022, terdapat 984 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan, meningkat dari 973 BPR pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, masih terdapat 130 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

Untuk BPRS, penerapatan tata kelola di atur dalam POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sama halnya dengan BPR, besaran modal inti BPRS akan menentukan syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, jumlah DPS, pembentukan komite, serta pelaksanaan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan. Dalam hal ini, BPRS dengan modal inti \geq Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal inti $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pada triwulan IV-2022, terdapat 124 BPRS yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 14 BPRS yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan.

Grafik 50 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

3. Penegakan Kepatuhan Perbankan

3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan IV-2022, terdapat lima kantor Bank dengan delapan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya, terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan berjalan maupun pada periode sebelumnya, sedang diproses sebanyak lima kantor Bank dengan delapan PKP, dan dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK sebanyak empat kantor dengan enam PKP.

Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV-2022					
	Bank Umum		BPR		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1. PKP yang diterima	2	3	3	5	5	8
2. PKP dalam proses *)	3	4	2	4	5	8
3. PKP yang dikembalikan *)	-	-	-	-	-	-
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	-	-	4	6	4	6

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi PKP yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan Bank, pada periode laporan telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap tiga kantor bank.

3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama triwulan IV-2022, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan 11 pemberian keterangan Ahli dan satu pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas delapan permintaan dari Polri dan tiga permintaan dari internal OJK. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas satu permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada triwulan IV-2022 masih dilakukan secara *virtual* dan *hybrid* untuk menjangkau lebih banyak pihak. Dalam upaya mendorong peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) secara efektif pada Rezim APU PPT, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* penerapan program APU PPT bagi PJK. Kegiatan tersebut berupa kegiatan yang diselenggarakan OJK, undangan PJK, dan sinergi OJK dengan Asosiasi PJK. Kegiatan *capacity building* bagi PJK pada triwulan IV-2022 diantaranya OJK menjadi narasumber, antara lain pada:

1. *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan (WSP APU PPT) Tahun 2022 – Batch II bagi BPR dan LKM;
2. Sosialisasi Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/S);
3. Kegiatan Mitigasi Risiko, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta Tantangan Penerapan Program APU-PPT di Era Transformasi Digital Perbankan ;

4. Kegiatan *Recycling* Pasar Modal semester II-2022 dan *Recycling* Bank Umum di wilayah kerja Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara;
5. *National Trainers Webinar on Countering the Financing of Terrorism* 2022.

OJK terus mengupayakan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) oleh Pengawas sebagaimana Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas memiliki standar profesional dan integritas dan keahlian yang tinggi. Sertifikasi CAMS telah dilaksanakan untuk Pengawas Sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun IKNB, serta perwakilan grup terkait APU dan PPT.

Sebagai upaya penguatan penerapan program APU PPT, pada triwulan IV-2022 OJK telah menyampaikan surat himbauan kepada PJK terkait Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut dalam rangka mempermudah PJK untuk memperoleh basis data (*database*) terkait terduga teroris serta sebagai media percepatan pertukaran informasi terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). PPATK telah mengembangkan Aplikasi SIPENDAR dengan dasar hukum implementasi berupa Peraturan Kepala PPATK (Perka) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme. Peluncuran Aplikasi SIPENDAR merupakan bentuk komitmen dan kerja nyata Pemerintah dalam

menanggulangi terorisme termasuk pendanaannya.

Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) merupakan sistem informasi berbasis *web* yang digunakan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi). OJK telah membangun SIGAP sejak tahun 2017 yang diikuti dengan pengembangan sampai dengan saat ini. SIGAP merupakan sistem pendukung siklus pengawasan program APU PPT oleh Pengawas Sektor Jasa Keuangan (*Supervisory Technology*) serta sistem yang berguna untuk penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT yang dapat digunakan oleh PJK (*Regulatory Technology*).

Dari sisi *Supervisory Technology*, SIGAP merupakan aplikasi yang bersifat “rumah tumbuh” di mana pembangunan disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT terkini, baik secara nasional maupun internasional. Dari sisi pengawasan, telah dilakukan integrasi antara SIGAP dengan beberapa sistem pelaporan *online* (APOLO, *e-reporting*, ARIA, ANTASENA) untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme/ Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU/TPPT/PPSPM) yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan rencana pengawasan. Data yang

telah dilaporkan oleh PJK diintegrasikan ke dalam Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SIGAP melalui *database* sehingga Pengawas tidak perlu menginput data secara manual dan dapat memperoleh risiko TPPU/TPPT/PPSPM dengan lebih mudah serta lebih valid. Integrasi telah dilakukan terhadap beberapa jenis PJK antara lain termasuk untuk Bank Umum dan Bank Kustodian. Sementara untuk BPR/BPRS sistem pelaporan yang mencakup data yang dibutuhkan dalam rangka penilaian risiko TPPU/TPPT masih dalam tahap pengembangan. Secara khusus bagi Bank Umum, integrasi dilakukan pula dengan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang merupakan sistem pelaporan yang dikelola Bank Indonesia dan sistem informasi BI lainnya, mengingat terdapat cakupan data dari Bank Umum yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Selanjutnya, untuk kebutuhan perizinan dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, pada tahun 2022, cakupan pengembangan pada Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) yakni integrasi antara SIPUTRI dengan SIGAP untuk cakupan data terkait APU PPT untuk badan hukum dan orang perseorangan juga terus dilakukan. Data dari SIGAP yang diintegrasikan adalah Data DTTOT, Data *Politically Exposed Person* (PEP), dan Daftar PPSPM. Dengan semakin luasnya pemanfaatan data-data terkait APU PPT, maka hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak positif pada penerapan program APU PPT khususnya dari sisi pengawasan dan perizinan SJK yang semakin ketat dan memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan dalam rangka menyampaikan:

1. DTTOT atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
2. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Implementasi SIGAP bagi PJK berlaku efektif sejak akhir triwulan III-2020 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (SEOJK DTTOT) dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SEOJK Proliferasi), yang juga telah mendapat respon baik dari PJK.

Penyampaian data DTTOT dan Daftar Proliferasi melalui SIGAP merupakan salah satu bentuk pemenuhan prinsip *freezing without delay* di mana proses pemblokiran

dilakukan secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam kedua daftar dimaksud, sehingga pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat sebagaimana diatur pada SEOJK DTTOT dan SEOJK Proliferasi. Berdasarkan hasil pemantauan per 26 Desember 2022, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi SIGAP adalah 98,32% atau 2.863 PJK dari total keseluruhan 2.912 PJK.

Pada triwulan IV-2022 telah dilakukan satu kali penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu DTTOT/P-13/30/X/RES.6.1./2022 tanggal 14 Oktober 2022. Berdasarkan hasil monitoring pada SIGAP (*cut off* per 26 Desember 2022) diketahui terdapat 71,40% PJK perbankan yang telah melakukan tindak lanjut atas DTTOT tersebut.

4. Pengembangan Pengawasan Perbankan

4.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan Bank Umum pada triwulan IV-2022, mencakup antara lain:

1. Penyusunan ketentuan internal terkait pedoman pengawasan Bank Umum yang bersifat *principle based* untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Bank Umum berdasarkan risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Penyusunan panduan teknis bagi pengawas dalam melakukan pengawasan Bank berdasarkan risiko untuk mendukung pengawasan yang *streamline* dengan kajian dan penerbitan ketentuan yang *agile* dan adaptif serta berbasis risiko.
3. Penyusunan kajian penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko dan metodologi penilaian *risk-*

based bank rating dengan mempertimbangkan *emerging risk* al. *climate risk*, *cyber* dan *IT risk*, serta *emerging risk* lainnya serta kajian penempatan *emerging risk* tersebut pada penilaian *risk-based bank rating*.

4. Penguatan *tools* pengawasan Bank Umum melalui penambahan fitur dan data pada sistem informasi pengawasan Bank Umum.

4.2 BPR dan BPRS

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR dan BPRS yang telah dilakukan selama triwulan IV-2022, mencakup antara lain:

1. Penyusunan beberapa pedoman internal, antara lain terkait: (i) penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS; (ii) pemeriksaan BPR dan BPRS; dan (iii) penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
2. Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS
OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui *repository*. Pemantauan penyampaian data OBOX dilakukan secara dwimingguan. Selama triwulan IV-2022, telah dilakukan pemantauan selama enam periode serta telah dilakukan finalisasi kajian *enhancement* OBOX BPR BPRS.
3. Penyusunan Kajian Penguatan Proses Bisnis dan Sistem Informasi Pengawasan BPR BPRS
Pada penyusunan kajian ini, dilakukan proses identifikasi, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi atas proses

bisnis serta sistem informasi terkait pengawasan BPR/BPRS. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi proses bisnis pengawasan yang efektif dan efisien, serta sistem informasi yang optimal untuk mendukung proses pengawasan BPR/BPRS.

4.3 Perbankan Syariah

Selain kegiatan pengembangan pengawasan BPRS yang dilakukan bersama BPR sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah lainnya pada triwulan IV-2022 antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan pedoman internal pengawasan BPRS terkait manajemen risiko dan proses pemeriksaan umum BPRS dalam rangka mendukung ketentuan penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan risiko.
2. Penyusunan SPO Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai pedoman bagi pengawas dan bagian perizinan dalam rangka proses pemisahan UUS.
3. Pengkinian pedoman internal pengawasan BPRS terkait Rencana Bisnis

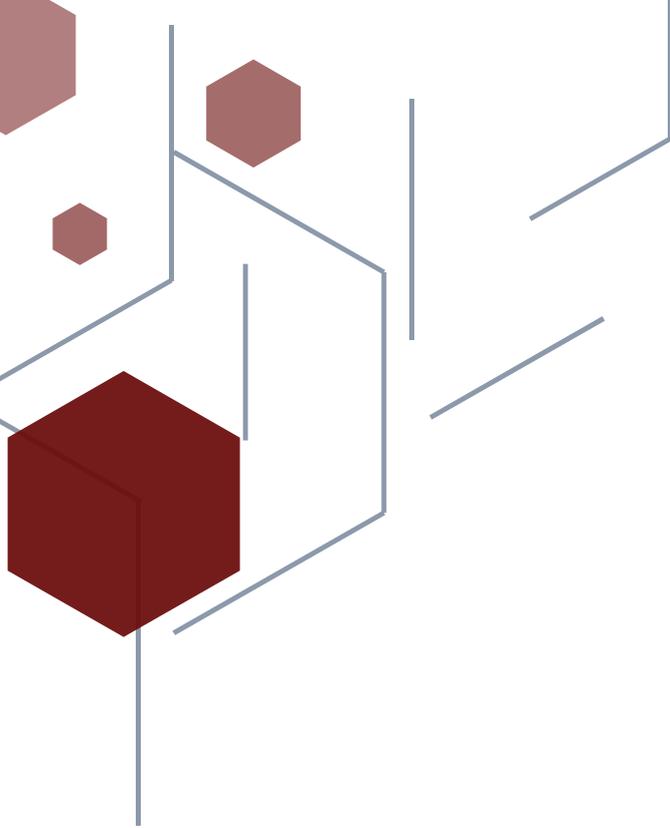
Bank (RBB) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas BPRS.

4. Penyusunan kajian terkait evaluasi penyaluran KUR pada BPRS dan pengawasan Grup BPR/BPRS.

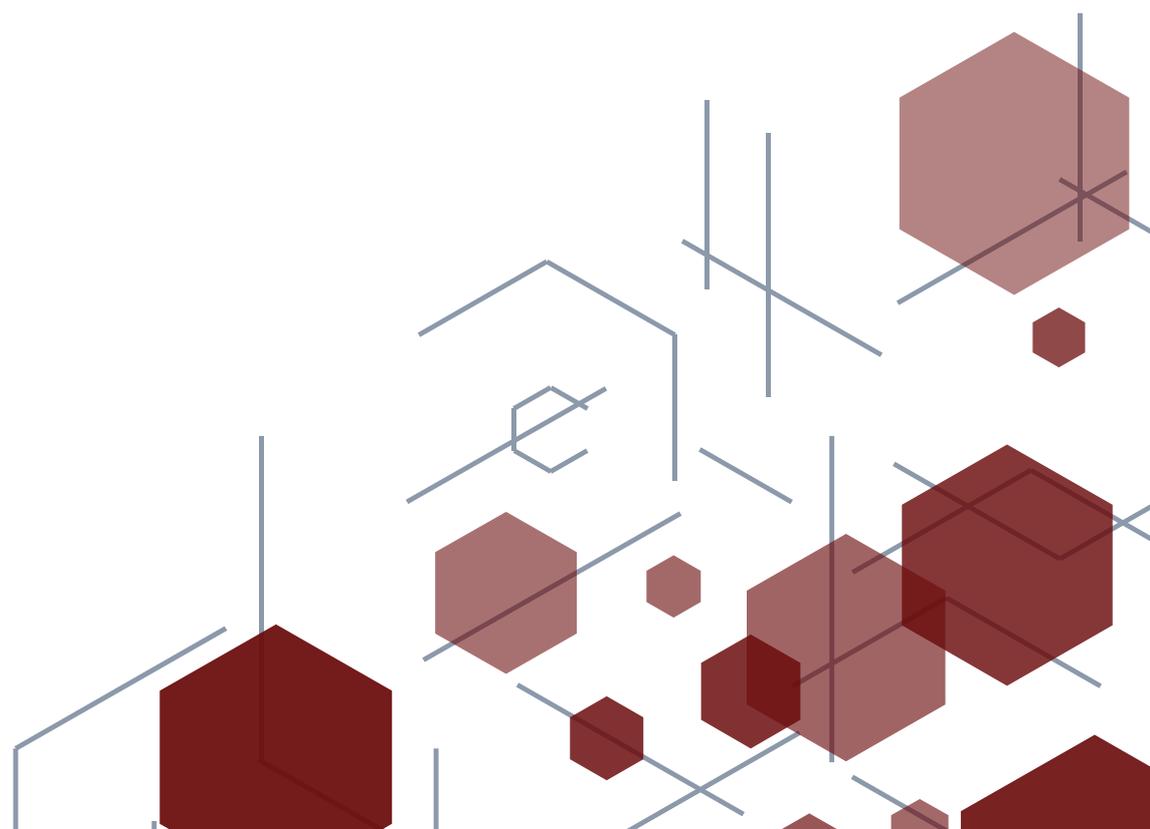
4.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan IV-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi secara berkala dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan serta pembahasan isu-isu lintas sektor.
2. Penyusunan ketentuan internal pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terhadap konglomerasi keuangan.



Bab V
Pengaturan dan
Kelembagaan
Perbankan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan 11 ketentuan perbankan mencakup tujuh POJK dan empat SEOJK. Selain itu, OJK juga mengeluarkan satu KDK OJK dan empat Surat KEPP kepada industri perbankan. OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan IV-2022, OJK menerbitkan 11 ketentuan perbankan terdiri dari tujuh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan empat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), sebagai berikut:

Tabel 26 Ketentuan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan IV-2022

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal	Objek Pengaturan
1	POJK Nomor 18 Tahun 2022	Perintah Tertulis	14 Oktober 2022	Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan LKKNB)
2	POJK Nomor 19 Tahun 2022	Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana	27 Oktober 2022	Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan LKKNB)
3	POJK Nomor 22 Tahun 2022	Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum	1 November 2022	Bank Umum
4	POJK Nomor 23 Tahun 2022	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	23 November 2022	BPR
5	POJK Nomor 24 Tahun 2022	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum	25 November 2022	Bank Umum
6	POJK Nomor 26 Tahun 2022	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	26 Desember 2022	BPRS
7	POJK Nomor 27 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum	26 Desember 2022	Bank Umum Konvensional
8	SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum	7 Desember 2022	Bank Umum Konvensional
9	SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	22 Desember 2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
10	SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2022	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum	22 Desember 2022	Bank Umum
11	SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022	Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum	27 Desember 2022	Bank Umum

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

Pada triwulan yang sama, OJK juga mengeluarkan satu Keputusan Dewan Komisiner (KDK) OJK yaitu KDK OJK Nomor

34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk

Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank. Selain itu, terdapat empat Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK yang ditujukan kepada industri perbankan, yaitu:

1. Surat Nomor S-14/D.03/2022 perihal Dukungan Perbankan terhadap Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB), tanggal 19 Oktober 2022;
2. Surat Nomor S-15/D.03/2022 perihal Dukungan Perbankan Syariah terhadap Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB), tanggal 19 Oktober 2022;
3. Surat Nomor S-17/D.03/2022 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisiner OJK No.34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, tanggal 28 November 2022 (surat ini ditujukan kepada seluruh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah); dan
4. Surat Nomor S-18/D.03/2022 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisiner OJK No.34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, tanggal 28 November 2022 (surat ini ditujukan kepada seluruh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2022, telah diselesaikan 17 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat, perubahan status, dan perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa peningkatan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Kantor Cabang (KC) sebanyak enam perizinan.

Adapun pada periode laporan terdapat persetujuan permohonan perubahan nama bank atas PT Bank Bisnis Internasional Tbk menjadi PT Krom Bank Indonesia Tbk. Selain itu, juga terdapat pencabutan izin usaha Bangkok Bank PCL pada tanggal 29 November 2022.

Tabel 27 Perizinan BUK

NO.	JENIS KEGIATAN	TW IV - 2022
1	Pembukaan Bank Umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	b. Kantor Cabang (KC)	4
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	d. Kantor Fungsional (KF)	-
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-
2	Penutupan Bank Umum	
	a. Izin Usaha	1
	b. Kantor Perwakilan	-
	c. Kantor Cabang (KC)	4
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3	Pemindahan Alamat Bank Umum	
	a. Kantor Pusat (KP)	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	-
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4	Perubahan Status Bank Umum	
	a. Peningkatan Status	
	- KCP menjadi KC	6
	- KK menjadi KCP	-
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	-
	- KCP ke KF/KK	-
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	1
6	Perubahan Badan Hukum	-
7	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8	Izin Bank Devisa	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
	Jumlah	17

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2022, terdapat 122.364 jaringan kantor BUK, terdiri dari 122.308 jaringan kantor di dalam negeri dan 56 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh

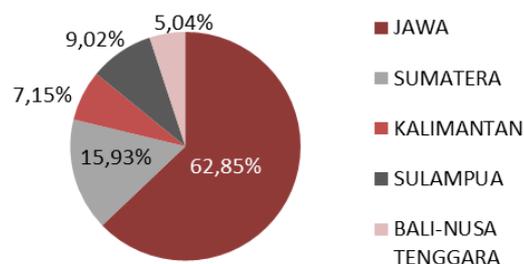
terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 94.016 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan sebanyak 137 jaringan kantor, dengan peningkatan terbanyak pada

terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM).

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 76.874 jaringan kantor (62,85%), diikuti pulau Sumatera 19.486 (15,93%), Sulampua 11.037 (9,02%), Kalimantan 8.751 (7,15%), dan Bali-Nusa Tenggara 6.160 (5,04%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat di

wilayah Jawa sejumlah 115 jaringan kantor, sementara penurunan jaringan kantor terdapat di wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Kalimantan masing-masing berkurang 16 jaringan kantor dan 3 jaringan kantor.

Grafik 51 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

Tabel 28 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2022 TW III	2022 TW IV	Δ
1 Kantor Pusat Operasional	40	39	(1)
2 Kantor Pusat Non Operasional	54	55	1
3 Kantor Cabang Bank Asing	8	7	(1)
4 Unit Usaha Syariah	20	20	-
5 Kantor Wilayah	148	144	(4)
6 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.730	2.737	7
7 Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	20.218	20.162	(56)
10 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11 Kantor Fungsional	1.127	1.129	2
12 Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk 11,12,13,14	12	12	-
13 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	-
14 Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	93.835	94.016	181
JARINGAN KANTOR UUS			-
15 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	177	180	3
16 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	191	200	9
17 Kantor Kas	59	58	(1)
18 Kantor Fungsional	11	11	-
19 <i>Payment Point</i>	90	86	(4)
20 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	25	25	-
21 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	197	200	3
22 Layanan Syariah Bank Umum	3.234	3.231	(3)
TOTAL	122.227	122.364	137

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan oleh Bank yaitu perbaikan kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (deposan) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik dan pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta

industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, OJK melakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengurus bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan IV-2022, telah dilakukan klarifikasi/wawancara PKK kepada 59 calon PSP/PSPT, Komisaris, dan Direksi BUK, dengan pemohon terbanyak untuk calon Direksi sebanyak 39 pemohon.

Tabel 29 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BUK

Pemohon PKK	Total
PSP/PSPT	1
Komisaris	19
Direksi	39
Total	59

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2022, telah diselesaikan 44 perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status kantor BUS/UUS. Perizinan tersebut

sebagian besar merupakan pemindahan alamat kantor BUS/UUS sebanyak 20 permohonan.

Selanjutnya, terdapat satu izin pengambilalihan (akuisisi) BUS, satu izin usaha pendirian BPRS dan satu izin perubahan kegiatan usaha (konversi) BPR menjadi BPRS yang telah disetujui OJK.

Tabel 30 Perizinan Perbankan Syariah

Jenis Perizinan	Jumlah Perizinan Selesai (Disetujui)	
	BUS	UUS
Jaringan Kantor		
Pembukaan		
- Kantor Cabang (KC)/KC Syariah (KCS)		5
- Kantor Cabang Pembantu (KCP)/KCP Syariah (KCPS)		
- Kantor Kas (KK)/KK Syariah (KKS)		
- Kantor Fungsional (KF)/KF Syariah (KFS)	2	
- Kantor Wilayah (Kanwil)		
- KC (operasional)/KCS di Luar Negeri	1	
- Kantor Perwakilan BUS di Luar Negeri (non operasional)		
Penutupan		
- KC/KCS	3	
- KCP/KCPS		
- KK/KKS		
- KF/KFS		
- Kanwil		
- KC/KCS di Luar Negeri		
- Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	1	
Pemindahan Alamat		
- Kantor Pusat (KP)/Kantor Induk Kegiatan UUS		
- Kantor Wilayah (Kanwil)		
- KC/KCS	6	5
- KCP/KCPS	9	
- KK/KKS		
- KF/KFS		
- KC/KCS di Luar Negeri		
Peningkatan Status		
- KCP/KCPS/KK/KKS menjadi KC/KCS	4	2
- KK/KKS menjadi KCP/KCPS	2	
Penurunan Status		
- KC/KCS menjadi KCP/KK/KCPS/KKS	1	
- KCP/KCPS menjadi KK/KKS		
- KCPS menjadi KK		
Kelembagaan BUS/BPRS		
Akuisisi BUS		1
Izin Usaha Pendirian BPRS		1
Konversi		
- BPR menjadi BPRS		1
TOTAL	44	

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan yang menjadi kewenangan di Kantor Pusat.

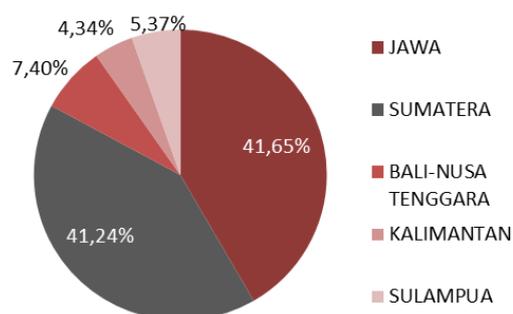
2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2022, terdapat 6.776 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (satu KC, satu kantor perwakilan dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat penurunan 8.267 jaringan kantor BUS seiring berlakunya POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, di mana untuk tiga jenis kantor yaitu kantor kas, *payment point*, dan kas keliling serta layanan syariah tidak lagi wajib dilaporkan pada jaringan kantor di APOLO sehingga jumlah kantor BUS posisi triwulan IV-2022 menurun.

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar masih berada di wilayah Jawa

(41,65%, 2.821 kantor), diikuti Sumatera (41,24%, 2.793 kantor), Bali-Nusa Tenggara (7,40%, 501 kantor), Sulampua (5,37%, 364 kantor), dan Kalimantan (4,34%, 294 kantor). Penurunan jaringan kantor terdapat pada semua wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa dan Sumatera berupa layanan syariah bank umum.

Grafik 52 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK

Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2022		Δ
	TW III	TW IV	
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	7	7	-
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	17	17	-
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	488	378	(110)
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	1	1	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.289	1.603	314
7 Kantor Kas Bank Umum Syariah	181	12	(169)
8 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	199	343	144
9 Payment Point Bank Umum Syariah	2.833	-	(2.833)
10 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	144	5	(139)
11 Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	1	1	-
12 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	4.339	4.397	58
13 Layanan Syariah Bank Umum	5.538	6	(5.532)
Layanan Syariah Bank Umum	15.043	6.776	(8.267)

Sumber: APOLO OJK

Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 2.947 jaringan kantor, bertambah 27 jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Penambahan tersebut terdapat pada KP, KC, ATM, dan *payment point*. Lebih lanjut,

sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (57,14%, 1.684 kantor), diikuti Sumatera (40,62%, 1.197 kantor), Sulampua (1,46%, 43 kantor), Bali-

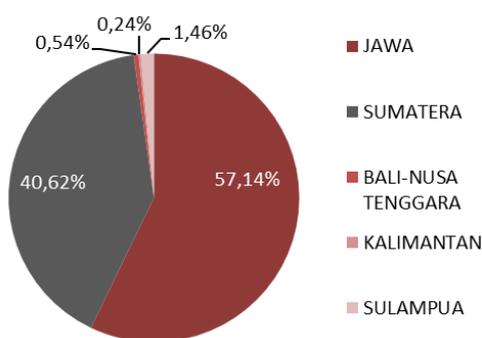
Nusa Tenggara (0,54%, 16 kantor), dan Kalimantan (0,24%, 7 kantor).

Tabel 32 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2022		Δ
	TW III	TW IV	
- Kantor Pusat (KP)	166	167	1
- Kantor Cabang (KC)	208	210	2
- Kantor Kas (KK)	291	291	-
- ATM	60	72	12
- Payment Point	2.195	2.207	12
TOTAL	2.920	2.947	27

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 53 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan IV-2022, telah dilakukan PKK terhadap calon Direksi, Komisaris, dan PSP/PSPT Bank Syariah dengan jumlah total sebanyak tujuh calon dan wawancara calon DPS BUS/UUS sebanyak dua calon.

Tabel 33 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah

Proses PKK dan wawancara DPS	Total
PSP/PSPT	1
Komisaris	2
Direksi	4
DPS	2
Total	9

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan IV-2022, telah dilakukan PKK kepada 26 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPRS, dengan pemohon terbanyak untuk calon Direksi BPRS sebanyak 17 pemohon.

Tabel 34 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPRS

Pemohon PKK	TW IV 2022
	Total
Komisaris	5
Direksi	17
PSP	4
Jumlah	26

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2022, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan (merger) dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- Lima persetujuan penggabungan BPR
 - PT BPR Sri Mulya Rejeki ke dalam PT BPR Polatama Kusuma;
 - PT BPR Sumber Lumbanmual ke dalam PT BPR Sumber Sibapudung;
 - PT BPR Batang Tarusan ke dalam PT BPR Batang Kapas;
 - PT BPR Batipuh ke dalam PT BPR Pariangan; dan
 - PT BPR Surya Katialo ke dalam PT BPR Baringin Padang Panjang Sakato.
- Tiga persetujuan pencabutan izin usaha BPR
 - PT BPR Telaga Sinarcahaya, per 17 November 2022;

- b. PT BPR Sumber Arto, per 21 Desember 2022; dan
- c. PT BPR Pasar Umum, per 25 November 2022.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2022, terdapat 1.441 BPR dengan 8.177 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 6.044 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan pada jumlah KC, KK, ATM dan *payment point*, sementara terdapat penurunan pada jumlah KP. Terdapat perbedaan data peningkatan jumlah BPR dengan data perizinan dikarenakan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

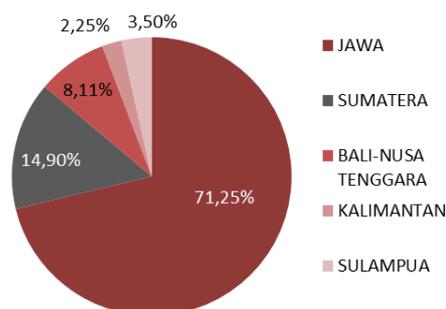
Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 71,25% (5.826 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 14,90% (1.218 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan jaringan kantor di hampir seluruh wilayah di Indonesia utamanya di wilayah Jawa dengan penambahan sebanyak 114 jaringan kantor. Sementara itu, penurunan jaringan kantor terdapat pada wilayah Bali-Nusa Tenggara (berkurang 3 jaringan kantor).

Tabel 35 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2022		Δ
	TW III	TW IV	
- Kantor Pusat (KP)	1.446	1.441	(5)
- Kantor Cabang (KC)	1.883	1.892	9
- Kantor Kas (KK)	2.702	2.711	9
- ATM	270	288	18
- <i>Payment Point</i>	1.752	1.845	93
TOTAL	8.053	8.177	124

Sumber: OJK

Grafik 54 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

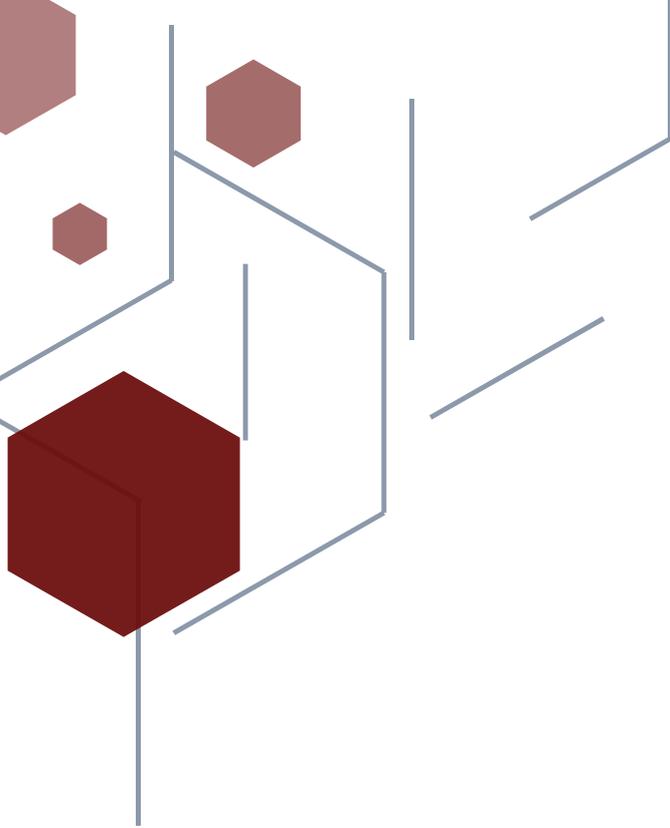
Pada triwulan IV-2022, telah dilakukan PKK kepada 243 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan pemohon terbanyak untuk calon Direksi BPR sebanyak 121 pemohon.

Tabel 36 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR

Pemohon PKK	TW IV 2022
	Total
Komisaris	89
Direksi	121
PSP	33
Jumlah	243

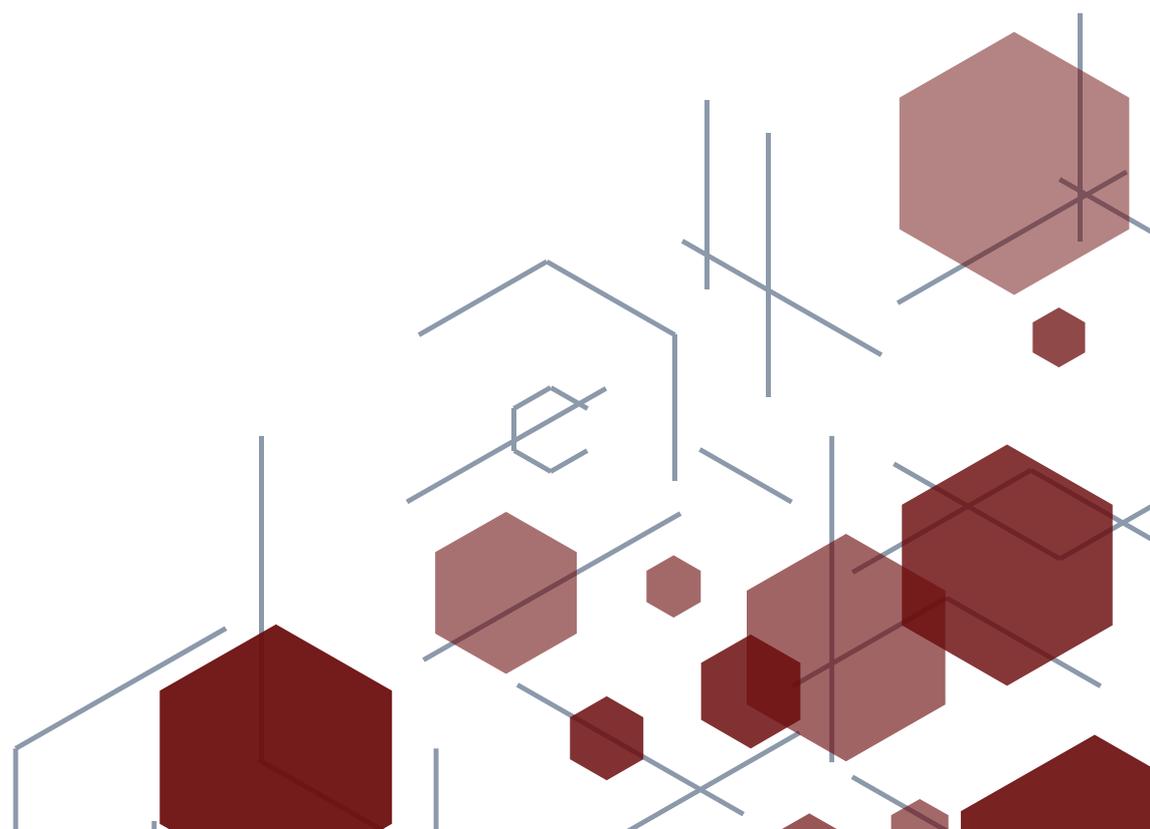
Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab VI

Koordinasi Antar Lembaga



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, maka Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS yang tergabung dalam **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Senin, 30 Januari 2023, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) melaksanakan Rapat Berkala KSSK I tahun 2023. Dalam siaran Pers KSSK tersebut disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV-2022 terus membaik di tengah optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan semakin positif seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik.** Komite KSSK berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan tetap menjaga kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global.

Tekanan global mulai mereda pada akhir triwulan IV-2022 namun tetap dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Tekanan inflasi global terindikasi mulai berkurang meskipun tetap di level tinggi seiring masih tingginya harga energi dan pangan, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, serta masih ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Sejalan dengan itu, pengetatan kebijakan moneter di negara maju diperkirakan mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023. Ketidakpastian pasar keuangan global juga

mulai berkurang sehingga berdampak positif pada negara berkembang dengan meningkatnya aliran modal global dan berkurangnya tekanan pelemahan nilai tukar. Ke depan, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh lebih lambat akibat fragmentasi geopolitik dan risiko resesi di AS dan Eropa. Namun demikian, membaiknya prospek ekonomi di Tiongkok terkait penghapusan *Zero-Covid Policy* diperkirakan akan mengurangi risiko perlambatan ekonomi global yang lebih dalam.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut dengan konsumsi rumah tangga tetap kuat disertai level inflasi yang lebih rendah dari prakiraan.

Berlanjutnya kinerja positif perekonomian tercermin pada berbagai indikator dini per Desember 2022, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang terus memberikan sinyal optimisme. Selain itu, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur melanjutkan tren ekspansi di level 50,9. Kinerja neraca perdagangan juga terus mencatatkan surplus dengan total surplus di tahun 2022 mencapai USD54,46 miliar, merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2-5,3%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diperkirakan tetap kuat sejalan dengan penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), meskipun sedikit melambat sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Inflasi menurun lebih cepat dari yang diprakirakan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir 2022 tercatat sebesar 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dari prakiraan pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Demikian pula inflasi inti tercatat rendah pada akhir 2022 yaitu sebesar 3,36% (yoy) jauh lebih rendah dari prakiraan BI sebesar 4,61% (yoy). Penurunan inflasi IHK dan inti tersebut sebagai hasil koordinasi yang sangat erat antara Pemerintah dan BI melalui respons kebijakan moneter BI yang *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking*, didukung dengan pengendalian inflasi bahan pangan bergejolak (*volatile food*) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ke depan, inflasi inti diperkirakan tetap berada dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$ pada semester I-2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada semester II-2023.

Nilai tukar Rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian.

Rupiah pada awal 2023 mengalami apresiasi, di mana sampai dengan 27 Januari 2023 menguat 3,89% (ytd) dibandingkan dengan level akhir Desember 2022. Penguatan Rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia (3,83% ytd), Filipina (2,30% ytd), dan India (1,46% ytd). Penguatan tersebut didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap baik dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap

menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda.

Dari sisi fiskal, APBN 2022 yang merupakan bagian dari serangkaian kebijakan fiskal di masa pandemi Covid-19 telah bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan kinerja APBN yang tetap sehat dan berkelanjutan. Kinerja positif APBN 2022 terefleksi dari realisasi belanja negara yang sebesar Rp3.090,75 triliun atau mampu tumbuh 10,92% (yoy). APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi melalui dukungan subsidi dan kompensasi, penebalan bantuan sosial, dukungan proyek strategis nasional, penurunan *stunting* dan pengentasan kemiskinan ekstrem, dukungan program JKN, serta layanan publik di daerah.

Seiring kuatnya dukungan belanja tersebut, ekonomi dapat pulih dengan cepat dan dunia usaha dapat bangkit lebih kuat, sehingga berdampak positif terhadap pendapatan negara yang mencapai Rp2.626,42 triliun, tumbuh signifikan sebesar 30,58% (yoy) dan mencapai 115,90% dari target APBN (Perpres No. 98/2022). Realisasi pendapatan tersebut meliputi realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.034,54 triliun (114,04% dari Perpres No. 98/2022) atau tumbuh sebesar 31,44% dari realisasi tahun 2021 dan realisasi PNBPN yang mencapai Rp588,34 triliun (122,16% dari target Perpres No. 98/2022) atau tumbuh sebesar 28,32% (yoy). Kinerja pendapatan yang optimal tersebut terutama dipengaruhi pemulihan aktivitas

ekonomi yang semakin menguat, masih tingginya harga komoditas, serta buah dari reformasi perpajakan.

Kombinasi dari pencapaian pendapatan yang tumbuh kuat dan kinerja belanja yang tumbuh positif tersebut berdampak pada pengendalian risiko fiskal yang semakin solid, terefleksi pada defisit APBN yang mencapai Rp464,33 triliun atau 2,38% PDB, jauh lebih rendah dari target sebesar 4,50% PDB (Perpres No. 98/2022). Dengan defisit APBN yang lebih rendah dibandingkan target awal, rasio utang Pemerintah menurun dari 40,74% di akhir tahun 2021 menjadi 39,57% PDB di akhir tahun 2022. Selain itu, keseimbangan primer yang sebelumnya negatif cukup besar, saat ini bergerak menuju positif.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023, didorong pembelian kembali SBN oleh investor nonresiden. Sampai dengan 27 Januari 2023, tercatat *net buy* oleh nonresiden senilai Rp48,53 triliun, perbankan senilai Rp121,98 triliun, dan investor keuangan nonbank senilai Rp3,63 triliun. Penguatan tersebut juga didukung oleh *yield* SBN seri *benchmark* 10 tahun yang mengalami penurunan sebesar 20 bps (ytd) ke level 6,74%. Meskipun kondisi pasar SBN sudah mulai kondusif, tekanan inflasi global di beberapa negara yang masih persisten tinggi perlu tetap diwaspadai yang berpotensi memicu naiknya suku bunga kebijakan bank sentral global di luar ekspektasi.

Kinerja APBN yang sangat baik tersebut dapat dimaknai bahwa peran APBN tahun 2022 sebagai *shock absorber* dapat berfungsi optimal dalam

meredam gejolak perekonomian global yang semakin eskalatif, menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat serta mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. APBN mampu mengendalikan risiko lebih solid sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk melanjutkan pelaksanaan konsolidasi fiskal pada tahun 2023, serta mendukung upaya transformasi ekonomi.

BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*).

Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas melalui penguatan kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan memperkuat kecukupan cadangan devisa. BI sejak Agustus 2022 dengan terukur telah menaikkan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebagai langkah untuk secara *front loaded, pre-emptive*, dan *forward looking* memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. BI meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps hingga menjadi 5,75% pada Januari 2023 memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran $3,0\pm 1\%$ pada semester I-2023 dan Inflasi IHK kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ pada semester II-2023. Kebijakan

stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa *Term Deposit* (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.

BI terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan dengan menyempurnakan ketentuan insentif makroprudensial melalui pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, kredit UMKM termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kredit/pembiayaan hijau, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian. Besaran insentif makroprudensial kepada bank penyalur KUR dan kredit UMKM ditingkatkan dua kali lipat menjadi paling besar 1%. Selain itu, pemberian insentif juga diberikan terhadap penyaluran kredit/pembiayaan hijau yaitu kredit/pembiayaan properti dan/atau kendaraan bermotor berwawasan lingkungan paling besar 0,3%. Peningkatan besaran insentif tersebut meningkatkan besaran total insentif makroprudensial yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling besar 200 *bps* menjadi paling besar 280 *bps*.

BI terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan: (i) mendorong implementasi BI-FAST melalui perluasan kepesertaan BI-FAST baik bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB), kanal layanan, serta implementasi layanan

Fase 1 Tahap 2 (*Bulk Credit, Direct Debit, dan Request For Payment*); (ii) mendorong implementasi dan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik sesuai *timeline* pada tahun 2023; dan (iii) melanjutkan perluasan implementasi QRIS melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi pada tahun 2023 serta pengembangan fitur QRIS dan QRIS antarnegara.

BI meningkatkan kerja sama internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, BI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.

BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis. Koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

SSK dan kinerja sektor jasa keuangan terjaga dengan intermediasi lembaga jasa keuangan tumbuh di atas ekspektasi sejalan dengan kinerja perekonomian domestik yang membaik. Kredit perbankan pada 2022 tumbuh sebesar 11,35% (yoy), terutama didorong oleh jenis kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 12,17% (yoy) dan pertumbuhan kredit debitur korporasi sebesar 15,44% (yoy). Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,01% (yoy) didorong kenaikan

giro dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 18,78% (yoy) dan 7,52% (yoy).

Sejalan dengan kinerja intermediasi perbankan, penyaluran pembiayaan melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan 14,18% (yoy) per Desember 2022, didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang tumbuh masing-masing sebesar 36,70% dan 23,94%. Industri perasuransian berhasil meningkatkan penghimpunan premi hingga Rp27,63 triliun pada Desember 2022 dengan premi Asuransi Jiwa bertambah Rp16,41 triliun dan Asuransi Umum Rp11,22 triliun. Penghimpunan dana di pasar modal Desember 2022 mencapai Rp267,73 triliun. Dari sisi *supply*, terdapat 71 emiten baru yang melakukan penghimpunan dana melalui pasar modal dan mencatatkan rekor terbanyak serta termasuk tertinggi di kawasan.

Kinerja pasar saham masih mampu menguat 4,09% (ytd) ke level 6.850,62 per 30 Desember 2022 dan termasuk salah satu bursa saham dengan kinerja terbaik di kawasan. Hal ini ditunjang dengan *net buy* nonresiden di pasar saham Rp60,60 triliun (ytd) di tengah volatilitas pasar keuangan global.

Risiko kredit dalam tren menurun, baik pada industri perbankan maupun pembiayaan didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. NPL *gross* perbankan per Desember 2022 terpantau turun menjadi sebesar 2,44%, sementara rasio NPF perusahaan pembiayaan turun ke level 2,32%. Likuiditas perbankan memadai dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) di level

137,67% dan Alat Likuid/DPK di level 31,20% pada Desember 2022. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan menunjukkan peningkatan dengan rasio CAR mencapai 25,68%, sejalan dengan kuatnya permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum dengan *Risk-Based Capital* (RBC) masing-masing di level 484,22% dan 326,99%. Demikian halnya dengan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang sebesar 2,07 kali. Dalam rangka menjaga SSK di tengah meningkatnya risiko eksternal, OJK akan proaktif memperkuat kebijakan prudensial di sektor jasa keuangan dalam menjaga stabilitas industri jasa keuangan.

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional, OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2022. Kebijakan tersebut meliputi area kunci sebagai berikut:

1. OJK menerbitkan beberapa kebijakan dalam memitigasi risiko eksternal terhadap SSK antara lain:
 - a. Mempertahankan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan terkait menjaga volatilitas pasar yang masih berpotensi menekan kinerja pasar modal domestik.
 - b. Meminta agar Lembaga Jasa Keuangan senantiasa menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang memadai untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang, antara lain

dengan kebijakan optimalisasi pembagian dividen dan peningkatan pencadangan termasuk terhadap sektor-sektor yang kebijakan relaksasinya berakhir.

2. Dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional, OJK telah merilis kebijakan antara lain:
 - a. Kebijakan stimulus restrukturisasi kredit/pembiayaan secara *targeted* untuk mengatasi *scarring effect* akibat pandemi serta menjaga fungsi intermediasi. Relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 diberikan untuk segmen UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.
 - b. Kebijakan proaktif dalam mendukung pemulihan ekonomi terutama yang terdampak bencana sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan relaksasi terkait ketentuan prudensial untuk mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) serta pengembangan industri hulunya (industri baterai, industri *charging station*, dan industri

- komponen) baik di bidang perbankan, IKNB, dan pasar modal.
3. OJK memperkuat kebijakan yang antisipatif dan terukur melalui peningkatan infrastruktur, pengawasan, dan tata kelola di sektor keuangan, serta perlindungan konsumen dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional.

Dari penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS per Desember 2022 adalah sebanyak 99,93% dari total rekening atau setara 508,21 juta rekening. Pada Januari 2023 LPS telah menetapkan untuk menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) bagi simpanan dalam Rupiah di Bank Umum dan BPR masing-masing sebesar 25 *bps* menjadi 4,00% dan 6,50%, serta untuk simpanan dalam valuta asing (valas) di Bank Umum naik sebesar 25 *bps* menjadi 2,00%. TBP tersebut berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2023. Penyesuaian TBP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Potensi kenaikan suku bunga perbankan domestik yang lebih tinggi dalam merespons kebijakan moneter bank sentral;
2. Memberikan ruang bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas di tengah masih relatif tingginya risiko volatilitas pasar keuangan dengan tetap mendukung berjalannya fungsi intermediasi perbankan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi; dan
3. Memperkuat sinergi dan arah kebijakan dengan otoritas di sektor keuangan domestik dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Kebijakan LPS bidang penjaminan dan resolusi akan tetap diupayakan mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga SSK melalui antara lain: penguatan kebijakan cakupan penjaminan simpanan dari sisi batasan nominal penjaminan (Rp2 miliar) dan TBP, memastikan kesiapan mekanisme *early involvement* dalam resolusi bank pada saat diperlukan, serta evaluasi kelanjutan pelanggaran pengenaan denda premi penjaminan.

KSSK akan terus meningkatkan koordinasi dalam mencermati dinamika global serta potensi risiko ke depan, termasuk dalam mempersiapkan *coordinated policy response* untuk memitigasi risiko pemburukan kondisi perekonomian dan SSK domestik.

KSSK menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) sebagai momentum penting reformasi sektor keuangan di Indonesia. KSSK menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang telah menginisiasi penyusunan RUU P2SK dan kerja sama melalui proses diskusi yang terbuka, produktif, konstruktif, dan dinamis. UU P2SK merupakan landasan reformasi sektor keuangan dalam mewujudkan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya,

kuat, dan stabil. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan. Reformasi sektor keuangan Indonesia sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah dan otoritas di sektor keuangan akan segera menyusun peraturan pelaksanaan yang kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk DPR RI, pelaku industri keuangan, serta masyarakat.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2023.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan IV-2022, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Perizinan kelembagaan bank umum;
- b. Pemantauan pencapaian realisasi dan target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi bank umum;
- c. Rencana dan penyesuaian kebijakan keuangan hijau;
- d. Optimalisasi penguatan devisa hasil ekspor untuk mendukung *supply* valas domestik dan stabilitas nilai tukar Rupiah;

- e. Evaluasi dan rencana perluasan pemberian insentif atas penyaluran kredit pada sektor prioritas;
- f. Isu-isu terkait pertukaran data terintegrasi yang juga melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan;
- g. Pelaksanaan pertukaran data dan/atau Informasi;
- h. Penetapan bank sistemik dan kajian metodologi penetapan bank sistemik;
- i. Pelaksanaan *joint stress test*;
- j. Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan;
- k. Sosialisasi ketentuan terkait bank umum maupun BPR/BPRS; dan
- l. Pelaksanaan riset bersama.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa aspek kerja sama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan IV-2022 telah dilaksanakan

beberapa koordinasi antara OJK dan LPS, antara lain:

- a. Pertukaran data dan pengkinian kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;
- b. Koordinasi penyelesaian permasalahan BPR/BPRS;
- c. Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pelaksanaan riset bersama.

3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) di tingkat multilateral serta dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga, khususnya terkait pembahasan substansi dan persiapan teknis *Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF)*.

OJK, sebagai salah satu anggota komite TPPU, mengikuti rapat koordinasi Kelompok Kerja Komite TPPU. Anggota Kelompok Kerja Komite TPPU dari OJK adalah Kepala Grup Penanganan APU PPT, yang pada kesempatan ini dilakukan evaluasi pelaporan Strategi Nasional (Stranas) TPPU TPPT tahun 2022 dan juga

diseminasi rencana aksi Stranas TPPU TPPT tahun 2023.

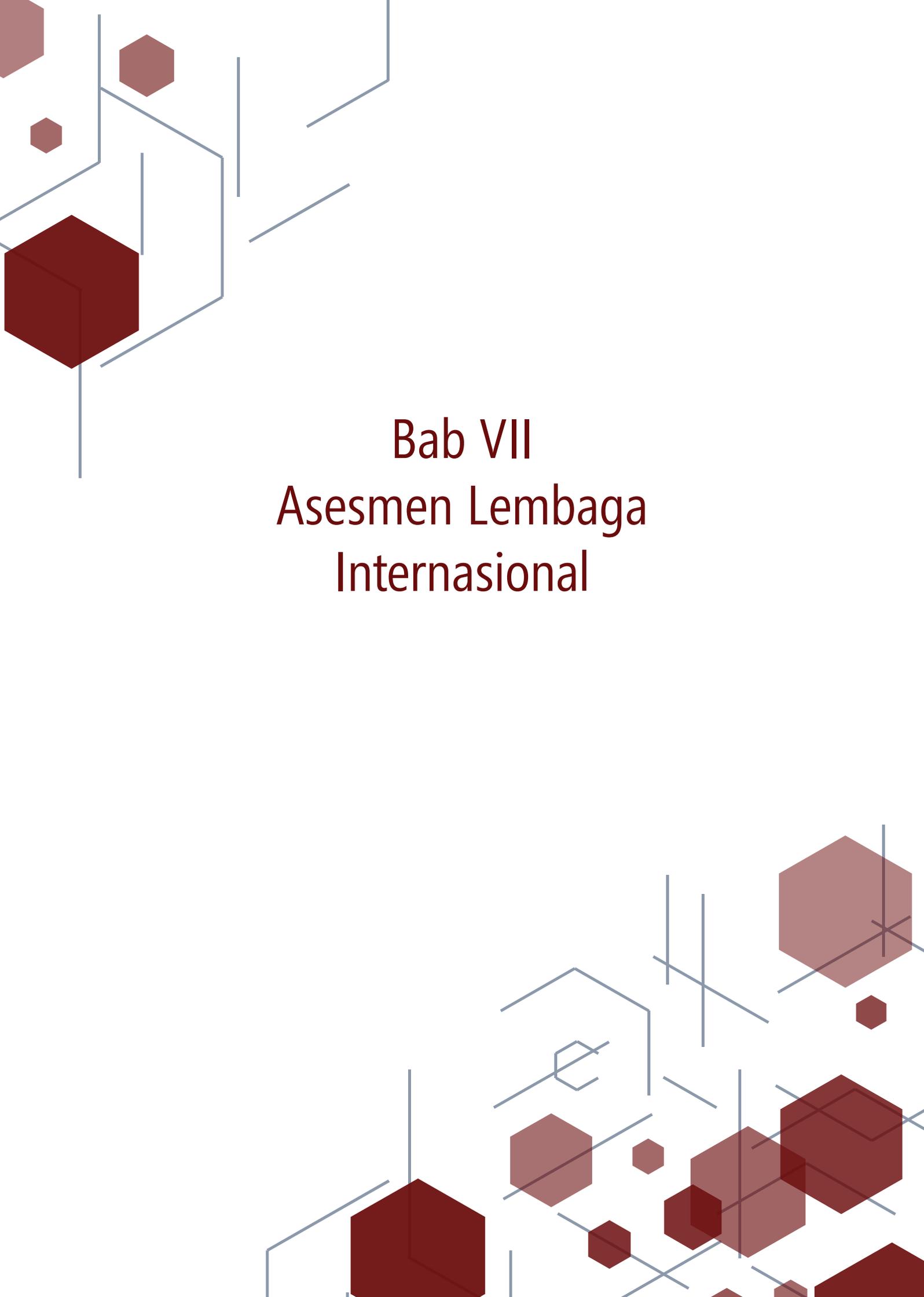
OJK juga merupakan Lembaga yang berperan dalam pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OJK menyampaikan laporan capaian pemenuhan Stranas PK setiap triwulan dengan target pemanfaatan informasi pemilik manfaat (*beneficial owner/BO*). Dalam pemenuhan target tersebut, OJK melakukan upaya peningkatan efektivitas transparansi informasi pemilik manfaat (*beneficial owner/BO*) yaitu koordinasi rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai *central registry* yang mengelola data BO, pengembangan sistem internal OJK yakni Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI) dengan modul data riwayat BO, serta penyampaian himbauan pemenuhan kewajiban pelaporan dan pengkinian data BO kepada Korproasi yang berada di bawah pengawasan OJK.

Selanjutnya, OJK melanjutkan kerja sama yang baik dengan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* antara lain penyelenggaraan webinar "Keterbukaan Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) pada Rezim APU PPT" secara *virtual*. Webinar dihadiri 2.747 peserta meliputi perwakilan Satuan Kerja OJK, Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU, asosiasi di sektor jasa keuangan, dan seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Webinar ini fokus menyoroti pentingnya pengumpulan, penentuan, dan penyediaan informasi BO

dalam rangka mendukung upaya pencegahan kejahatan termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Negara perlu memiliki kerangka yang kuat untuk menjaga kecukupan, akurasi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi BO. Penyelenggaraan webinar tersebut antara lain merupakan upaya OJK untuk memenuhi Stranas PK 2022.

Pada triwulan IV-2022, OJK menjalin koordinasi dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) Kantor Pengembangan, Bantuan dan Pelatihan

Kejaksaan Luar Negeri (USDOJ/OPDAT) di Jakarta melalui partisipasi OJK pada Pelatihan Investigasi Keuangan dan Pencucian Uang. Kegiatan pelatihan fokus pada penyidikan keuangan terkait tindak pidana perdagangan narkoba dan tindak pidana pencucian uang, metode perhitungan jumlah hasil kejahatan illegal, serta perampasan aset dari hasil kejahatan tersebut. Narasumber yang hadir dalam pelatihan ini adalah instruktur dari Dinas Pajak Amerika Serikat (*Internal Revenue Service/IRS*).

The page features an abstract geometric design. In the top-left corner, there is a cluster of blue lines forming a hexagonal grid, with several red hexagons of varying sizes and shades (from light to dark red) scattered around. The bottom-right corner contains a more complex arrangement of these elements, including overlapping red hexagons and blue lines that create a sense of depth and movement. The central text is positioned in the upper-middle part of the page.

Bab VII

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Asesmen Lembaga Internasional

Pasca pelaksanaan *on-site visit* MER Indonesia pada tanggal 18 Juli – 4 Agustus 2022, Indonesia telah menyampaikan kembali *2nd Draft* MER dan telah melakukan *face-to-face meeting* dengan sekretariat FATF dan *asessor* untuk membahas antara lain finalisasi *draft Mutual Evaluation Report*. Selanjutnya, *FATF Evaluation and Compliance Group (ECG)* akan mendistribusikan laporan final draft tersebut kepada *Global Network* untuk ditanggapi oleh negara-negara anggota FATF dan lembaga *observer*.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa forum internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan IV-2022, asesmen internasional yang tengah diikuti yaitu *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)*.

Mutual Evaluation Review (MER)

Indonesia saat ini masih menjadi *observer* pada *Financial Action Task Force (FATF)*, badan yang menyusun dan memantau standar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Dalam rangka mendapatkan keanggotaan penuh FATF, Indonesia menjalani rangkaian *Mutual Evaluation Review (MER)*. MER merupakan evaluasi mendalam terhadap suatu negara melalui analisis kepatuhan teknis peraturan perundang-undangan dan analisis

efektivitas implementasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU, TPPT, dan PPSPM).

Sekretariat FATF telah menyampaikan dokumen *2nd Draft* MER kepada Indonesia pada 3 November 2022. Dokumen tersebut berisi penilaian sementara kecukupan pengaturan (*Technical Compliance/TC*) dan efektivitas implementasi (*Immediate Outcome/IO*) di mana nilai *2nd Draft* meningkat dibandingkan *1st Draft* MER sebelumnya. Indonesia telah memenuhi persyaratan penilaian TC dan masih berupaya memenuhi persyaratan penilaian IO.

Indonesia diberi kesempatan untuk menyampaikan respon dokumen *2nd Draft* MER dan memperkuat beberapa IO yang diprioritaskan untuk ditingkatkan nilainya. Peran OJK, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur paling signifikan di Sektor Jasa Keuangan, juga diminta untuk meningkatkan penilaian IO3. OJK telah menyusun tanggapan *2nd Draft* yang meliputi: (1) Identifikasi dan analisis hasil

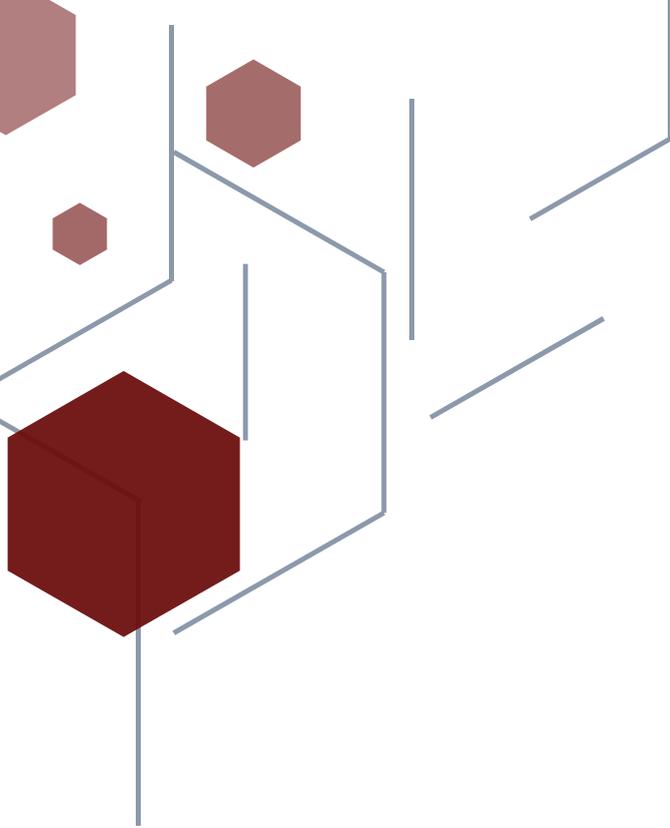
2nd Draft; (2) Koordinasi dengan PPATK selaku *focal point* MER Indonesia; (3) koordinasi dan konfirmasi tanggapan *2nd Draft* dengan pengawasan, perijinan dan penegakan hukum; (4) *Focus Group Discussion* (FGD) pembahasan *2nd Draft* IO3 bersama Kementerian/Lembaga terkait, dengan OJK sebagai *host*; dan (6) Finalisasi dan penyampaian tanggapan *2nd Draft* MER dari OJK kepada PPATK pada tanggal 25 November 2022.

Dalam proses penyusunan tanggapan *2nd Draft MER* tersebut, dilakukan pertemuan secara *virtual* antara Tim MER OJK, PPATK, dengan Sekretariat FATF dan *assessor*. Dalam pertemuan tersebut, *assessor* melakukan *interview* terhadap OJK yang fokus pada IO3 - Pengawasan. Jawaban OJK yang meyakinkan berdampak pada revisi *2nd Draft MER* dengan perbaikan penulisan *report* dengan *tone positive*.

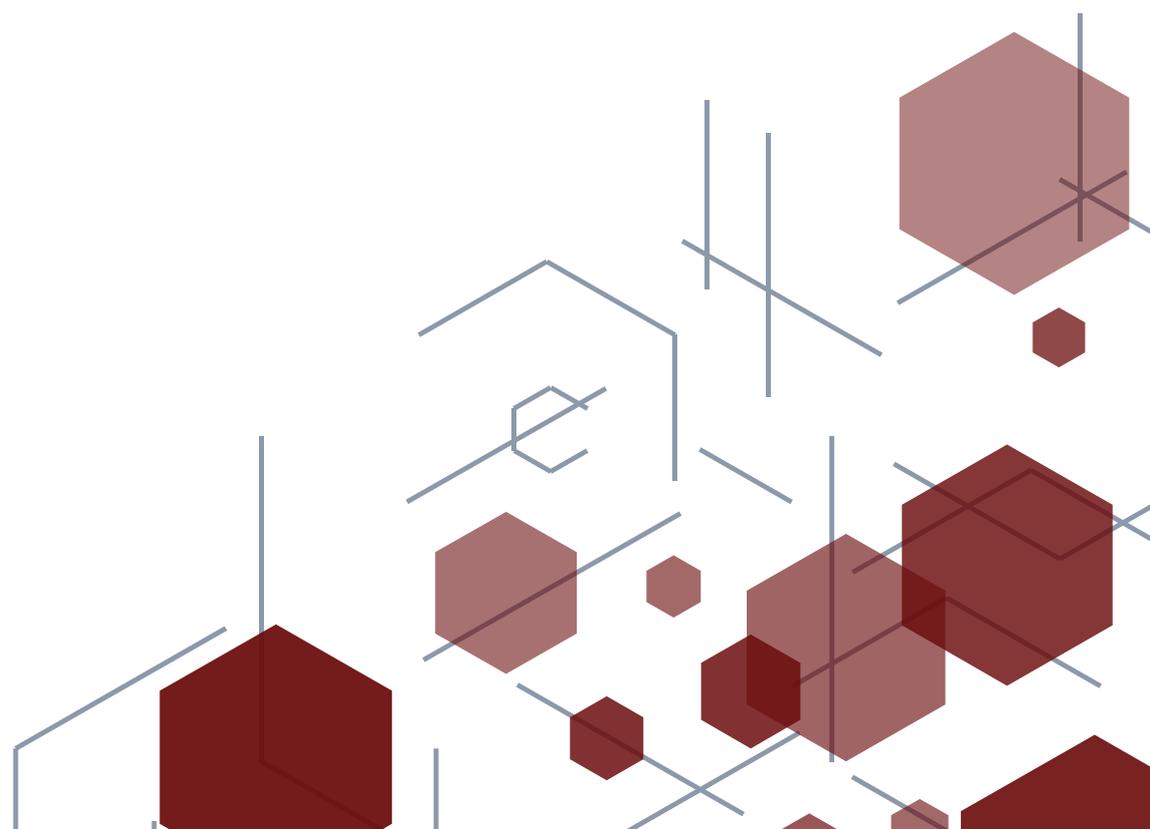
Pada triwulan IV-2022, tahapan MER FATF adalah *Face-to-Face Meeting* tanggal 12-13 Desember 2022 di Gedung OECD, Paris. OJK menjadi bagian Delegasi Republik Indonesia pada *face-to-face meeting* tersebut yang merupakan *the last technical*

battle untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Indonesia dengan *assessor* pada penilaian *technical compliance* dan efektivitas implementasi (*Immediate Outcome/IO*), finalisasi *draft Mutual Evaluation Report* dan Ringkasan Eksekutif, serta identifikasi isu kunci yang akan dibahas pada FATF *Plenary* pada bulan Februari 2023. *Face-to-Face Meeting* berlangsung intens di mana *assessor* memberikan pertanyaan yang cukup berat. Kehadiran Delegasi RI yang lengkap menunjukkan komitmen Pemerintah RI dan lintas Kementerian/Lembaga dalam proses MER untuk menjadi anggota FATF.

Pasca *face-to-face meeting* tersebut, Sekretariat FATF telah menyampaikan kembali *draft* laporan final MER Indonesia pada 23 Desember 2022 dan ditanggapi Indonesia pada tanggal 27 Desember 2022. Selanjutnya, FATF *Evaluation and Compliance Group* (ECG) akan mendistribusikan laporan *Final Draft* tersebut kepada *Global Network* melalui sistem pada tanggal 9 Januari 2023 untuk ditanggapi oleh negara-negara anggota FATF dan lembaga *observer*.



Bab VIII
Perlindungan
Konsumen, Literasi,
dan Inklusi
Keuangan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VIII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, pada triwulan IV-2022, OJK telah menerima 18.595 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 84,51% pertanyaan; 3,26% informasi; dan 12,22% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, DTA, SiMuda, dan K/PMR serta melalui kerjasama dengan Lembaga/otoritas lain melalui TPAKD.

A. Perlindungan Konsumen

Salah tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, untuk menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan berupa POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor

18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ke depan, penguatan perlindungan konsumen juga akan diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada

triwulan IV-2022, Layanan Konsumen OJK menerima 83.204 layanan yang terdiri dari

71.520 pertanyaan, 7.346 informasi, dan 4.338 pengaduan.

Tabel 37 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan

Jenis Layanan	2022		qtq	Porsi
	TW III	TW IV		
Pertanyaan	77.691	71.520	-7,94%	85,96%
Informasi	5.449	7.346	34,81%	8,83%
Pengaduan	3.955	4.338	9,68%	5,21%
Total	87.095	83.204	-4,47%	100%

Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 38 Total Layanan Per Sektor

Sektor	TW III 2022				TW IV 2022				qtq	Porsi TW IV'22
	Pertanyaan	Informasi	Pengaduan	Total	Pertanyaan	Informasi	Pengaduan	Total		
Perbankan	13.638	504	1.903	16.045	15.715	607	2.273	18.595	15,89%	22,35%
IKNB	25.263	1.345	2.028	28.636	24.311	1.380	2.030	27.721	-3,20%	33,32%
Asuransi	678	102	392	1.172	1.221	239	345	1.805	54,01%	2,17%
Lembaga Pembiayaan	5.860	477	770	7.107	6.501	383	781	7.665	7,85%	9,21%
Dana Pensiun	10	6	10	26	14	1	18	33	26,92%	0,04%
Fintech	18.606	754	799	20.159	16.416	745	836	17.997	-10,72%	21,63%
Lainnya	109	6	57	172	159	12	50	221	28,49%	0,27%
Pasar Modal	116	38	24	178	83	9	35	127	-28,65%	0,15%
Lainnya	38.674	3.562	-	42.236	31.411	5.350	-	36.761	-12,96%	44,18%
Total	77.691	5.449	3.955	87.095	71.520	7.346	4.338	83.204	-4,47%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, dari total 83.204 layanan, 18.595 merupakan layanan terkait Perbankan (22,35%), 27.721 layanan terkait IKNB (33,32%), 127 layanan terkait Pasar Modal (0,15%), dan 36.761 layanan terkait hal lainnya (44,18%). Layanan terkait hal lainnya antara lain berupa pertanyaan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi ilegal, dan penipuan yg dilakukan oknum dengan produk jasa keuangan. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 18.595 layanan Sektor Perbankan, 84,51% atau 15.715 layanan merupakan pertanyaan, 3,26% atau 607 layanan informasi, dan 12,22% atau 2.273 layanan pengaduan. Pada triwulan IV-2022, penerimaan layanan terkait sektor perbankan meningkat 15,89% (2.550 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	2022		qtq	Porsi
	TW III	TW IV		
Pertanyaan	13.638	15.715	15,23%	84,51%
Informasi	504	607	20,44%	3,26%
Pengaduan	1.903	2.273	19,44%	12,23%
Total	16.045	18.595	15,89%	100%

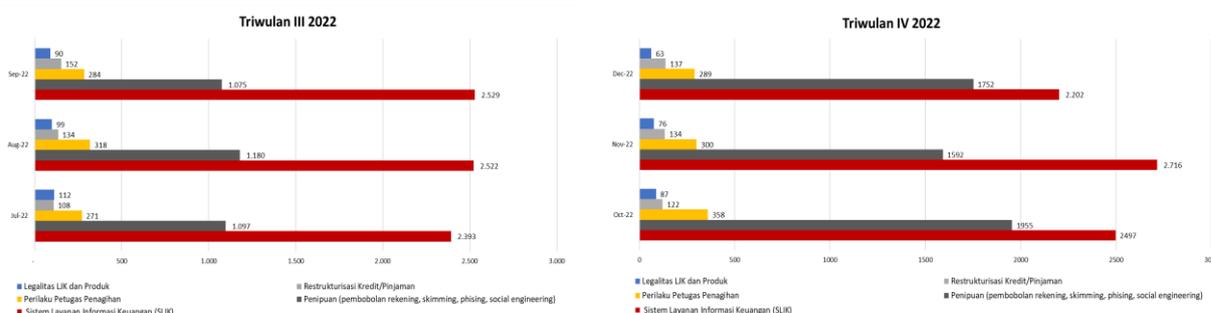
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 15.715 pertanyaan terkait sektor perbankan (21,97% dari total sebanyak 71.520 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat 15,23% (2.077 layanan). Layanan pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2022 adalah terkait permintaan informasi debitur (iDeb) atau SLIK sebesar 47,18% (7.415 layanan) dan terkait penipuan (pembobolan rekening, *skimming*, *phising*, *social engineering*) sebesar 33,72% (5.299 layanan). Sebagian

besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan penipuan (pembobolan rekening, *skimming*, *phising*, *social engineering*), umumnya Konsumen melaporkan terkait penipuan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga atau badan tertentu dan terkait adanya indikasi pembobolan kartu kredit atau kartu debit konsumen terkena *skimming*.

Grafik 55 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan



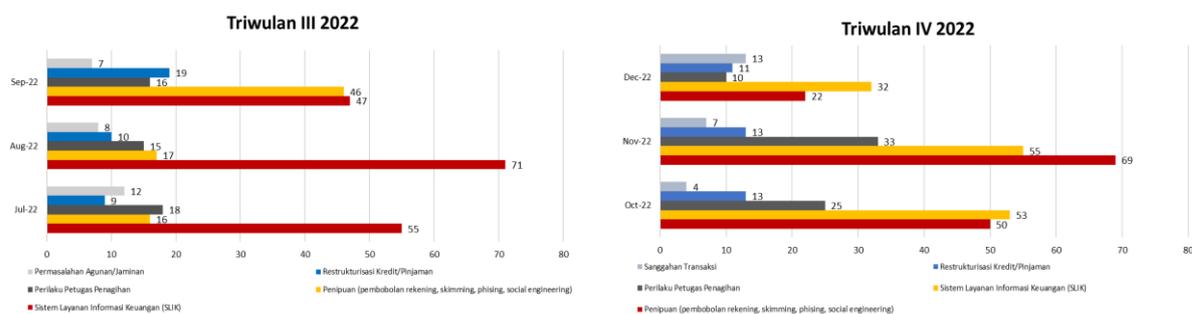
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan penerimaan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 607 layanan (8,26% dari total sebanyak 7.346 laporan yang diterima). Jumlah layanan ini meningkat 20,44% dari triwulan

III-2022. Layanan penerimaan informasi yang paling banyak adalah penipuan (pembobolan rekening, *skimming*, *phising*, *social engineering*) sebesar 23,23% (141 layanan) dan terkait permasalahan permintaan informasi debitur sebesar 23,06% (140 layanan).

Grafik 56 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan



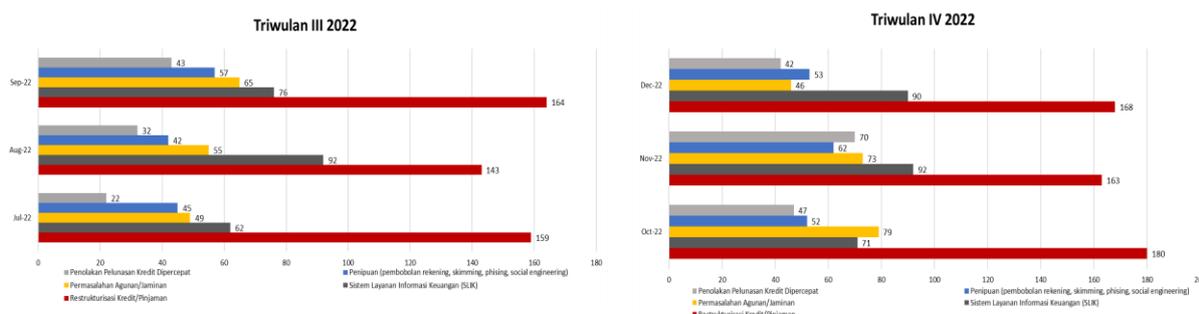
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan IV-2022, terdapat 2.273 pengaduan yang diterima terkait sektor perbankan (52,40% dari total sebanyak 4.338 pengaduan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat 19,44% (370 pengaduan). Layanan pengaduan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2022 adalah terkait restrukturisasi kredit atau pinjaman sebesar 22,48% (511 pengaduan) dan terkait pengaduan

informasi debitur (IDEB) sebesar 11,13% (253 pengaduan). Sebagian besar layanan pengaduan terkait restrukturisasi kredit atau pinjaman yaitu konsumen mengajukan permohonan keringanan pembayaran kredit. Sementara itu, terkait permasalahan pengaduan IDEB, umumnya konsumen melaporkan terkait status kredit di suatu PUJK di mana konsumen tidak memiliki kredit ataupun sudah melunasi kredit tetapi nama konsumen tercantum sebagai debitur.

Grafik 57 Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Penyelesaian pengaduan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tidak selalu menghasilkan kesepakatan sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa antara Konsumen dengan PUJK. Dalam rangka pemberian perlindungan Konsumen, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa di luar PUJK, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). LAPS SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menangani seluruh

sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan akan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh Konsumen dan memudahkan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa, termasuk atas sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari satu sektor jasa keuangan.

Pada akhir tahun 2020, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK) sebagai dasar hukum pemberian persetujuan dan pelaksanaan penyelesaian

sengketa di luar pengadilan melalui LAPS yaitu LAPS SJK. LAPS SJK secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya dilakukan penanganan sengketa, baik melalui layanan mediasi, arbitrase, maupun pendapat mengikat.

Berdasarkan laporan berkala LAPS SJK triwulan IV-2022 yang disampaikan kepada OJK, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa
Terdapat 204 permohonan penyelesaian sengketa di sektor perbankan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Sementara itu, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa sektor perbankan di luar APPK pada periode laporan.
2. Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
Berdasarkan hasil pengolahan data laporan yang diterima OJK pada triwulan IV-2022, data demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perbankan yang diterima oleh LAPS SJK sebagian besar berasal dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing sebanyak 41 sengketa atau 20,10% dari total permohonan di perbankan.
3. Lima besar jenis sengketa sektor perbankan yang diterima LAPS SJK
Sebagian besar jenis sengketa sektor perbankan yang diterima (36 sengketa) merupakan sengketa atas tindakan *fraud* oleh eksternal berupa penipuan,

pembobolan rekening, *skimming*, dan *cyber crime*.

Tabel 40 Lima Besar Jenis Sengketa Sektor Perbankan yang diterima LAPS SJK

No	Jenis Sengketa	Jumlah
1	<i>Fraud</i> Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, <i>Skimming</i> , <i>Cyber Crime</i>)	36
2	Permasalahan Agunan/Jaminan	25
3	Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	20
4	Perilaku Petugas Penagih	15
5	Sistem Layanan Informasi Keuangan	10

Sumber: LAPS SJK

4. Jenis layanan dan/atau produk yang menjadi sengketa
Sebagian besar layanan/produk perbankan yang menjadi sengketa berupa tabungan (41 sengketa), diikuti kartu kredit/pembiayaan (32 sengketa), dan Kredit Multiguna/Pembiayaan Multijasa (30 sengketa).
5. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian
Terdapat 114 permohonan penyelesaian sengketa sektor perbankan yang masih dalam proses penyelesaian. Adapun rincian dari 114 tersebut, yaitu 105 sengketa dalam proses verifikasi dan sembilan sengketa dalam proses mediasi.
6. Jumlah sengketa sektor perbankan yang telah diputus dan hasil monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud
Terdapat 11 sengketa yang telah diputus melalui mediasi dengan hasil sepakat untuk tidak sepakat (*deadlock*).
7. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak
Terdapat 54 permohonan penyelesaian sengketa sektor perbankan pada triwulan IV-2022 yang ditolak karena

tidak memenuhi persyaratan sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK sesuai POJK LAPS SJK. Adapun alasan penolakan antara lain dikarenakan berindikasi pidana, pelanggaran *market conduct*, tidak memiliki kesepakatan menunjuk LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa, dan belum diselesaikan melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR).

3. Pengawasan *Market Conduct* - Pemantauan Iklan

Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan. Adapun pelaporan pemantauan iklan memiliki *lag* waktu satu triwulan, sehingga pada periode ini yang dilaporkan adalah pemantauan untuk iklan pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan III-2022, ditemukan pelanggaran sebesar 1,29% (62 iklan) dari total 4.817 iklan yang diverifikasi. Pelanggaran iklan terbanyak yang ditemukan adalah iklan tidak jelas (95,16%), iklan menyesatkan (3,23%), dan iklan tidak akurat (1,61%).

Adapun iklan tidak jelas antara lain yaitu iklan tidak mencantumkan informasi yang dapat membatalkan manfaat yang dijanjikan tidak dicantumkan dalam badan iklan (misal: periode promo), iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau tautan yang dicantumkan tidak spesifik menuju pada informasi dimaksud, iklan menyatakan "syarat dan ketentuan

berlaku" tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud; dan/atau iklan tidak mencantumkan pernyataan berizin dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya, iklan menyesatkan yaitu iklan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud iklan yang sebenarnya. Lebih lanjut, yang termasuk iklan tidak akurat yaitu iklan menggunakan kata superlatif dan/atau perbandingan kinerja tanpa sumber referensi yang kredibel.

Terhadap pelanggaran tersebut, OJK telah menyampaikan 35 Surat Penghentian Pencantuman Materi Iklan terhadap 34 PUJK. Adapun rincian surat, yaitu: 32 surat penghentian iklan, dua surat penghentian iklan bersama (terdiri dari tiga PUJK sektor perbankan yang melakukan pelanggaran iklan sebagai langkah kuratif atas pelanggaran iklan yang ditemukan), dan satu surat undangan konfirmasi tindak lanjut, sebagai akibat dari masih ditemukannya pelanggaran atas Surat Penghentian Pencantuman Materi Iklan yang dikirimkan pada triwulan sebelumnya dan untuk menyampaikan komitmen tindak lanjut yang wajib dilakukan. Dari total 35 Surat yang telah disampaikan kepada PUJK, sebanyak 26 PUJK telah menyampaikan tanggapan tindak lanjut kepada OJK.

Secara umum, tingkat kepatuhan pemasangan iklan oleh PUJK terhadap ketentuan OJK mengalami peningkatan sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.



B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan IV-2022, terdapat 35 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.156.088 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 28.803.125 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,07 triliun.

Tabel 41 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2022

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.143.565	12.523
Tabungan BSA	
Jumlah Nasabah BSA	Nominal Tabungan BSA
28.803.125	Rp1,07 Triliun
Kredit/Pembiayaan Mikro	
Jumlah Nasabah	Nominal Kredit/Pembiayaan
512.004	Rp3,81 Triliun

Sumber: APOLO Laku Pandai, penarikan 15 Februari 2023

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana

diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Pada triwulan IV-2022, terdapat 512.004 nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro dengan nominal sebesar Rp3,81 triliun.

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015.

Perkembangan program SimPel/SimPel iB sampai dengan triwulan IV-2022 tercatat sebanyak 352 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB. Sebanyak 424.896 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 46,4 juta rekening dan nominal Rp8,42 triliun.

3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Kelompok pelajar merupakan salah satu sasaran yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan inklusi keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, telah ditetapkan target inklusi keuangan

meningkat menjadi sebesar 90% pada tahun 2024.

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan IV-2022, terdapat 53,38 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 81,04% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp29,2 triliun.

Dalam rangka mendorong implementasi program KEJAR, saat ini telah diterbitkan beberapa kebijakan dari Kementerian terkait yaitu:

1. SE Menteri Agama Nomor 12/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Akselerasi Implementasi Program KEJAR;
2. SE Mendikbud Ristek Dikti Nomor 8/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Akselerasi Implementasi Program KEJAR;
3. 143 Surat Edaran/Surat Keputusan/Nota Kesepahaman dan/atau kebijakan lainnya dari pemerintah daerah.

4. Digitalisasi Tabungan Anak (DTA)

Sehubungan dengan penguatan implementasi program KEJAR, pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan kajian terkait dengan Digitalisasi Tabungan Anak (DTA) Usia Pelajar di Indonesia sebagai salah satu inovasi produk/layanan keuangan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pembukaan dan/atau pemanfaatan rekening tabungan bagi segmen anak usia pelajar. Sebagai tindak lanjut atas hasil kajian DTA

dimaksud dan dalam rangka mendorong implementasi program KEJAR, telah dilakukan kegiatan *pilot project* implementasi DTA dengan melibatkan perwakilan Industri Perbankan yang telah memiliki kesiapan dari sisi infrastruktur digital dan mempunyai rencana implementasi DTA pada tahun 2022 yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Pengembangan infrastruktur DTA pada ketiga bank *pilot project* tersebut di atas telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Realisasi perkembangan pembukaan rekening DTA sampai dengan triwulan IV-2022 sebanyak 7.491 rekening dengan nominal Rp2,23 miliar.

5. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) Gen 2

SiMuda Gen 2 merupakan produk tabungan berjangka yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia bagi kelompok usia 18 s.d. 30 tahun untuk tujuan investasi dan/atau lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan perencanaan keuangan. Dalam implementasinya, terdapat dua model bisnis dalam Program SiMuda Gen 2 yaitu SiMuda Eksisting dan SiMuda Lainnya.

Perkembangan program SiMuda Eksisting sampai dengan triwulan IV-2022 tercatat sebanyak 69.634 rekening dan nominal sebesar Rp163 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 49 rekening dengan nominal Rp31,87 juta.
- SiMuda RumahKu: 69.585 rekening dengan nominal Rp163,00 miliar.

Selanjutnya terkait capaian perkembangan SiMuda Lainnya, sampai dengan triwulan IV-2022 tercatat sebanyak 677.698 rekening dan nominal sebesar Rp2,96 triliun.

6. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah.

Terdapat tiga skema *Generic Model* (GM) yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah.

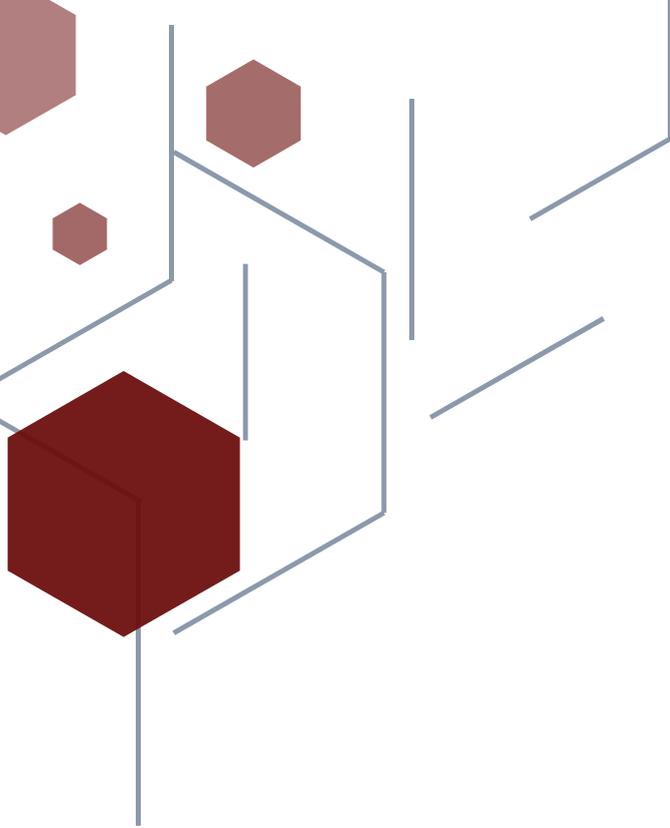
Sampai dengan triwulan IV-2022 program K/PMR telah diimplementasikan oleh 55 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 88 skema model pembiayaan, dan realisasi penyaluran kepada 887.637 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp26,14 triliun.

Tabel 42 Realisasi Program K/PMR Triwulan IV-2022

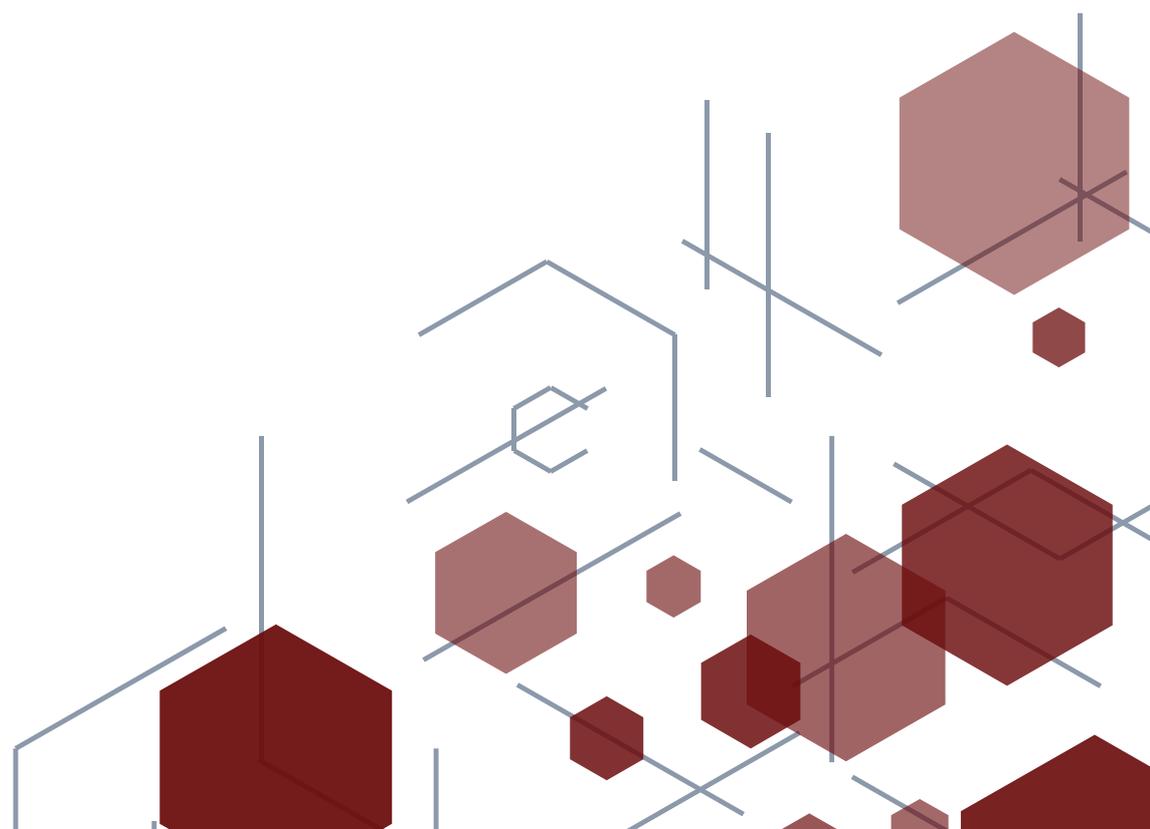
Skema GM K/PMR	Jumlah Skema Produk	Realisasi	
		Debitur	Nominal (Rp M)
GM 1 (Proses Cepat)	25	64.809	Rp1.069,09
GM 2 (Berbiaya Rendah)	25	77.990	Rp2.056,77
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	38	744.838	Rp23.014,45
Total	88	887.637	Rp26.140,31

Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran



Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2022

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Keterangan
1	POJK Nomor 18 Tahun 2022	Perintah Tertulis	14 Oktober 2022	Penyusunan pengaturan ini dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Kewenangan OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu; (2) Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis oleh OJK dapat didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu; dan (3) Mekanisme pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu (antara lain terkait jangka waktu pelaksanaan Perintah Tertulis, rencana tindak, pelaporan).
2	POJK Nomor 19 Tahun 2022	Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana	27 Oktober 2022	Penyusunan pengaturan ini dalam rangka menanggapi kondisi terkini dimana Indonesia dilanda bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam (seperti beberapa virus yang dapat menyerang manusia ataupun hewan yang penyebarannya sangat masif ataupun karena sebab lainnya), yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Adapun pokok pengaturan yang diatur dalam POJK Bencana untuk Bank antara lain: (1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; (2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi; dan (3) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/ pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
3	POJK Nomor 22 Tahun 2022	Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum	1 November 2022	Penyusunan pengaturan ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah proses bisnis industri jasa keuangan termasuk perbankan, sehingga diperlukan kolaborasi perbankan dengan perusahaan bidang keuangan dalam suatu ekosistem digital. Kolaborasi

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Keterangan
				tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan penyertaan modal. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Kewajiban Bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara; (2) Batasan jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal oleh Bank, yaitu paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal Bank (jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal yaitu Penyertaan Modal pada seluruh <i>Investee</i> , termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan dividen saham); dan (3) Kewajiban Bank untuk menyampaikan rencana tindak atas pelampauan batasan Penyertaan Modal kepada OJK apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal melampaui batasan 35% (tiga puluh lima persen), yang disebabkan oleh peningkatan Penyertaan Modal pada <i>Investee</i> dan/atau penurunan modal Bank.
4	POJK Nomor 23 Tahun 2022	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	23 November 2022	Penyusunan pengaturan bertujuan untuk keselarasan kebijakan pengaturan melalui pendekatan <i>principle based</i> , pengharmonisasian dengan ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi bank umum, serta penyelarasan dengan ketentuan terkini lainnya yang berlaku bagi BPR dan BPRS. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Peminjam atau Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas; (2) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR atau BPRS; dan (3) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
5	POJK Nomor 24 Tahun 2022	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum	25 November 2022	Penyusunan pengaturan bertujuan agar sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bank Umum memiliki daya saing tinggi, berintegritas, kompeten, profesional, sehingga dapat mendukung industri perbankan agar semakin kontributif, memiliki daya tahan yang baik atau resiliens, berdaya saing tinggi, serta mampu untuk mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi di era digital. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Kewajiban Bank untuk menyediakan dan merealisasikan dana untuk pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Keterangan
				gaji kotor (<i>gross salary</i>) tahun sebelumnya; (2) Bank harus memiliki Direktur yang membawahkan fungsi SDM yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Bank. Fungsi SDM dilaksanakan oleh satuan kerja SDM; (3) Bank dapat melakukan pengembangan kualitas SDM alih daya yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank; dan (4) Kewajiban Bank untuk memiliki sistem dan/atau prosedur internal untuk memantau realisasi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
6	POJK Nomor 26 Tahun 2022	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	26 Desember 2022	Penyusunan pengaturan ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diterbitkan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPRS secara lebih selektif serta mewujudkan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPRS. Selain itu, POJK ini diterbitkan dalam rangka menghadirkan kelembagaan BPRS yang lebih tertata dan kuat. Pokok penyempurnaan yang diatur dalam POJK ini paling sedikit mengenai: (1) Pendirian BPRS; (2) penyesuaian zona pendirian BPRS menjadi tiga zona berdasarkan wilayah provinsi, serta persyaratan modal disetor minimum untuk masing-masing zona; (3) jangka waktu pemberian persetujuan prinsip oleh OJK; (4) Penegasan bahwa BPRS dapat menjalankan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Penyederhanaan perizinan pembukaan kantor cabang BPRS; dan (6) Sinergisasi BPRS.
7	POJK Nomor 27 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK KPMM)	26 Desember 2022	Penyusunan pengaturan ini dilatar belakangi oleh berlakunya standar Basel 3 <i>Reforms</i> secara internasional pada 1 Januari 2023 yang mengubah tata cara perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Untuk itu, diperlukan penyesuaian pada POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagai payung ketentuan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Penyesuaian dengan standar Basel 3 <i>reforms</i> antara lain berupa pemberlakuan kewajiban perhitungan ATMR Risiko Pasar bagi seluruh bank; (2) Payung pengaturan terkait kewajiban perhitungan permodalan atas eksposur bank ke <i>central counterparties</i> (CCP) dan penyediaan margin atas transaksi derivatif yang tidak dilakukan melalui CCP; dan (3) Penyesuaian dengan POJK lainnya seperti kewajiban pelaporan KPMM melalui sistem pelaporan OJK.

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Keterangan
8	SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum	7 Desember 2022	Penyusunan ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi oleh revisi standar pemenuhan modal minimum untuk risiko pasar sebagaimana diatur dalam standar Basel III: <i>Finalising post-crisis reforms</i> (Basel III Reforms) tahun 2017 yang diterbitkan oleh <i>Basel Committee on Banking Supervision</i> (BCBS) sebagai respon terhadap krisis keuangan global. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Bank menyampaikan uji coba Laporan Perhitungan ATMR Risiko Pasar untuk posisi akhir bulan Juni 2023, bulan September 2023, dan bulan Desember 2023; (2) Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar untuk posisi akhir bulan Desember 2023; dan (3) ATMR Risiko Pasar SEOJK ini pertama kali diperhitungkan dalam perhitungan rasio KPMM sejak 1 Januari 2024.
9	SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	22 Desember 2022	Penyusunan ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi oleh Penerbitan POJK Nomor 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (POJK LPIP), sehingga perlu penyesuaian terhadap pengaturan teknis yang sebelumnya diatur masih dalam SEBI No.15/49/DPKL perihal Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) LPIP menerapkan tata kelola yang baik dengan prinsip TARIF (<i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness</i>) antara lain melalui pelaksanaan tugas direksi dan dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, audit ekstern, serta pedoman operasional terkait kerja sama dengan anggota LPIP; dan (2) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan serta tata cara penilaian kembali terhadap pihak utama pengendali dan pihak utama pengurus LPIP, yaitu berkaitan dengan persyaratan, proses yang dilakukan, hasil penilaian, dan tindak lanjut atas hasil penilaian.
10	SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2022	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum	22 Desember 2022	Penyusunan ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi perlunya penerapan manajemen risiko Bank secara komprehensif, termasuk melalui dukungan terhadap peningkatan kompetensi kerja di bidang manajemen risiko melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan bagi SDM yang dimiliki Bank. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko yaitu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan, dan dapat diperpanjang. Masa berlaku perpanjangan Sertifikat Manajemen Risiko adalah 3 (tiga) tahun setelah tanggal masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sebelumnya berakhir; dan (2) Dalam pelaksanaan uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko, dapat

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Keterangan
				dilakukan dengan program sertifikasi tanpa berjenjang atau program akselerasi (<i>fast track</i>) dengan kriteria dan pemenuhan ketentuan tertentu.
11	SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022	Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum	27 Desember 2022	Penyusunan ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi perlunya ketentuan lebih lanjut yang mengatur pelaksanaan dari POJK Nomor 11/ POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI). Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Penilaian risiko inheren terkait keamanan siber; (2) Penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber, dan (3) Penerapan proses ketahanan siber bagi bank umum.

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<i>Beneficial Owner</i>	<i>Beneficial Owner</i> atau Pemilik Manfaat adalah setiap orang yang: (a) berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan nasabah; (b) merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (<i>ultimately own account</i>); (c) mengendalikan transaksi nasabah; (d) memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; (e) mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>); dan/atau (f) merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. (POJK Nomor 23/POJK.01/2019)
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian

Istilah	Keterangan
	tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i>	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.

Istilah	Keterangan
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
Good Corporate Governance (GCG)/ Tata Kelola	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. Rating penilaian tata kelola perbankan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.
I	
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).

Istilah	Keterangan
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

Istilah	Keterangan
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian

Istilah	Keterangan
	Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.

Istilah	Keterangan
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
S	
SIPUTRI	SIPUTRI merupakan salah satu terobosan OJK yang dikembangkan dalam upaya untuk menindaklanjuti arahan terkait dengan Reformasi Bisnis Proses Internal, yang menargetkan percepatan proses bisnis perizinan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Pada perjalanannya, aplikasi SIPUTRI dikembangkan melalui beberapa tahapan dan sebagaimana diatur dalam PDK Nomor 4/PDK.01/2020 tentang Permintaan Informasi Terkait Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Secara Elektronik, aplikasi SIPUTRI tidak hanya digunakan untuk keperluan PKK namun juga digunakan untuk permintaan informasi terkait Pelaku di LJK secara elektronik dalam rangka mendukung fungsi pelaporan, perizinan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan informasi pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SIPUTRI menjadi aplikasi satu pintu bagi pengawas OJK untuk mempercepat proses <i>information shopping</i> oleh pengawas OJK.
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: DIMB@ojk.go.id**

